

**KONSEP *GREEN ECONOMY* UNTUK PENGELOLAAN
EKOWISATA BRAJA HARJOSARI LAMPUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ekonomi Syariah

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH



Oleh:
RADITIO WAHID
NPM 2271040130

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
Pembimbing Pendamping: Putri Swastika, Ph.D.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 2026

**KONSEP *GREEN ECONOMY* UNTUK PENGELOLAAN
EKOWISATA BRAJA HARJOSARI LAMPUNG TIMUR**

TESIS

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH



Oleh:

**RADITIO WAHID
NPM 2271040130**

**Pembimbing Utama: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
Pembimbing Pendamping: Putri Swastika, Ph.D.**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul **Konsep *Green Economy* Untuk Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari** yang ditulis oleh Raditio Wahid dengan NIM. 2271040130 telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Ujian Tesis pada pascasarjana Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 1972100 1199903 1 003

Pembimbing Pendamping

Putri Swastika, Ph.D
NIP. 19861030 2018012 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember
PROGRAM PASCASARJANA**

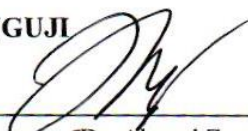
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

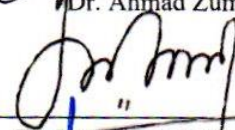
Tesis dengan judul **Konsep *Green Economy* Untuk Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari Lampung Timur** disusun oleh Raditio Wahid, NIM. 2271040130, Program Studi Magister Ekonomi Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Januari 2026

TIM PENGUJI

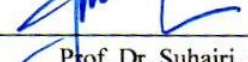
Ketua / Moderator

()
Dr. Ahmad Zumaro, MA

Penguji Utama / Penguji I

()
Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Pembimbing Utama / Penguji III

()
Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.I

Pembimbing Pendamping / Penguji IV

()
Putri Swastika, M.IF., Ph.D



Dekan Pascasarjana,

Prof. Dr. Akla, M.Pd.

NIP. 19691008 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Raditio Wahid
NIM : 2271040130
Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini, secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 23 Desember 2025

Yang menyatakan



RADITIO WAHID

MOTTO

Q.S Al-Qashash: ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Q.S Al-Qashash: ayat 77.

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia: dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis konsep *green economy* dalam pengelolaan ekowisata di Desa Braja Harjosari serta meninjau kesesuaiannya dari perspektif Islam. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, khususnya di tengah degradasi lingkungan dan meningkatnya praktik wisata yang melakukan eksploitasi secara berlebihan. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green economy* di Desa Braja Harjosari mencerminkan dimensi lingkungan melalui konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah berbasis sirkular. Secara ekonomi, ekowisata telah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja hijau, dan mendukung UMKM. Dimensi sosial terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan edukasi lingkungan. Sementara itu, dimensi kelembagaan ditunjukkan dengan kolaborasi multi-stakeholder dan regulasi lokal yang mendukung pengelolaan berkelanjutan. Dari perspektif Islam, implementasi *green economy* selaras dengan prinsip-prinsip tauhid, mizan, khilafah, dan amanah yang menekankan kesatuan ciptaan, keseimbangan, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, dan etika pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *green economy* tidak hanya relevan sebagai strategi pelestarian dan pemberdayaan dalam ekowisata, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan alam secara adil, berkelanjutan, dan holistik.

Kata kunci: Green Economy, Ekowisata Desa Braja Harjosari, Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the concept of green economy in ecotourism management in Braja Harjosari Village and review its suitability from an Islamic perspective. The background of this study is based on the urgency of sustainable development that balances economic, environmental, and social dimensions, especially amid environmental degradation and increasing tourism practices that involve excessive exploitation. The method used in this study is a descriptive qualitative case study approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of a green economy in Braja Harjosari Village reflects the environmental dimension through biodiversity conservation, renewable energy utilization, and circular waste management. Economically, ecotourism has increased local community income, created green jobs, and supported MSMEs. The social dimension is realized through active community participation, preservation of local culture, and environmental education. Meanwhile, the institutional dimension is demonstrated by multi-stakeholder collaboration and local regulations that support sustainable management. From an Islamic perspective, the implementation of the green economy is in line with the principles of tauhid, mizan, khilafah, and amanah, which emphasize the unity of creation, balance, human responsibility as caliphs, and the ethics of resource utilization. This study concludes that the green economy is not only relevant as a strategy for conservation and empowerment in ecotourism, but also consistent with Islamic values in the fair, sustainable, and holistic management of nature.

Keywords: Green Economy, Braja Harjosari Ecotourism, Islamic Economics, Sustainable Development.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konsep Green Economy untuk Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Tesis ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah terhadap pengembangan pemikiran tentang ekonomi hijau (*green economy*) yang relevan dengan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, khususnya dari perspektif Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral, akademik, maupun teknis.

Oleh karena itu, salam takzim dan salam hormat dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., selaku pembimbing utama, dan Putri Swastika, Ph.D., selaku pembimbing pendamping, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
2. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Metro atas ilmu dan kesempatan yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Pemerintah Desa dan pengelola Desa Wisata Braja Harjosari yang telah memberikan izin dan informasi selama proses pengumpulan data lapangan.
4. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan motivasi yang tak pernah surut.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Metro, 19 Januari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raditio Wahid', with a stylized flourish at the end.

Raditio Wahid

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pengunjung Desa Wisata Braja Harjosari	9
Tabel 2.	Daftar Ruang Lingkup/Paket Destinasi Ekowisata Braja Harjosari	76
Tabel 3.	Struktur Anggota Koperasi Jasa Wisata Padang Savana Braja Harjosari	77
Tabel 4.	Data Kunjungan Wisatawan	78

DAFTAR ISI

HALAMAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	15
C. Pertanyaan Penelitian.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Penelitian Relevan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL GREEN ECONOMY DAN EKOWISATA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	26
A. Konsep <i>Green Economy</i>	26
1. Pengertian <i>Green Economy</i>	26
2. Pilar-pilar <i>Green Economy</i>	38
B. <i>Green Economy</i> sebagai Kerangka Teoritis dalam Ekowisata	43
C. Konsep <i>Green Economy</i> dalam Perpspektif Islam	56
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65

B. Latar dan Waktu Penelitian	66
C. Sumber Data.....	66
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	68
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	70
F. Teknik Analisis Data	71
BAB IV IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY DALAM	
PENGELOLAAN EKOWISATA BRAJA HARJOSARI	
PERSPEKTIF ISLAM	74
A. Profil dan Dinamika Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari	74
B. Implementasi Dimensi Lingkungan dalam Praktik Ekowisata ...	79
C. Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat Lokal	83
D. Partisipasi Sosial dan Pelestarian Budaya Lokal	87
E. Tata Kelola dan Kolaborasi Kelembagaan Ekowisata	89
F. Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari.....	90
G. Konsep Green Economy dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari Perspektif Islam	108
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Rekomendasi	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai lingkungan merupakan masalah yang serius, hampir seluruh sumber daya alam yang ada sudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dalam memanfaatkan alam secara berlebihan.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa wacana pembangunan juga dapat menimbulkan berbagai dampak.² Maka dari itu peninjauan secara mendalam harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk secara sadar, bahwa menjaga keseimbangan alam merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan hidup.³

Dengan adanya problematika tersebut, gagasan tentang menyeimbangkan lingkungan dengan ekonomi mulai bermunculan. Salah satunya *green economy* yang dirumuskan untuk mendukung keberlangsungan atas masalah lingkungan dengan mengusung perkembangan sistem ekonomi ramah lingkungan.⁴ Konsep *green*

¹ Efendi, "Perlindungan Sumberdaya Alam Dalam Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 5 (2011).

² Mohamded Bouteraa, "Green Banking Practices Form Islamic and Western Perspectives," *International Jurnal of Business, Economics and Law* 21, no. 5 (2020).

³ Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, and Nusantara Fitriani, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," in *KONASI: Konferensi Nasional Studi Islam*, 2022, 142–53, <https://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/view/55%0Ahttps://conference.kopertais02.or.id/index.php/konasi/article/download/55/23>.

⁴ Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2016).

economy muncul pada konferensi PBB yang mengusung tema tentang lingkungan hidup dan pembangunan tahun 1992 (*the Rio Earth Summit*) dengan tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan iklim.⁵ Dalam beberapa tahun belakangan ini, konsep pertumbuhan ekonomi hijau⁶ menjadi perhatian dan mulai digunakan oleh para pembuat kebijakan dan para akademisi untuk dijadikan sebagai perspektif alternatif yang digunakan sebagai konsep dalam kemakmuran atas ketimpangan yang selama ini terjadi.⁷

Berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0317/P.01/01/20013, *green economy* dipahami sebagai suatu sistem ekonomi baru yang menekankan pada efisiensi penggunaan energi serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.⁸ Menurut Ayu Multika Sari dkk menjelaskan bahwa konsep *green economy* merupakan penerapan paradigma ekonomi yang

⁵ Penny Mealy and Alexander Teytelboym, "Economic Complexity and the Green Economy," *Research Policy* Vol. 51, no. 8 (2022): 1, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103948>.

⁶ Alex Bowen and Cameron Hepburn, "Green Growth: An Assessment," *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 30, no. 3 (2014): 407–22, <https://doi.org/10.1093/oxrep/gru029>; Roger Fouquet, *Handbook on Green Growth*, *Handbook on Green Growth*, 2019, <https://doi.org/10.4337/9781788110686>; Sthephane Hallegatte et al., "From Growth to Green Growth-A Framework" (Washington DC: Policy Research World Bank, 2011); Sjak Smulders, Michael Toman, and Cees Withagen, "Growth Theory and 'Green Growth,'" *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 30, no. 3 (2014): 423–46, <https://doi.org/10.1093/oxrep/gru027>.

⁷ Asian Development Bank, "Low-Carbon Green Growth in Asia: Policies and Practices," Asian Development Bank Institute § (2013), www.adbi.org/%5Cnpublications.books/.

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Surat Penawaran Diklat Green Economy Nomor 0317/P.01/01/2013" (Jakarta, 2013).

berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup dalam proses pembangunan.⁹ Sejalan dengan pandangan tersebut, Dewi Wungkus Antasari menyatakan bahwa green economy adalah sebuah konsep yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian alam.¹⁰ Oleh karena itu, *green economy* dapat dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.¹¹

Dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam perspektif jangka panjang Indonesia memiliki potensi besar pada pengembangan sektor *green product* dan *green economy*. Potensi tersebut didukung oleh mulai berkembangnya produk-produk yang berkarakter rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta bersifat inklusif secara sosial. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pertumbuhan produk hijau sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu

⁹ Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid, "Penerapan Konsep Green Economy Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Dusun Kungkuk , Desa Punten Kota Batu," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2012): 766.

¹⁰ Dewi Wungkus Antasari, "Implementing Green Economy to Green Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri Oath in Kediri City," *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 5, no. 2 (2020): 28.

¹¹ Ida Nurlinda, "Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019).

lingkungan. Peningkatan kesadaran tersebut dinilai berpengaruh terhadap dinamika ekonomi dan bisnis global, termasuk terhadap perekonomian nasional.¹² Sementara itu, M. Jefri Raharja mengungkapkan bahwa kawasan hutan di Kalimantan saat ini banyak beralih fungsi menjadi perkebunan sawit monokultur dan wilayah pertambangan batu bara. Kondisi ini disayangkan karena berpotensi mempercepat laju perubahan iklim secara global.¹³

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa saat ini manusia sudah tidak lagi memperhatikan kondisi alam, dalam hal menjaga—masalah serupa juga terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas, kerusakan hutan yang kerap disebabkan oleh kebakaran. Pada akhir tahun 2023 kurang lebih 200 Hektare lahan hutan Way Kambas yang terbakar,¹⁴ bahkan pada awal tahun 2024 kurang lebih 301 hektare hutan Way Kambas terbakar yang disebabkan oleh para pemburu yang tidak bertanggung jawab.¹⁵ Akibatnya sangat

¹² Dita Angga Rusiana, “Jokowi Sebut Indonesia Miliki Peluang Besar Di Industri Produk Hijau,” *Sindonews.Com*, 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/308878/33/jokowi-sebut-indonesia-miliki-peluang-besar-di-industri-produk-hijau-1611205296> di akses pada tanggal 7 Mei 2024.

¹³ Ryan Aditya Nicholas and Krisiandi, “Klaim Pemerintah Soal Izin Tambang Dan Sawit Di Kalsel Yang Dibantah Walhi Dan Jatam,” *Kompas.Com*, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/09112571/klaim-pemerintah-soal-izin-tambang-dan-sawit-di-kalsel-yang-dibantah-walhi?page=all> di akses pada tanggal 7 Mei 2024.

¹⁴ Tim detikcom, “Fakta-Fakta Terkini Kebakaran Di TN Way Kambas Ulah Pemburu Liar,” *Detiknews.Com*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6966579/fakta-fakta-terkini-kebakaran-di-tn-way-kambas-ulah-pemburu-liar> di akses pada tanggal 7 Mei 2024.

¹⁵ Humas Polda Lampung, “Insiden 301 Ha Hutan Konservasi Way Kambas Terbakar Kuat Diduga Ulah Manusia,” *Tribatanews.Lampung.Polri.Go.Id*, March 21, 2024, <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/insiden-301-ha-hutan-konservasi-way-kambas-terbakar-kuat-diduga-ulah-manusia#carouselExampleIndicators> diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

mengganggu hewan dan masyarakat, bahkan para pengunjung Taman Nasional Way Kambas. Oleh sebab itu, para pegiat lingkungan dan pihak penjaga hutan Way Kambas melakukan perbaikan lahan, membuat sekat bakar, dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga Taman Nasional Way Kambas dari kebakaran hutan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memandang *green economy* sebagai pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dengan tetap menjamin keberlanjutan lingkungan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Sehingga ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang *green economy* diantaranya adalah Zikri Rahman *et.al.* melakukan penelitian tentang peran dan potensi *green economy* pada masyarakat lokal. Konsep *green economy* mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui ekowisata berbasis *green economy*.¹⁷ Baharuddin *et.al.* juga menyoroti *green economy* dalam mengelola desa wisata. mereka mengkaji peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.¹⁸ penelitian serupa juga dilakukan oleh Agustina *et.al.* yang mengkaji

¹⁶ Rizka Zulfikar, Prihatini Ade Mayvita, and Purboyo, *Pengantar Green Economy* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 17.

¹⁷ Zikri Rahman, Marliyah, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Peran Green Economy Melalui Pengembangan Ekowisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* Vol. 5, no. 3 (2023): 977–83, <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.703>.

¹⁸ Andi Baharuddin, Muhlis, and Andi Aris Mattunruang, "Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 7, no. 3 (2023): 813–29.

green economy dalam pengembangan desa wisata.¹⁹ Sisi lain Iskandar dan Aqbar mengkaji *green economy* dalam perspektif *maqashid syariah*.²⁰ Wahyu *et.al.* juga melakukan penelitian *green economy* dalam sudut pandang *maqashid syariah* dan *fiqh al-bi'ah*, Ia menyimpulkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan hal yang urgensi untuk dijaga.²¹

Kemudian secara konseptual, ekowisata dalam paradigma *green economy* tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekomonomi lokal, melainkan juga menjamin keseimbangan alam, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta tata kelola kelembagaan yang partisipatif dan berkelanjutan.²² Hal tersebut menjadi sangat penting karena pada era saat ini, pariwisata merupakan objek yang menjadi bagian peningkatan perekonomian.²³

Sejalan dengan konteks tersebut, *The International Ecotourism Society* menyatakan bahwa ekowisata merupakan kegiatan yang harus didasari dengan memiliki rasa tanggung jawab atas pelestarian lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat lokal, serta

¹⁹ Laili Dwi Agustina et al., "Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Miru Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 7, no. 2 (2022): 63–73.

²⁰ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

²¹ Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy."

²² UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Education* (Kenya: United Nations Environment Programme, 2011).

²³ Bappenas, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)* (Jakarta: Direktorat Lingkungan Hidup, 2013), 10, <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20180613170950.pdf>.

melibatkan unsur edukasi.²⁴ Dengan demikian, pengelolaan ekowisata secara ideal harus mampu menjadi instrumen konservasi sekaligus penggerak ekonomi lokal berbasis keberlanjutan. Secara teoritis, pembangunan pariwisata berbasis *green economy* juga menuntut integrasi empat dimensi utama, yaitu dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.²⁵

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata idealnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*al-'adl*), serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pengelola sumber daya alam yang wajib menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan (*fasad*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raf: 56). Oleh karena itu, pengelolaan ekowisata dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan ekologis. M Umer Chapra menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang ideal harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial maupun eksploitasi lingkungan.²⁶

Dengan demikian, secara normatif dan teoritis, pengelolaan ekowisata berbasis *green economy* idealnya merupakan sistem pengelolaan wisata yang mengintegrasikan keberlanjutan

²⁴ ITIES, "What Is Ecotourism?," *The International Ecotourism Society*, 2015, <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>.

²⁵ Jacqueline Madeleine Borel-Saladin and Ivan Nicholas Turok, "The Green Economy: Incremental Change or Transformation?," *Environmental Policy and Governance* 23, no. 4 (2013): 209–20, <https://doi.org/10.1002/eet.1614>.

²⁶ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

lingkungan, inklusivitas ekonomi, pemberdayaan sosial masyarakat, serta tata kelola kelembagaan yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai etika pembangunan, termasuk prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Namun pada praktiknya, pengelolaan ekowisata pada tingkat desa wisata masih pada taraf yang berorientasi pada peningkatan ekonomi. Salah satunya yaitu Ekowisata Desa Braja Harjosari dengan mayoritas penduduknya merupakan pendatang dari pulau bali dan jawa, sehingga desa ini memiliki perpaduan budaya. Namun secara kontekstual, ekowisata ini juga masih menghadapi sejumlah realitas empiris, seperti Aktivitas ekowisata di Desa Braja Harjosari menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip *green economy* secara sistematis dan terintegrasi, serta pengelolaan lingkungan masih dilakukan secara parsial. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan pengelola wisata masih dalam tahap pengembangan dan belum didukung oleh model tata kelola berbasis keberlanjutan yang jelas. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh belum tersusunnya formulasi konseptual yang mampu mengintegrasikan prinsip *green economy* dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik pengelolaan ekowisata berbasis desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata sering kali masih berorientasi pada peningkatan destinasi dan kunjungan wisata, bukan pada transformasi menuju sistem ekonomi hijau yang utuh.

Desa Braja Harjosari merupakan desa penyangga dari Taman Nasional Way Kambas dan memiliki potensi alam dan budaya.

Sekaligus menjadi wilayah yang rentan terhadap konflik dengan gajah maupun dengan alam yang benar-benar harus dijaga, sehingga harus di kelola dengan tepat. Sebagai objek wisata, Ekowisata Brajaharjosari dikelola dengan konsep berbasis masyarakat dengan memiliki beragam paket wisata antara lain: Pengamatan Gajah Liar, Wisata Susur Sungai Way Penet, Bird Watching, Night Safari, Agrowisata, Kesenian Gamelan dan Tari Bali, Jungle Tracking, Tanggul Tracking, Edukasi Gajah Sumatera, Budidaya Lebah Madu, Kerajinan Rajut Savana, dan Homestay. Paket wisata tersebut tidak hanya menawarkan keindahan alam desa, melainkan juga memberikan edukasi melalui *Treatment Special Interest Tourism* (wisata minat khusus) yang berupa kegiatan dengan cara melaksanakan perjalanan untuk belajar dan berupaya mendapatkan pengalaman baru tentang sesuatu hal di daerah yang dikunjungi.²⁷ Berikut di bawah ini jumlah pengunjung Desa Wisata Braja Harjosari dari tahun 2016-2023:

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2016	150	110
2017	1100	185
2018	900	240
2019	198	55
2020	13	0
2021	15	0
2022	81	37
2023	212	80

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Desa Wisata Braja Harjosari

²⁷ Waryoko, Selaku Anggota Pengelola Desa Wisata Braja Harjosari (Braja Harjosari: Wawancara, 2023).

Sumber Data: Pengelola Desa Wisata Braja Harjosari

Sejak awal pendiriannya, Desa Wisata Braja Harjosari menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, meskipun pada periode tertentu mengalami fluktuasi. Dalam pengelolaan kegiatan pariwisata, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait aktivitas wisata dan tata kelola pengelolaan destinasi. Aspek-aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan perkembangan desa wisata, antara lain pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh wisatawan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta dampak keberadaan objek wisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa Desa Wisata Braja Harjosari belum bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung, terlebih pada tahun 2019-2022 terjadi wabah covid-19 yang menjadi salah satu penghambat pertumbuhan objek wisata tersebut. Kemudian dalam hal pembangunan pariwisata ini perlu membuat inovasi-inovasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung, namun dengan catatan harus tetap memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada pada wilayah tersebut.

Pembangunan pariwisata tidak hanya dituntut untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran di daerah. Meskipun potensi pariwisata yang dimiliki cukup besar, tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat memilih

alternatif mata pencaharian lain. Hal ini berimplikasi pada rendahnya penguasaan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan pengembangan potensi objek wisata.²⁸

Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata semestinya berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja serta penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata perlu dilakukan secara optimal agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pihak pengelola, tetapi juga oleh masyarakat secara luas melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Segala pemanfaatan yang berkaitan dengan alam, maka harus memperhatikan tentang konsep yang dapat berkelanjutan dan ekologisnya,²⁹ dengan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan,³⁰ maka akan dapat membantu pengelolaan sumber daya

²⁸ Waryoko, *Selaku Anggota Pengelola Desa Wisata Braja Harjosari* (Braja Harjosari: Wawancara, 2023).

²⁹ Diamantis Dimitrios, "Concept of Ecotourism: Evolution and Trends," *Current Issues in Tourism* Vol. 2, no. 2&3 (1999): 93–122, <https://doi.org/10.1080/13683509908667847>.

³⁰ Anne Borge Johannesen and Anders Skonhoft, "Tourism, Poaching and Wildlife Conservation: What Can Integrated Conservation and Development Projects Accomplish?," *Resource and Energy Economics* Vol. 27, no. 3 (2005): 208–26, <https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2004.10.001>; Ben Ma et al., "Estimating the Social and Ecological Impact of Community-Based Ecotourism in

alam yang berkelanjutan serta konservasi ekologi di kawasan lindung atau objek wisata alam.³¹ Selain itu, dengan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan alam maka akan dapat juga menghasilkan ekonomi bagi masyarakat lokal.³²

Beberapa literatur menyebutkan bahwa pariwisata telah dikenal sebagai industri tanpa asap. Santoso menyatakan bahwa sebagai industri, pariwisata dapat memperoleh pendapatan dan keuntungan sosial, budaya, dan ekonomi lainnya tanpa mendirikan pabrik besar yang dapat merusak lingkungan.³³ Namun pernyataan tersebut masih dapat diperdebatkan, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berpergian dengan menggunakan transportasi dan kepadatan lalu lintas akibat pariwisata yang berkontribusi menghasilkan karbon dan emisi yang dapat merusak lingkungan. Kemudian berbagai aktivitas pariwisata seperti hotel, restoran, taman hiburan, dan atau pertunjukan seni yang menghasilkan banyak sampah dan menggunakan banyak energi untuk sistem operasinya.³⁴

Giant Panda Habitats,” *Journal of Environmental Management* Vol. 250, no. 8 (2019): 109506, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109506>.

³¹ Jessica Coria and Enrique Calfucura, “Ecotourism and the Development of Indigenous Communities: The Good, the Bad, and the Ugly,” *Ecological Economics* Vol. 73, no. 10 (2012): 47–55, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.10.024>.

³² Guangming He et al., “Distribution of Economic Benefits from Ecotourism: A Case Study of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas in China,” *Environmental Management* Vol. 42, no. 6 (2008): 1017–25, <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9214-3>.

³³ Pudjio Santoso, “Respon Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Menangkap Peluang Pengembangan Pariwisata Di Bawean,” *Biokultur* 5, no. 2 (2016): 262–71.

³⁴ Michael Romeril, “Tourism and the Environment towards a Symbiotic Relationship: Introductory Paper,” *International Journal of Environmental Studies* 25, no. 4 (1985): 215–18, <https://doi.org/10.1080/00207238508710228>.

Kemudian untuk membentuk rasa tanggung jawab pada masyarakat dalam konsep ekowisata harus membentuk sikap, kesadaran, dan perilaku tentang betapa pentingnya menjaga alam dengan baik. Selain itu juga masyarakat harus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan pariwisata, termasuk pariwisata yang menarik minat para wisatawan melalui minat khusus dan pengalaman ekologis, edukasi, dan informatif tentang objek wisata yang ada,³⁵ serta penduduk lokal dapat berkontribusi memanfaatkan peluang alternatif dalam mencari mata pencaharian.³⁶ Dengan begitu, ekowisata tidak hanya sekadar tempat konservasi, melainkan juga dapat dijadikan objek pembangunan berkelanjutan³⁷ yang fokus pada dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial.³⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai dan pengelolaan ekowisata

³⁵ Ruhanen, "The Prominence of Eco in Ecotourism Experiences: An Analysis of Post-Purchase Online Reviews."

³⁶ Xavier Basurto et al., "Integrating Simultaneous Prosocial and Antisocial Behavior into Theories of Collective Action," *Science Advances* Vol. 2, no. 3 (2016): 1–11, <https://doi.org/10.1126/sciadv.1501220>.

³⁷ Johannesen and Skonhøft, "Tourism, Poaching and Wildlife Conservation: What Can Integrated Conservation and Development Projects Accomplish?"; Robin Naidoo and Wiktor L. Adamowicz, "Biodiversity and Nature-Based Tourism at Forest Reserves in Uganda," *Environment and Development Economics* Vol. 10, no. 2 (2005): 159–78, <https://doi.org/10.1017/S1355770X0400186X>.

³⁸ J. Andrés Domínguez-Gómez and Teresa González-Gómez, "Analysing Stakeholders' Perceptions of Golf-Course-Based Tourism: A Proposal for Developing Sustainable Tourism Projects," *Tourism Management* Vol. 63, no. 5 (2017): 135–43, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.015>; José Manuel Guaita Martínez et al., "An Analysis of the Stability of Rural Tourism as a Desired Condition for Sustainable Tourism," *Journal of Business Research* Vol. 100, no. 8 (2019): 165–74, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.033>; Lihong Yu, Ge Wang, and David W. Marcouiller, "A Scientometric Review of Pro-Poor Tourism Research: Visualization and Analysis," *Tourism Management Perspectives* Vol. 30, no. 1 (2019): 75–88, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.02.005>.

yang ada di desa Braja Harjosari. Kajian ini menjadi menarik karena secara geografis ekowisata Braja Harjosari terletak di perbatasan hutan Way Kambas dan menjadi desa penyangga yang memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai kawasan konservasi, mitigasi bencana, pendukung destinasi wisata, dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga harus benar-benar menjaga kelestarian alam dan bagaimana strategi para pengelola tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa Braja Harjosari melalui ekowisata tanpa merusak alam.

Kemudian penelitian ini menggunakan konsep *green economy* sebagai dasar dalam menganalisa ekowisata Desa Braja Harjosari. Haseena³⁹ menyatakan bahwa peran *green economy* dalam mengembangkan pariwisata tidaklah mudah, karena pariwisata juga merupakan sektor yang sama dengan sektor lainnya yang memiliki masalah-masalahnya sendiri. Terlebih pariwisata dibentuk oleh manusia untuk memperoleh pendapatan. Maka dari itu Haseena menyatakan bahwa pariwisata tanpa menggunakan konsep *green economy* akan seperti padang pasir dan tidak ada yang akan senang berada disana meskipun dapat melihat banyak bangunan beton di atasnya. selain itu juga penelitian ini menggunakan perspektif islam sebagai sudut pandang dan menilai praktik dalam pengelolaan ekowisata tersebut. Dalam konteks perspektif islam, selaras dengan pernyataan Menurut Choudhury dalam buku terbitan Bank Indonesia, konsep *sustainability* dalam metodologi ekonomi

³⁹ A Haseenav, "The Greener Economy – An Emerging Concept From Kerala Tourism," *Journal of Tourism, Hospitality and Sports* 10, no. 2015 (2015): 65–74.

pembangunan Islam dipahami sebagai suatu proses integratif yang menyelaraskan dimensi ekonomi, sosial, dan etika manusia secara berkelanjutan.⁴⁰ Maka dari itu penggunaan sudut pandang islam merupakan perspektif yang cukup adaptif dalam menilai sistem pengelolaan ekowisata desa Braja Harjosari.

Penelitian ini memandang bahwa pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari dapat ditinjau melalui perspektif green economy dan diperkuat menggunakan analisa ekonomi islam, dengan melihat sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi hijau diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kelembagaan. Diharapkan penelitian ini dapat mengukur efektivitas serta tantangan implementasi konsep green economy dalam praktik ekowisata di tingkat lokal dan menjadi sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat, bahkan dapat menyelesaikan berbagai problem lingkungan dan sosial.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Tujuan dari penyusunan fokus dan sub fokus untuk menentukan arah penelitian yang akan dilakukan, maka fokus dalam penelitian ini adalah menelisik bagaimana sistem pengelolaan yang digunakan oleh ekowisata Braja Harjosari dan menjadikan *green economy* sebagai konsep dalam pengembangan desa wisata yang ramah lingkungan.

⁴⁰ A. Jajang W. Mahri et al., *Pembangunan Ekonomi Islam*, Ed 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2023), 143.

Kemudian sub fokus dalam penelitian ini adalah telaah perspektif Islam sebagai sudut pandang penelitian. Sudut pandang Islam dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dan menimbang sistem tata kelola ekowisata Braja Harjosari.

C. Pertanyaan Penelitian

Setelah menentukan fokus dan sub fokus penelitian, selanjutnya peneliti menentukan pertanyaan penelitian yang dapat membantu peneliti untuk menyingkap suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi dan menjadi kompas untuk menuju studi yang lebih spesifik. Maka dari itu pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *green economy* dalam pengelolaan ekowisata Braja Harjosari?
2. Bagaimana konsep *green economy* dalam mengelola ekowisata Braja Harjosari perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus, sub fokus dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang pengelolaan ekowisata Braja Harjosari dalam perspektif *green economy*.
2. Untuk menganalisis tentang konsep *green economy* dalam pengelolaan ekowisata Braja Harjosari perspektif Islam.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum kajian ini masuk dalam kajian ekonomi dan agama, kajian semacam ini penting untuk dilakukan guna menambah khazanah keilmuan. Penelitian ini setidaknya dapat berkontribusi sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan rujukan ilmiah mengenai *green economy* yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti maupun akademisi lainnya dalam mengembangkan serta memperkuat teori dan konsep *green economy* dalam perspektif islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan, khususnya dalam upaya penanganan permasalahan lingkungan melalui penerapan konsep *green economy*.

- a. **Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konseptual dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu.
- b. **Bagi masyarakat**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana alternatif yang mendukung peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. **Bagi peneliti**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan, khususnya dalam kajian ekonomi.

F. Penelitian Relevan

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan merujuk pada sejumlah kajian terdahulu yang telah membahas tema serupa. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperkuat relevansi penelitian serta membantu peneliti dalam menentukan fokus kajian secara lebih mendalam. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini meliputi:

Muhkamat Anwar⁴¹ yang menelaah *green economy* sebagai strategi kebijakan dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan dinamika multilateral. Hasil kajian mengindikasikan bahwa penerapan konsep tersebut mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memperkuat kerja sama multilateral melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan ekonomi. Hal ini selaras dengan Scholastica Akalibey⁴² pada tahun 2023 mengkaji tentang pendorong *green economy* di negara berkembang. Hasil kajiannya mengungkapkan bahwa terdapat strategi yang berbeda dan spesifik

⁴¹ Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–56, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.

⁴² Scholastica Akalibey et al., "Drivers of Green Economy in an Emerging Market: Generic and Sector-Specific Insights," *Journal of Cleaner Production* 425, no. September (2023): 138857, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138857>.

untuk setiap sektor yang harus diterapkan oleh para pembuat kebijakan dan praktisi dalam upaya mereka untuk mendorong ekonomi hijau di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ika Yunia Fauzia⁴³ menelaah pentingnya penerapan konsep *green economy* dengan menggunakan perspektif *dharuriyah* dalam kerangka *maqashid syari'ah*. Temuan kajiannya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup perlu diposisikan sebagai bagian integral dalam tujuan syariat, sehingga diperlukan penguatan bahkan penambahan konsep *hifz al-bi'ah*. Hal ini didasarkan pada berbagai dalil dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang secara tegas menekankan kewajiban manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kajian yang serupa juga dilakukan oleh Utama *et.al*,⁴⁴ yang mengkaji konsep *green economy* dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh al-bi'ah*. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembaruan paradigma *fiqh al-bi'ah* dalam kerangka *green economy* berperan sebagai landasan *maṣlaḥah* dalam merumuskan prinsip-prinsip pengendalian perilaku manusia terhadap lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Kemudian pada tahun 2019, Azwar Iskandar⁴⁵ melakukan kajian yang berjudul "*Green Economy* Indonesia dalam

⁴³ Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah."

⁴⁴ Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy."

⁴⁵ Azwar Iskandar and Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 83, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>.

Perspektif *Maqashid Syariah*” dalam konteks Indonesia. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa perumusan model *green economy* dapat disesuaikan dengan karakter dan nilai-nilai bangsa Indonesia dengan menjadikan landasan filosofis *eco-ethics* Islam sebagai dasar, yang pada saat yang sama selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Azizah dan Hariyanto⁴⁶ melakukan kajian mengenai implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep *green economy*. Menurut mereka Jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, maka implementasi konsep *green economy* juga selaras dengan Islam dan mampu memberikan corak aktivitas bisnis yang dapat menyeimbangkan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Kemudian pada tahun 2022, Lestari Soehardi⁴⁷ melakukan kajian tentang peran ekonomi syariah dalam mewujudkan *sustainable development* berbasis *green economy*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *green economy* memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah. Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah berperan penting dalam perspektif *green economy* melalui penerapan prinsip sosial dan etika bisnis Islam, komitmen terhadap pelestarian lingkungan serta pengurangan permasalahan sosial, dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, serta prinsip *halal*

⁴⁶ Azizah and Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics.”

⁴⁷ Dwi Vita Lestari Soehardi, “Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy,” in *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 2022, 31–39.

yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kajian mengenai konsep *green economy* dalam pariwisata sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Agustina⁴⁸ *et.al* mengkaji *green economy* dalam mengembangkan desa wisata miru. Hasil kajiannya adalah terdapat peran pemerintah desa miru dan menyatakan bahwa konsep *green economy* berperan penting dalam pengembangan tersebut. Haseena⁴⁹ pada tahun 2015, menulis artikel mengenai *green economy* dalam pariwisata. Ia menyatakan bahwa peran *green economy* dalam mengembangkan pariwisata tidaklah mudah, karena pariwisata juga merupakan sektor yang sama dengan sektor lainnya yang memiliki masalah-masalahnya sendiri. Terlebih pariwisata dibentuk oleh manusia untuk memperoleh pendapatan. Maka dari itu Haseena menyatakan bahwa pariwisata tanpa menggunakan konsep *green economy* akan seperti padang pasir dan tidak ada yang akan senang berada disana meskipun dapat melihat banyak bangunan beton di atasnya.

Kemudian Lubis⁵⁰ *et.al* menulis artikel tentang pengelolaan wisata alam parsariran melalui implementasi *green economy* dengan konsep 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*). Dalam menjaga

⁴⁸ Agustina et al., "Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Miru Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik."

⁴⁹ A Haseenav, "The Greener Economy – An Emerging Concept From Kerala Tourism," *Journal of Tourism, Hospitality and Sports* 10, no. 2015 (2015): 65–74.

⁵⁰ Rizky Mery Octavianna Lubis, Yusuf Pathuansyah, and Abdelina, "Pengelolaan Wisata Alam Parsariran Melalui Implementasi Green Economy Dengan Konsep 3r (Reduce, Reuse, Recycle) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 2 (2022): 655–62.

lingkungan dan meningkatkan pendapatan ekonomi warga sekitar membentuk Bank Sampah Parsariran, melalui bank tersebut tidak hanya menjaga lingkungan namun juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar wisata alam parsariran. Rahman⁵¹ *et.al* juga mengkaji tentang peran dan potensi *green economy* terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal di Percut Sei Tuan melalui ekowisata taman air terjun nukny funland. Hasil kajiannya tersebut menunjukkan bahwa ekowisata tersebut telah menerapkan konsep *green economy* dalam pengelolaannya serta memberikan dampak positif terhadap pendapat dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Kemudian penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Dwik Pujiati,⁵² yang berlokasi di Desa Ngringinrejo dan bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis mekanisme penerapan tiga pilar *green economy*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan agrowisata Kebun Belimbing Ngringinrejo memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, penguatan aspek sosial, serta keberlanjutan ekosistem lingkungan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian *green economy* masih didominasi oleh pendekatan konseptual dan kebijakan makro, sementara penelitian yang mengkaji implementasi nyata konsep *green economy* pada pengelolaan ekowisata berbasis desa terkhusus desa penyangga

⁵¹ Rahman, Marliyah, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Peran Green Economy Melalui Pengembangan Ekowisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

⁵² Dwik Pujiati, "Penerapan Pilar Green Economy Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Ngiringrejo Bojonegoro" (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

melalui studi empiris masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menganalisis aspek *green economy* belum menyeluruh, sehingga belum banyak kajian yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam satu kerangka pengelolaan ekowisata yang utuh. Di sisi lain, meskipun kajian *green economy* dalam perspektif ekonomi Islam telah berkembang, sebagian besar masih bersifat normatif-teoritis dan belum menunjukkan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam diimplementasikan secara praktis dalam tata kelola ekowisata di tingkat lokal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis penerapan konsep *green economy* secara empiris dan holistik dalam pengelolaan ekowisata berbasis desa dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan sekaligus meninjaunya dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan Ekowisata Desa Braja Harjosari menjadi penting dilakukan guna memberikan pemahaman implementatif sekaligus menawarkan formulasi konseptual pengelolaan ekowisata berbasis *green economy* yang berkelanjutan dan kontekstual dengan karakter masyarakat desa penyangga.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam V bab utama. **Bab I** merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian, memuat tema kajian, uraian latar belakang permasalahan, serta

gambaran perdebatan akademik terkait isu yang diteliti. Pada bab ini dijabarkan beberapa subbagian, meliputi latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan terhadap penelitian relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Konseptual Green Economy Dan Ekowisata Dalam Perspektif Islam, Bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep yang menjadi dasar analisis dalam tesis ini. Fokus utama kajian diarahkan pada diskursus *green economy* dalam perspektif ekonomi Islam serta penerapannya dalam pengembangan desa wisata. Untuk memperoleh landasan teoretis yang komprehensif dan sistematis, Bab II disusun ke dalam beberapa subbab. Subbab A membahas konsep *green economy*, meliputi pengertian serta bentuk implementasinya. Subbab B mengkaji aktualisasi konsep *green economy* dalam sektor pariwisata, khususnya sebagai pendekatan dalam pengembangan desa wisata. Subbab C menelaah pilar-pilar *green economy* dalam perspektif Islam, yang menjadi kerangka normatif dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, Subbab D membahas relevansi konsep *green economy* dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menempatkan Islam sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi sekaligus sebagai sudut pandang analitis terhadap objek kajian, yaitu penerapan konsep *green economy* dalam pengembangan pariwisata.

Bab III Metode Penelitian menguraikan secara sistematis metode yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji, menginterpretasikan, dan

menjelaskan upaya pemecahan terhadap permasalahan penelitian. Bab ini disusun ke dalam beberapa subbagian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Implementasi Green Economy Dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari Perspektif Islam, memaparkan temuan penelitian yang bersumber dari data hasil wawancara dengan para narasumber, yang selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Analisis dalam bab ini difokuskan pada implementasi konsep *green economy* dalam pengelolaan ekowisata Braja Harjosari, serta telaah penerapan konsep tersebut ditinjau dari perspektif Islam.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi memuat rangkuman temuan utama penelitian yang disusun berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi yang dirumuskan dari hasil analisis tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan langkah-langkah di masa mendatang guna menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL GREEN ECONOMY DAN EKOWISATA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Konsep *Green Economy*

1. Pengertian *Green Economy*

Secara implisit konsep *green economy* pertama kali disebutkan oleh Pearce yang menyatakan bahwa lingkungan dan ekonomi selalu berkesinambungan.⁵³ Kemudian literasi tentang *green economy* menjadi wacana pada akhir tahun 2000-an, terutama pada konferensi Rio+20.⁵⁴ *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2009 mengadopsi gagasan pertumbuhan ekonomi hijau yang menekankan peran teknologi menjadi suatu solusi dan menyatakan bahwa “Agar negara-negara dapat memajukan langkah menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan, kerja sama internasional akan menjadi sangat penting dalam bidang-bidang seperti pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan pasar internasional untuk saling terhubung dalam bidang barang dan jasa lingkungan”.⁵⁵ *The world Business Council on Sustainable Development* mempromosikan

⁵³ David Willian Pearce, Anli Markandy, and Edward Barbier, *Blueprint for a Green Economy*, Ed 1 (London: London Environmental Economics Centre, 1989) Lebih lanjut lihat di; Donella H Meadows, Jorgen Randers, and Dennis L Meadows, *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind* (New York: Universe Books, 1972).

⁵⁴ Olivia Bina, “The Green Economy and Sustainable Development: An Uneasy Balance?,” *Environment and Planning C: Government and Policy* Vol. 31, no. 6 (2013): 1023–47, <https://doi.org/10.1068/c1310j>.

⁵⁵ OECD dalam Kristie O'Neill and David Gibbs, “Rethinking Green Entrepreneurship - Fluid Narratives of the Green Economy Kirstie O'Neill, David Gibbs,” *Environment and Planning A: Economy and Space* Vol. 48, no. 9 (206AD): 1–29 Lebih lengkap lihat di; Alain De Serres, Fabrice Murtin, and Giuseppe Nicoletti, “Framework for Assessing Green Growth Policies,” OECD Economics Department Working Papers No. 774,” 2010, <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/18151973>.

green economy yang didasarkan pada efisiensi pasar sebagai sarana untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.⁵⁶

Organisation for Economic Co-operation and Development mendefinisikan *green economy* sebagai keberlanjutan secara eksklusif pada ekonomi dan lingkungan. Namun demikian, dinyatakan pula bahwa “ada banyak hal yang penting diperhatikan dan saling melengkapi antara upaya-upaya untuk menghidupkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan”.⁵⁷ Ditekankan bahwa *green economy* tidak dapat dilihat sebagai pengganti pembangunan berkelanjutan. OECD menyatakan bahwa pertumbuhan *green economy* merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.⁵⁸ Kedua konsep tersebut saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang sama. Pembangunan berkelanjutan juga didefinisikan oleh *World Commission on Environment and Development* sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang.⁵⁹ Maka dari itu, fokus utama dari *green economy* adalah hubungan antara lingkungan, ekonomi, dan tidak mengabaikan dimensi sosial.

Kemudian dalam laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2008 mendefinisikan *green economy* adalah ekonomi yang berkonsentrasi pada faktor manusia, alam, dan menciptakan

⁵⁶ World Business Council for Sustainable Development, “Time to Transform: Vision 2050,” 2021, https://timetotransform.biz/wp-content/uploads/2021/03/WBCSD_Vision_2050_Time-To-Transform.pdf [https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform](https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform/Resources/Time-to-Transform) <https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/11765/177145/1>.

⁵⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Towards Green Growth* (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011), 201.

⁵⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 11.

⁵⁹ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (New York: Oxford University Press, 1987), 16.

lapangan kerja.⁶⁰ Pada tahun 2011, UNEP memperluas makna *green economy* untuk merujuk pada ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, memastikan transisi yang adil menuju ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial.⁶¹ Makna konsep tersebut secara jelas dipaparkan oleh UNEP sebagai berikut:

“...a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive. In a green economy, growth in income and employment should be driven by public and private investments that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services. These investments need to be catalyzed and supported by targeted public expenditure, policy reforms and regulation changes. The development path should maintain, enhance and, where necessary, rebuild natural capital as a critical economic asset and as a source of public benefits, especially for poor people whose livelihoods and security depend on nature.”

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa memperbaiki lingkungan dan mengurangi praktik-praktik yang merusak lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Dalam model ekonomi, hal ini merupakan investasi yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi rendah karbon, polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, mengurangi hilangnya keragaman hayati, dan menumbuhkan ekosistem yang mengarah pada pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja.⁶²

⁶⁰ Michael Renner et al., “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World,” *United Nations Environment Programme (UNEP)*, vol. 49 (Washington DC, 2008).

⁶¹ United Nations Environmental Programme, “Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste” (Washington DC, 2011).

⁶² Ligita Melece, “Challenges and Opportunities of Circular Economy and Green Economy,” *Engineering for Rural Development* Vol. 5, no. January (2016): 1162–69.

World Bank mendefinisikan *green economy* sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan.⁶³ Definisi tersebut tidak menyebutkan secara langsung tentang ketimpangan sosial, maka dari itu *World Bank* secara khusus mengacu pada pertumbuhan hijau yang inklusif. Karena sebagai pengakuan bahwa ketidaksetaraan sosial sering kali diabaikan demi degradasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi ketika membahas keberlanjutan. Menurut *world Bank* untuk mengatasi hal tersebut terdapat pendekatan yang harus dirancang secara khusus ketika membahas ketimpangan sosial saat merancang strategi *green economy*.⁶⁴ Dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menyelaraskan pilar ekonomi dan lingkungan, tanpa mengabaikan aspek sosial.

Jadi *green economy* dapat diartikan sebagai pembangunan yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ketiga laporan tersebut menekankan bahwa setiap upaya untuk menghijaukan ekonomi harus menggunakan pendekatan yang berpihak pada masyarakat miskin, meskipun terdapat beberapa ketidakjelasan tentang seberapa jauh hal ini harus dilakukan. Berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi, meskipun telah merusak lingkungan, telah mengangkat 660 juta orang keluar dari kemiskinan selama 20 tahun terakhir. Karena pertumbuhan mendorong pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi hijau dipandang sebagai sarana untuk membantu memperbaiki lingkungan yang rusak serta mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.⁶⁵ Sebagai contoh, teknik pertanian

⁶³ World Bank, "Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development," *New Solutions* (Washington DC, 2012), 24.

⁶⁴ Bank, "Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development."

⁶⁵ Hallegatte et al., "From Growth to Green Growth-A Framework."

ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen, sehingga memberikan petani skala kecil surplus hasil panen untuk dijual. Namun, cara utama untuk mengatasi kemiskinan yang diidentifikasi berkisar pada penyediaan layanan bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin paling rentan terhadap kelangkaan ekologi, kemiskinan energi dan air, misalnya, karena mereka tidak mampu membayar sumber daya tersebut.⁶⁶

Masyarakat di pedesaan sangat tergantung pada ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan dan restorasi sistem *green economy* dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana alam, serta dapat meningkatkan ketahanan mata pencaharian mereka.⁶⁷ Contoh lain instrumen yang dapat mengurangi ketimpangan masyarakat adalah dengan memberikan kompensasi kepada petani di pedesaan untuk tidak menebang hutan untuk membuka lahan dan contoh lainnya adalah reformasi subsidi energi dan bagaimana hal ini harus mencakup kompensasi untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah.⁶⁸

Secara teori, *green economy* merupakan konsep yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun banyak literatur yang menjelaskan keterkaitan konsep *green economy* dengan lingkungan dan ekonomi saja, seperti ruang lingkup ekonomi meliputi berbagai faktor seperti pembangunan, pertumbuhan, biaya, atau daya saing, dan pada ruang lingkup lingkungan mencakup banyak masalah terkait alam seperti perubahan iklim, sumber energi terbarukan, modal alam, dan energi. Selanjutnya dimensi sosial sangat kurang diperhatikan, padahal ketiga konsep tersebut saling berkesinambungan untuk menjadi aspek

⁶⁶ Edward B Barbier, "Natural Capital, Ecological Scarcity and Rural Poverty," *The World Bank Research Group* (Washington DC, 2012); United Nations Environmental Programme, "Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste."

⁶⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Towards Green Growth*.

⁶⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

keberlanjutan.⁶⁹ Untuk memperkuat dimensi sosial, dapat menggunakan telaah ekonomi-budaya dari sudut pandang *green economy* yang dapat menjelaskan berbagai wacana sehingga dapat dipandang memperlihatkan transisi sosial-teknis menuju masa depan yang berkelanjutan rendah karbon.⁷⁰

Green economy berupaya mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya proses produksi hingga distribusi yang ramah lingkungan. Dalam perkembangannya, *green economy* mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan air, perlindungan keanekaragaman hayati, pemanfaatan hutan berkelanjutan, perubahan gaya hidup, pertanian ramah lingkungan, serta strategi penurunan emisi yang mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.⁷¹ Berdasarkan berbagai kajian analitis, implementasi nyata unsur-unsur *green economy* tercermin dalam sejumlah kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja yang layak serta upaya pengentasan kemiskinan, dengan tetap memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan indikator atau ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan suatu

⁶⁹ Loiseau et al., "Green Economy and Related Concepts: An Overview."

⁷⁰ Bina, "The Green Economy and Sustainable Development: An Uneasy Balance?"; Clive L Spash, "Green Economy, Red Herring," *Environmental Values* Vol. 21, no. 2 (2012): 95–99.

⁷¹ Hernowo, *Green Economics, Tren Emisi Gas Rumah Kaca, Dan Perubahan Iklim Di Indonesia* (Bandung: Materi Diklat Non Gelar, 2011), 176.

kebijakan dan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Adapun karakteristik green economy menurut Murniningtyas meliputi:⁷²

1. Meningkatnya alokasi investasi yang berorientasi pada keberlanjutan.
2. Bertambahnya jumlah serta meningkatnya kualitas kesempatan kerja pada sektor-sektor ramah lingkungan.
3. Berkurangnya penggunaan energi dan sumber daya alam dalam setiap satuan proses produksi.
4. Menurunnya emisi karbon dioksida dan tingkat pencemaran lingkungan terhadap produk domestik bruto (GDP) yang dihasilkan; serta
5. Berkurangnya pola konsumsi yang berpotensi menghasilkan limbah.

Kemudian menurut Surna Tjahja dan Susanto menyatakan bahwa dalam *green economy* terdapat sembilan prinsip, diantaranya:⁷³

1. Mengutamakan nilai guna yang berkualitas

Green economy menempatkan perlindungan kualitas lingkungan sebagai landasan utama dalam sektor pelayanan. Selain itu, uang diposisikan kembali pada fungsi esensialnya sebagai alat pertukaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi akan memperkuat kualitas nilai guna dan mendorong terciptanya dampak ekonomi yang positif.

2. Mengikuti aliran alam

⁷² Endah Murniningtyas, *Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Development Strategic Initiatives)* (Jakarta: Deputy Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2014), 20.

⁷³ Surna Tjahja Djajadiningrat and Sutanto Hardjolukito, *Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau* (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013), 201.

Pendekatan ini mendorong terbentuknya siklus ekologis yang alami melalui pemanfaatan vegetasi setempat, keterkaitan dalam jaring-jaring makanan, serta penggunaan material lokal. Kondisi tersebut menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap aspek lingkungan, sehingga batas-batas politik dan ekonomi dapat diselaraskan dengan batas ekosistem dan pada akhirnya memperkuat pengembangan konsep serta praktik bioregional.

3. Makanan sebagai sumber daya, bukan sampah

Dalam sistem alam, konsep sampah pada dasarnya tidak dikenal, karena setiap hasil dari suatu proses selalu dimanfaatkan kembali dalam proses lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterpaduan sistem, tetapi juga oleh kualitas produk yang dihasilkan. Produk tersebut harus dirancang agar tidak menimbulkan dampak negatif, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai input bagi aktivitas lain dalam suatu sistem yang berkelanjutan.

4. Keteraturan dan keberagaman fungsi

Keberadaan jaring-jaring makanan yang kompleks mencerminkan hubungan antarkomponen yang saling terhubung dan terintegrasi, yang berbeda dengan pola segmentasi dan fragmentasi dalam masyarakat industri. Dalam konteks ini, setiap pendekatan penyelesaian masalah seharusnya berlandaskan pada kepentingan kolektif serta memberikan manfaat yang tidak hanya terbatas pada satu aktivitas, tetapi juga mendukung kegiatan lainnya.

5. Skala keterkaitan dan skala tepat guna

Konsep ini tidak semata-mata menekankan bahwa ukuran kecil selalu lebih baik, melainkan menegaskan bahwa setiap aktivitas produktif memiliki skala operasional yang paling sesuai dan efektif.

Setiap kegiatan, sekecil apa pun, berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas. Prinsip ini mencerminkan pendekatan ekologis yang menekankan perancangan sistem secara terpadu dalam berbagai skala, di mana terdapat hubungan timbal balik antara unsur yang berskala besar dan kecil.

6. Keanekaragaman

Dalam kondisi global yang terus berubah, keberlanjutan sistem sangat ditentukan oleh tingkat keanekaragaman yang dimilikinya. Keanekaragaman ini mencakup berbagai lapisan, mulai dari variasi spesies tumbuhan dan hewan, ekosistem, wilayah, hingga bentuk organisasi ekologis dan sosial. Keberagaman tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan daya tahan suatu sistem dalam menghadapi dinamika lingkungan.

7. Partisipasi dan demokrasi langsung

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan unsur esensial dalam pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip ekologi. Partisipasi ini memungkinkan terciptanya kebijakan dan perencanaan yang adaptif, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang terus berkembang.

8. Kreativitas dan pengembangan masyarakat

Peralihan dari pola produksi konvensional menuju sistem yang mengandalkan produktivitas alami mendorong tumbuhnya kreativitas dalam masyarakat. Proses ini menuntut pengembangan kualitas sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas dan kemampuan beradaptasi. Transformasi hijau tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi personal, politik, sosial, dan ekologis secara simultan. Nilai-nilai estetika sosial serta

kapasitas spiritual menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus sebagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

9. Peran strategis dalam lingkungan buatan

Peningkatan efisiensi dapat dicapai melalui pengelolaan tata ruang yang terencana dan terintegrasi antar komponen kegiatan. Prinsip keterpaduan desain, keteraturan, pemanfaatan bersama, serta keselarasan dengan alam menjadi dasar dalam pengembangan lingkungan buatan. Pengaturan spasial yang efektif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja seluruh aktivitas ekonomi.

Kemudian sesuai dengan prinsip *green economy*, dalam sektor wisata menekankan hubungan antar ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan dampak positif dalam jangka panjang dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan energi agar seminimal mungkin menghasilkan limbah dan dampak lingkungan, tanpa mengurangi kualitas alam, dan memberikan pengalaman atau pengetahuan kepada pengunjung, serta memperhatikan keberlanjutan destinasi dengan cara memperhatikan batas-batas dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan menjaga daya dukung lingkungan lokal, agar tetap sejalan dengan kapasitas ekosistem yang tetap alami.⁷⁴ Maka

⁷⁴ Dr Elena Cavagnaro, "Tourism and Water," *Journal of Tourism Futures* 3, no. 1 (2017): 81–82, <https://doi.org/10.1108/JTF-11-2016-0046> lihat juga;; Will Steffen et al., "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet," *Science* 347, no. 6223 (2015), <https://doi.org/10.1126/science.1259855> lihat juga;; Tek B. Dangi and Tazim Jamal, "An Integrated Approach to 'Sustainable Community-Based Tourism,'" *Sustainability (Switzerland)* 8, no. 5 (2016), <https://doi.org/10.3390/su8050475>.

berikut di bawah ini beberapa aspek penting dan komponen green economy dalam pengelolaan ekowisata:⁷⁵

a. Pertumbuhan

Perekonomian hijau di sektor pariwisata menekankan pertumbuhan ekonomi yang mementingkan keberlanjutan, mempertimbangkan dampak positif bagi masyarakat, dan peduli terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan usaha pariwisata yang dapat menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

b. Infrastruktur Ramah Lingkungan

Investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dari green economy. Hal ini mencakup penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan, pengelolaan air yang efisien, dan penerapan teknologi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan.

c. Penggunaan Energi Terbarukan

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dalam pengelolaan fasilitas pariwisata perlu dilakukan guna menekan emisi karbon serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Prinsip green economy di sektor pariwisata mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Pada praktiknya pengelolaan ini melibatkan langkah-langkah untuk meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem dan mendukung praktik pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, serta sumber alam lainnya secara keberlanjutan.

⁷⁵ Ryan Nugraha et al., *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*, Perama (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 122–24.

e. Sertifikasi dan Standar Berkelanjutan

Mendorong bisnis pariwisata untuk memperoleh sertifikasi dan mematuhi standar berkelanjutan, seperti sertifikasi rama lingkungan atau standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait. Hal ini nantinya akan membantu membangun kepercayaan wisatawan dan meningkatkan citra destinasi.

f. Pengetahuan dan Kesadaran Lingkungan

Green economy dalam sektor pariwisata harus mempromosikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran lingkungan di antara pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Pengusaha pariwisata, dan wisatawan. Ini dapat mencakup program edukasi, kampanye lingkungan, dan pelibatan komunitas dalam pelestarian lingkungan.

g. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Melibatkan masyarakat lokal dalam mengambil keputusan dan manajemen pariwisata. Green economy mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, partisipasi dalam bisnis pariwisata, dan peningkatan akses mereka terhadap pemanfaatan ekonomi.

h. Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan

Penciptaan produk dan layanan pariwisata yang berkelanjutan, seperti ekowisata, ekomodasi ramah lingkungan, dan pengalaman lokal yang mendukung praktik berkelanjutan.

i. Penyusunan Rancangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah dan pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mencakup strategi untuk memandu pertumbuhan sektor pariwisata dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

j. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Berkelanjutan

Menerapkan praktik pengukuran dan pelaporan kinerja berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi dampak positif dan negatif dari kegiatan pariwisata. Aspek ini sangat penting untuk mengetahui secara langsung dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan sejauh mana program pariwisata berkelanjutan tercapai sesuai tujuan atau tidak.

2. Pilar-pilar *Green Economy*

Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh UNEP, green economy atau ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan manusia serta terciptanya keadilan sosial, dengan tetap menekan secara signifikan berbagai risiko kerusakan lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. Penerapan konsep ekonomi hijau menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien, penurunan emisi karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan aspek inklusivitas sosial dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, green economy dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, green economy dibangun atas tiga pilar utama, yaitu:⁷⁶

a) Pilar ekonomi pada teori *green economy*

Pilar ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai keberlanjutan suatu pengelolaan. Pilar ini merepresentasikan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dan berperan sebagai penggerak keberlanjutan aktivitas para pemangku kepentingan dalam setiap program yang dilaksanakan.

⁷⁶ United Nations Environmental Programme, "Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste" (Washington DC, 2011), 58.

Manfaat ekonomi yang tercipta tidak hanya dinikmati oleh pemerintah, sektor swasta beserta pihak pendukung, maupun pengunjung, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal serta upaya konservasi lingkungan. Aspek perekonomian tersebut dapat ditinjau dari dua perspektif, yakni pada tingkat mikro dan makro:⁷⁷

1) Ekonomi Mikro

Konsep kewirausahaan mikro tidak hanya merujuk pada aktivitas usaha perorangan, tetapi juga melibatkan kewirausahaan sosial dan peran pemerintah yang saling berkaitan. Kewirausahaan individu dijalankan melalui upaya mengidentifikasi peluang pasar serta mengoordinasikan sumber daya guna menghasilkan produk dan jasa yang bernilai komersial. Adapun kewirausahaan sosial berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat yang kurang beruntung agar mampu mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui penetapan tarif pada setiap objek atau fasilitas, seperti homestay, warung makan, maupun sarana edukasi wisata.

Ekonomi mikro dalam ekowisata berfokus pada perilaku agen-agen ekonomi skala kecil, seperti individu, rumah tangga, UMKM wisata, dan koperasi lokal. Prinsip utama *green economy* di tingkat mikro meliputi:

- Efisiensi Sumber Daya Lokal

Pelaku usaha wisata diarahkan untuk menggunakan sumber daya lokal secara efisien dan bertanggung jawab, seperti penggunaan produk pertanian lokal untuk kebutuhan kuliner wisata atau bahan kerajinan dari alam tanpa merusak ekosistem.

- Pemberdayaan Ekonomi Komunitas

⁷⁷ Iwan Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 54.

Prinsip *inclusive growth* diterapkan dengan mengikutsertakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama (guide, pengrajin, penyedia homestay), sehingga terjadi pemerataan manfaat ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial.

- Inovasi dan Kewirausahaan Hijau

Pengembangan usaha berbasis inovasi ramah lingkungan (seperti energi surya untuk akomodasi, daur ulang limbah wisata) mendorong munculnya model bisnis hijau yang berkelanjutan.

- Transparansi Harga dan Nilai Tambah

Produk wisata ditawarkan dengan mempertimbangkan biaya ekologi (ecological cost), sehingga mendorong wisatawan untuk membayar lebih adil demi pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

2) Ekonomi Makro

Kajian ekonomi makro pada umumnya menitikberatkan analisis pada distribusi kegiatan ekonomi, tingkat pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta keterkaitan antarsektor. Pendapatan dapat diproyeksikan berdasarkan peningkatan jumlah konsumen yang terjadi secara berkelanjutan. Dalam konteks makro, penerapan konsep green economy pada sektor ekowisata mencakup aspek kebijakan publik, regulasi, serta perencanaan strategis yang melibatkan peran negara, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga berskala besar. Prinsip-prinsip yang mendasarinya meliputi:

- Pertumbuhan Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan

Pemerintah mengarahkan pembangunan pariwisata pada kawasan-kawasan dengan potensi ekologis tinggi, tetapi dengan kontrol ketat terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampungnya (carrying capacity).

- Investasi Berkelanjutan

Ekowisata didorong sebagai sektor investasi hijau (*green investment*), dengan insentif pajak atau kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan.

- Distribusi Pendapatan Nasional yang Merata

Dengan membangun ekowisata di daerah pedesaan dan tertinggal, *green economy* mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan arus urbanisasi.

- Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Mendukung Ekowisata

Misalnya, pengalokasian APBD/APBN untuk penguatan infrastruktur hijau (jalan akses, sanitasi berbasis biofilter, pelatihan SDM lokal), atau kebijakan bunga rendah untuk pinjaman usaha wisata berbasis konservasi.

b) Pilar Sosial pada Teori *Green Economy*

Aspek sosial bukan hanya mengidentifikasi *stakeholder*, tetapi juga mengorganisasikannya, sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masing-masing *stakeholder*.

1) *Stakeholder*

Pemangku kepentingan yang saling terhubung memiliki fungsi dan kontribusi yang berbeda dalam proses pembangunan. Pemerintah memegang peranan strategis dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan lintas sektor. Perencana dan peneliti berfungsi sebagai penyedia rekomendasi dan kajian ilmiah yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan. Wisatawan atau pengunjung menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Sementara itu, masyarakat lokal berperan ganda sebagai subjek sekaligus objek dalam pengembangan kewirausahaan, sekaligus menjadi sumber pengetahuan lokal yang bernilai bagi pengunjung. Interaksi antara masyarakat lokal

dan wisatawan juga berpotensi menciptakan pemahaman budaya yang lebih baik. Di sisi lain, media massa memiliki fungsi penting sebagai sarana penyebaran informasi yang mampu meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisata.

2) Organisasi / Lembaga

Proses pengorganisasian pemangku kepentingan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelibatan awal, penyusunan perencanaan, penguatan partisipasi dalam program-program publik, pelaksanaan kegiatan, hingga keterlibatan berkelanjutan setelah program selesai dilaksanakan.

3) Inovasi dan kepemimpinan

Daya saing suatu wilayah terbentuk dari kekuatan internal yang mampu menciptakan nilai tambah. Kekuatan tersebut tercermin melalui inovasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kapasitas kewirausahaan yang dimiliki. Selain itu, kepemimpinan lokal berperan penting dalam praktik tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam membangun visi bersama, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta mengimplementasikan kolaborasi dan kebersamaan secara efektif.

c) Pilar Lingkungan (ekologi) Pada Teori *Green Economy*

Pilar lingkungan (ekologi) menitikberatkan pada relasi antara aktivitas manusia dan konsekuensinya terhadap kondisi lingkungan. Pilar ini mencakup upaya pelestarian keanekaragaman hayati serta keberlanjutan ekosistem, pengelolaan dan investasi sumber daya alam untuk kepentingan jangka panjang, serta pelaksanaan program pemeliharaan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan agar memperhatikan daya resap air, pemanfaatan lingkungan dilakukan dengan tetap menjaga

kualitas udara, dan pengelolaan limbah diterapkan secara tepat dan bertanggung jawab.

B. *Green Economy* sebagai Kerangka Teoritis dalam Ekowisata

Beberapa literatur menyebutkan *green economy* juga disebut sebagai pertumbuhan hijau, karena keduanya memiliki kerangka kerja yang mengacu pada strategi jangka panjang dan berkembang secara global dengan tujuan untuk mentransformasikan ekonomi secara holistik sehingga dapat menjadi “rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial”.⁷⁸ Kemudian untuk memahami hubungan kerangka kerja dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus melihat perkembangan yang ada.

Clarke mengidentifikasi bahwa ada empat posisi yang menunjukkan bagaimana pariwisata berkelanjutan telah berevolusi dari waktu ke waktu:⁷⁹

1) *Polar Opposites*: pariwisata massal dan pariwisata berkelanjutan dipandang sebagai dua entitas yang terpisah dan distereotipkan sebagai baik dan buruk. 2) *Continuum*: dapat diakui bahwa pariwisata berkelanjutan dapat menjadi pariwisata massal dan sebaliknya pariwisata massal dapat menjadi berkelanjutan. 3) *Movement*: hal ini berfokus pada pengoprasionalan berkelanjutan bagi pariwisata massal, dan 4) *Convergence*: menetapkan bahwa pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan bagi semua jenis pariwisata. Walton juga mengemukakan bahwa pariwisata telah berkembang pesat sejak

⁷⁸ United Nations Environmental Programme, “Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste,” 16.

⁷⁹ Jackie Clarke, “A Framework of Approaches to Sustainable Tourism,” *Journal of Sustainable Tourism* 5, no. 3 (1997): 224–33, <https://doi.org/10.1080/09669589708667287>.

tahun 1980-an yang dapat memberikan manfaat dan menjadi kontributor atas keberlangsungan pariwisata.⁸⁰

Lebih lanjut Clarke juga mengungkapkan bahwa pariwisata berkelanjutan telah berkembang dan memberikan dua posisi usulan sebagai tambahan: *Pertama*, menjadikan dampak perubahan iklim sebagai fokus dalam pariwisata berkelanjutan. Pada literatur yang berkembang pesat tentang pariwisata dan perubahan iklim menjadi perhatian utama⁸¹ dan UNWTO mengacu pada “*Quadruple Bottom Line*” untuk pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan “lingkungan, sosial, ekonomi, dan responsif terhadap iklim”.⁸² *Kedua*, munculnya konsep *green economy*. Dalam beberapa tahun terakhir banyak penelitian yang menyarankan pendekatan integratif dan holistik untuk mengubah ekonom pariwisata, seperti De Lacy menyoroti pentingnya pendekatan terpadu untuk pariwisata berkelanjutan dan kemitraan dengan pandangan holistik antara sektor publik dan swasta.⁸³

Perkembangan ini juga telah dilakukan dengan memasukkan sisi permintaan dan penawaran ke dalam adaptasi atas perubahan iklim⁸⁴ dan model strategi destinasi holistik⁸⁵ dengan mempelajari peran pemerintah dan

⁸⁰ John K. Walton, “Prospects in Tourism History: Evolution, State of Play and Future Developments,” *Tourism Management* 30, no. 6 (2009): 783–93, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.05.010>.

⁸¹ Susanne Becken and John Hay, *Climate Change and Tourism From Policy to Practice* (New York: Routledge, 2012).

⁸² World Tourism Organization, “Tourism Towards 2030: Global Overview” (Madrid, 2011), 2.

⁸³ Terry De Lacy et al., *Public/Private Partnerships for Sustainable Tourism: Delivering a Sustainability Strategy for Tourism Destinations* (Singapore: Asia Pacific Economic Cooperation (Organization) Secretariat, 2002).

⁸⁴ Ryan Jopp, Terry Delacy, and Judith Mair, “Developing a Framework for Regional Destination Adaptation to Climate Change,” *Current Issues in Tourism* 13, no. 6 (2010): 591–605, <https://doi.org/10.1080/13683501003653379>.

⁸⁵ T De Lacy and G Lipman, *Moving to Carbon Clean Destinations*. In: Schott, C. (Ed.), *Tourism and the Implications of Climate Change: Issues and Actions* (Bingley: Emerald Group Publishing, 2010).

tindakan kolektif⁸⁶ serta melalui kerangka kerja investasi secara holistik untuk pariwisata berkelanjutan.⁸⁷ Kemudian merujuk kembali pada kerangka kerja pendekatan pariwisata berkelanjutan dari Clarke terdapat dua posisi tambahan dalam evolusi berkelanjutan, yaitu: fokus pada iklim dan pandangan secara holistik.⁸⁸

Penguraian di atas mengenai konsep *green economy* dengan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa terdapat benang merah antara keduanya dengan melihat fondasi *green economy* menurut UNEP yaitu: rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial. Selanjutnya pada tahap ini melihat kerangka teori dan implikasinya terhadap pariwisata, lebih lanjut dijelaskan bahwa fokusnya adalah pada ekonomi itu sendiri:

“Konsep *green economy* tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan: namun terdapat pengakuan bahwa semakin meningkat pencapaian berkelanjutan hampir sepenuhnya bergantung pada ekonomi yang benar. Puluhan tahun menciptakan kekayaan baru melalui model ekonomi yang berdasarkan pada bahan bakar fosil dan secara substansial belum bisa mengatasi marginalisasi sosial, degradasi lingkungan, dan penipisan sumber daya”.⁸⁹

Mengenai hal tersebut terdapat banyak definisi yang telah diusulkan dan ada beberapa konsistensi umum. Seperti UN-DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) menganalisis lebih dari 80 publikasi dan strategi nasional mengenai *green economy*, pertumbuhan hijau

⁸⁶ Bill Bramwell, “Governance, the State and Sustainable Tourism: A Political Economy Approach,” *Journal of Sustainable Tourism* 19, no. 4–5 (2011): 459–77, <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>.

⁸⁷ United Nations Environmental Programme, “Monitoring the Transition Toward a Green Economy In-Stream Conference.”

⁸⁸ Clarke, “A Framework of Approaches to Sustainable Tourism.”

⁸⁹ United Nations Environmental Programme, “Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste,” 17.

dan pembangunan rendah karbon. Disimpulkan bahwa konsep dan pertumbuhan *green economy* saling berkesinambungan secara sudut pandang holistiknya terhadap: pertumbuhan dan pembangunan ekonomi: perlindungan lingkungan: pembangunan rendah karbon: ketahanan dan efisiensi sumber daya: berkelanjutan ekologi: kesejahteraan manusia: inklusivitas: dan kesetaraan.⁹⁰

UNEP menyarankan dalam konteks ini bagi pemerintah untuk inisiatif fokus para produk hijau dengan menghapus subsidi yang berbahaya, melakukan reformasi kebijakan dan insentif, memperkuat infrastruktur pasar, mengarahkan investasi publik, dan penghijauan pengadaan publik, kemudian sementara sektor-sektor swasta akan merespons kebijakan dan insentif melalui peningkatan pembiayaan investasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi hijau.⁹¹ Bagi peran pariwisata dikonseptualisasikan oleh UNEP melalui kerangka kerja sebagai tantangan sekaligus peluang yang spesifik, termasuk: energi dan emisi gas rumah kaca, konsumsi air, pengelolaan limbah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pengelolaan warisan budaya, sementara untuk peluang diidentifikasi sebagai ukuran dan pertumbuhan sektor pariwisata, perubahan pola konsumen, serta potensi pembangunan lokal dan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu bahwa dampak pariwisata dapat bervariasi secara signifikan sesuai masing-masing tujuan dan setiap tujuan harus mengembangkan pendekatannya sendiri berdasarkan karakteristik dan situasi masing-masing destinasi.

⁹⁰ United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), "Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development—History, Definitions, and a Guide to Recent Publications.," *Division for Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, August., 2012*, <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=634&menu=1516>.

⁹¹ United Nations Environmental Program, "Monitoring the Transition Toward a Green Economy In-Stream Conference."

Meskipun jika melihat banyaknya pendekatan yang digunakan, para ahli menyerukan bahwa dalam segala perubahan paradigma ekonomi tradisional maupun konsep *green economy* disarankan menggunakan pendekatan holistik. Karena pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu pertumbuhan. Meskipun dibangun atas pemahaman yang sama dan dengan melihat pertumbuhan saat ini, konsep ekonomi tradisional tidak berkelanjutan dan sangat tidak efisien.⁹² Dengan menggunakan konsep *green economy* maka dapat membentuk kembali pertumbuhan ekonomi dan menjauhkannya dari dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

Untuk pengembangan model transformasi berkelanjutan dalam pariwisata, UNEP menyatakan bahwa strategi *green economy* akan menghasilkan pertumbuhan yang signifikan.⁹³ Meski banyak yang menganggap bahwa *green economy* menawarkan keuntungan dari momentum global yang memberikan kredibilitas di luar bidang pariwisata dan menyederhanakan proses keterlibatan pemangku kepentingan. Klaim ini telah menjadi perdebatan di kalangan peneliti seperti Victor dan Jackson,⁹⁴ kemudian diperkuat oleh Bassi dan Eaton:⁹⁵ kedua penelitian tersebut mengkritik terhadap ketidakjelasan yang berulang dan penyalahgunaan terminologi dalam pengembangan kebijakan, seperti juga yang dilakukan oleh Schmalensee.⁹⁶ Maka dari itu konsep *green economy* dalam pariwisata dianjurkan menggunakan pendekatan holistik, dengan begitu dapat

⁹² D and J, *Integrating the Green Economy, Circular Economy and Bioeconomy in a Strategic Sustainability Framework*.

⁹³ United Nations Environmental Programme, "Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste."

⁹⁴ Peter Victor and Tim Jackson, "Doing the Maths on the Green Economy," *Nature* 472, no. April (2011): 295, <https://doi.org/10.1038/472295a>.

⁹⁵ Andrea Bassi and Derek Eaton, "In Defence of Green Economy Report," *Nature* 475, no. July (2011): 7–8.

⁹⁶ Richard Schmalensee, "From 'Green Growth' to Sound Policies: An Overview," *Energy Economics* 34, no. SUPPL.1 (2012): S2–6, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.041>.

melibatkan secara menyeluruh yang ada pada pariwisata termasuk pemangku kebijakan.

Kemudian peraturan menteri dalam No 33 Tahun 2009 mendefinisikan ekowisata sebagai kegiatan wisata alam daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan mendukung usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta memperhatikan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Kemudian Damanik dan Weber mendefinisikan ekowisata dari tiga sudut pandang yang menurut mereka ekowisata dipandang sebagai:⁹⁷ *Pertama*, merupakan atraksi yang berbasis pada sumber daya alam. *Kedua*, sebagai pasar yang dapat memberikan pengalaman terarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan. *Ketiga*, pendekatan pada pengembangan yang menjadi metode dalam pemanfaatan sumber daya pariwisata dan bertanggung jawab atas kesejahteraan.

Mencermati secara mendalam *trend* ekowisata yang bergerak naik dan merupakan hal positif. Namun dibalik hal tersebut diiringi dengan berbagai ancaman apabila sistem pendekatan dan pengembangannya tidak selaras, maka efek lainnya adalah negatif seperti pembukaan lahan yang tak terkendali, manajemen pengelolaan sampah yang dapat merusak lingkungan, dan keseimbangan kesejahteraan masyarakat sekitar. Maka untuk menjamin *sustainable* pada ekowisata harus diimbangi dengan konservasi maupun reboisasi terhadap lingkungan sehingga *capacity building* yang dilakukan dapat menyeimbangkan seluruh aspek yang terlibat didalamnya.

Selanjutnya untuk menilai sejauh mana konsep *green economy* diimplementasikan dalam pengelolaan ekowisata, maka perlu adanya pemetaan terhadap dimensi-dimensi utama yang dapat membentuk prinsip-

⁹⁷ Janianton Danamik and HF Weber, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi* (Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM, 2006), 38.

prinsip *green economy*. Merujuk pada UNEP⁹⁸, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),⁹⁹ dan beberapa literatur yang mengkaji tentang pariwisata berkelanjutan,¹⁰⁰ konsep *green economy* dalam konteks pariwisata dapat dibagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu: lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan:¹⁰¹

1. Dimensi Lingkungan

Dimensi ini menekankan pentingnya pelestarian ekosistem sebagai fondasi dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, selain itu juga menjadi prioritas utama karena dalam konteks ekowisata bergantung pada kualitas dan keberlanjutan sumber daya alamnya. Kemudian praktik-praktik seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan lindung, serta penggunaan infrastruktur yang minim jejak ekologis merupakan pelengkap dari dimensi lingkungan. Selanjutnya, prinsip lainnya adalah efisiensi sumber daya yang mencakup pengurangan penggunaan energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengelolaan air dan limbah secara berkelanjutan. Ekowisata yang menerapkan pendekatan *green economy* mendorong pemakaian teknologi hijau, seperti panel surya untuk penginapan atau sistem irigasi hemat air untuk pertanian wisata. Hal semacam ini tidak hanya dapat menurunkan dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran ekologis di kalangan pengelola dan wisatawan.

⁹⁸ Peter A. Victor and Tim Jackson, "A Commentary on UNEP's Green Economy Scenarios," *Ecological Economics* 77, no. 2 (2012): 11–15, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.028>.

⁹⁹ Kementerian PPN/Bappenas, "Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia," *Bappenas*, 2020.

¹⁰⁰ Victor and Jackson, "A Commentary on UNEP's Green Economy Scenarios"; Richard Schmalensee, "From 'Green Growth' to Sound Policies: An Overview," *Energy Economics* 34, no. SUPPL.1 (2012): S2–6, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.041>.

¹⁰¹ Harold Richins, "Environmental, Cultural, Economic and Socio-Community Sustainability: A Framework for Sustainable Tourism in Resort Destinations," *Environment, Development and Sustainability* 11, no. 4 (2009): 785–800, <https://doi.org/10.1007/s10668-008-9143-6>.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi lingkungan harus menekankan pada upaya pelestarian sumber daya alam dan fokus pada dampak ekologis akibat aktivitas wisata. Ekowisata yang menerapkan prinsip *green economy* harus mengedepankan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah berbasis pada 3R (*reduce, reuse, recycle*), penggunaan energi terbarukan, serta pengurangan emisi karbon. Selain menjadi wujud kepedulian atas lingkungan, rangkaian tersebut juga menjadi daya tarik ekowisata yang sehingganya menjadi tanggung jawab bersama.¹⁰²

Dimensi *green economy* dalam ekowisata juga mencakup edukasi sebagai instrumen perubahan perilaku. Pengalaman wisata tentang alam memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memahami pentingnya konservasi dan membentuk kepedulian terhadap isu-isu ekologis global. Oleh karena itu, keberhasilan dimensi ini tidak hanya diukur dari indikator fisik (pengurangan limbah) tetapi juga dari aspek transformasi nilai dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga alam secara berkelanjutan. jadi, keberhasilan dimensi ini jika terlaksananya beberapa indikator dibawah ini:¹⁰³

a. Pengelolaan Limbah Dan Sampah

Pengelolaan limbah yang efektif merupakan aspek yang sangat krusial dalam ekowisata, praktik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas wisatawan dan operasional destinasi. Jadi, implementasi sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah di sumber dan fasilitas daur ulang, sangat lah penting sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan ekowisata.

¹⁰² UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Education*, 102.

¹⁰³ Rafil Buckley, *Ecotourism: Principles and Practices* (Boston: Cabi Tourism Texts, 2009), 51.

b. Penggunaan Energi Terbarukan

Penggunaan terbarukan ini termasuk seperti tenaga surya atau biomassa yang dapat menjadi fasilitas ekowisata dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Perlakuan ini merupakan salah satu bentuk investasi teknologi energi bersih yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, namun tetapi juga dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang peduli dengan lingkungan.

c. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Bagian ini merupakan upaya konservasi flora dan fauna lokal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ekowisata yang berkelanjutan harus memastikan bahwa aktivitas wisata yang tidak mengganggu habitat alami serta mendukung program konservasi, seperti penanaman pohon atau perlindungan spesies endemik.

2. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam kerangka *green economy* mencakup pada penciptaan nilai-nilai ekonomi yang aktivitasnya tidak merusak lingkungan dan bersifat inklusif. Kemudian dalam konteks ekowisata, hal tersebut diimplementasikan melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat tanpa adanya eksploitasi yang berlebihan.¹⁰⁴ Kemudian dimensi ekonomi juga dapat mendorong diversifikasi penghidupan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang tidak ramah lingkungan seperti pembalakan liar atau perburuan satwa.

¹⁰⁴ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2025* (Jakarta: Bappenas, 2021), 19.

Dengan adanya kerangka tersebut, maka ekowisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan alternatif dari kegiatan yang berkelanjutan, seperti transformatif yang mengintegrasikan ekonomi lokal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global.¹⁰⁵ Indikator penting dari keberhasilan dimensi ini adalah terciptanya lapangan kerja yang ramah lingkungan (*green jobs*) seperti berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, diantaranya pemandu wisata alam, pengrajin berbasis bahan lokal, atau pengelola homestay ramah lingkungan. Selain itu, ekowisata juga menjadi sarana untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan menyediakan pasar untuk produk-produk lokal seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan jasa wisata berbasis komunitas.¹⁰⁶ Berikut dibawah ini penjabaran mengenai klasifikasi indikator dimensi *green economy* dalam ekowisata:

a. Pendapatan Masyarakat dari Ekowisata

Ekowisata yang berkelanjutan harus memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal, hal tersebut dapat diukur melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh dari jasa pemandu wisata, homestay, penjualan kerajinan tangan, dan produk lokal lainnya.

b. Kesempatan Kerja Masyarakat Lokal yang Layak

Penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat lokal merupakan hal yang penting dalam dimensi ekonomi. Pekerjaan yang ditawarkan harus memberi upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan peluang untuk pengembangan keterampilan.

c. Dukungan untuk UMKM Lokal

¹⁰⁵ UNEP & UNWTO, *Tourism in the Green Economy-Background Report* (MAD: United Nations Environment Programme, 2012), 58.

¹⁰⁶ Martha Honey, *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* (Washington DC: Island Press, 2008), 36.

Selain menjadi wadah guna pemberdayaan masyarakat lokal, ekowisata juga dapat menjadi tempat untuk mempromosikan dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Selanjutnya, tidak hanya menjadi ruang para UMKM untuk menjual produk mereka, maka ekowisata juga harus mampu menyediakan pelatihan dan menjadi akses ke pasar yang lebih luas.

3. Dimensi Sosial

Dimensi sosial dari green economy menekankan pada aspek inklusivitas, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam ekowisata, masyarakat lokal bukan hanya objek pembangunan, melainkan aktor utama yang harus dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa kegiatan wisata sejalan dengan nilai-nilai lokal, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian destinasi.¹⁰⁷

Selain itu, ekowisata memiliki potensi besar sebagai media pendidikan dan penyadaran sosial. Melalui interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, terjadi pertukaran nilai dan pengetahuan yang dapat memperkuat identitas budaya dan memperluas pemahaman tentang keberagaman. Edukasi lingkungan kepada pengunjung dan warga juga menjadi sarana penting untuk membentuk perilaku berkelanjutan dan menghargai warisan alam serta budaya lokal.¹⁰⁸

Inklusivitas menjadi indikator kunci dalam dimensi sosial, di mana kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat perlu dilibatkan dan diberikan akses yang adil terhadap manfaat ekowisata. Praktik

¹⁰⁷ Stephen Wearing and Jhon Neil, *Ecotourism: Impacts, Potentials, and Possibilities?*, Second Edi (Amsterdam ; Boston ; London : Butterworth-Heinemann: Oxford University Press, 2009), 36.

¹⁰⁸ Moren Tibabo Stone and Gyan P. Nyaupane, "Protected Areas, Wildlife-Based Community Tourism and Community Livelihoods Dynamics: Spiraling up and down of Community Capitals," *Journal of Sustainable Tourism* 26, no. 2 (2018): 307–24, <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1349774>.

green economy menolak eksploitasi dan ketimpangan, dan sebaliknya, mendorong redistribusi manfaat yang adil dan penguatan kapasitas sosial. Oleh karena itu, dimensi ini memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya wisata.¹⁰⁹

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata merupakan bentuk transparansi serta memastikan bahwa kegiatan wisata dapat selaras dengan nilai dan kebutuhan komunitas. Keterlibatan masyarakat dapat berupa keikutsertaan dalam perencanaan seperti rapat desa, pembentukan dan ikut serta dalam komite pengelolaan wisata, dan atau ikut serta dalam forum diskusi.

b. Pendidikan atau Edukasi Terhadap Kesadaran Lingkungan

Mengadakan program pendidikan atau edukasi mengenai lingkungan merupakan bentuk kesadaran atas betapa pentingnya pelestarian lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan. Program-program yang dilakukan dapat berupa workshop, pelatihan, atau menyediakan media informasi yang disediakan di destinasi wisata.

c. Pelestarian Budaya Lokal

Budaya lokal merupakan tanda bahwa suatu wilayah memiliki identitas. Selain menjadi ciri khas, budaya lokal juga dapat memperkaya pengalaman wisatawan. Budaya lokal pada suatu daerah meliputi tradisi, bahasa, seni, dan upacara adat. Maka dari itu, ekowisata harus mendukung pelestarian budaya lokal dan menjadi media promosi guna memperkenalkan budaya lokal ke masyarakat luas.

4. Dimensi Kelembagaan

¹⁰⁹ Regina Scheyvens and Regina Scheyvens, "Ecotourism and the Empowerment of Local Communities Ecotourism and the Empowerment of Local Communities," *Tourism Management* 20, no. APRIL 1999 (2015): 247.

Dimensi kelembagaan menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, kerangka regulasi yang mendukung serta kerja sama antar pihak dalam mendukung pengembangan ekowisata berbasis green economy. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan akademisi harus terlibat dalam kolaborasi yang sinergis. Perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mendukung praktik ramah lingkungan menjadi dasar penguatan kelembagaan.¹¹⁰

Keberhasilan dimensi ini juga ditentukan oleh adanya regulasi yang konsisten, seperti perda pariwisata berkelanjutan, insentif bagi pelaku wisata hijau, serta sistem sertifikasi dan standar ramah lingkungan untuk akomodasi dan operator wisata. Di samping itu, kelembagaan yang adaptif perlu memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang transparan untuk mengukur keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis dari aktivitas ekowisata.¹¹¹

Pembangunan kelembagaan juga mencakup penguatan kapasitas aktor lokal melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penyediaan akses informasi dan teknologi. Dalam kerangka *green economy*, institusi lokal harus mampu memfasilitasi transformasi menuju sistem pariwisata yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dimensi kelembagaan menjadi jembatan antara visi jangka panjang pembangunan hijau dan praktik lapangan yang konkret.¹¹²

a. Kebijakan atau Regulasi Lokal yang Mendukung *Green Economy*

Adanya kebijakan atau peraturan yang mendukung prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan ekowisata menunjukkan komitmen pemerintah

¹¹⁰ Hall Colin Michael, *Tourism Planning: Policies, Processes, and Relationships* (Britania: Pearson, 2007), 257.

¹¹¹ Bill Bramwell, "Governance, the State and Sustainable Tourism: A Political Economy Approach," *Journal of Sustainable Tourism* 19, no. 4–5 (2011): 459–77, <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>.

¹¹² Paul F J Eagles and Stephen F Mccool, *Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management* (Glan: IUCN Publications, 2002), 35.

lokal terhadap keberlanjutan. Ini dapat berupa peraturan desa, peraturan daerah, atau kebijakan insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan.

b. Kolaborasi Antar Pihak

Kerjasama antara pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan terakomodasi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ekowisata.

c. Keberadaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan pengelola ekowisata untuk menilai kinerja dan dampak kegiatan wisata secara berkala. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

C. Konsep Green Economy dalam Perspektif Islam

Penerapan konsep *green economy* harus diimplementasikan dalam memperkuat sistem pemberdayaan masyarakat desa melalui ekowisata. Karena pariwisata telah menjadi industri global yang perkembangannya terbilang pesat dan akan membantu perkembangan negara-negara yang sedang berkembang secara signifikan.¹¹³ Hal ini menunjukkan bahwa *experience* wisata berbasis pedesaan sehingga dapat membangun keterhubungan dengan alam dan kesadaran untuk menjaga lingkungan.¹¹⁴

Fauzia dalam risetnya menyimpulkan bahwa *green economy* merupakan konsep yang harus diimplementasikan demi menjaga lingkungan. Karena menurutnya, dalam al-Qur'an dan Hadist banyak menyebutkan perintah dan

¹¹³ Haseenav, "The Greener Economy – An Emerging Concept From Kerala Tourism."

¹¹⁴ Jierong Chen et al., "How Does Rural Tourism Experience Affect Green Consumption in Terms of Memorable Rural-Based Tourism Experiences, Connectedness to Nature and Environmental Awareness?" *Journal of Hospitality and Tourism Management* 54, no. December 2022 (2022): 166–77, <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.12.006>.

urgensi untuk menjaga lingkungan.¹¹⁵ Ini menunjukkan bahwa konsep *green economy* selaras dengan prinsip-prinsip islam.¹¹⁶ Sehingga terdapat tata aturan fundamental demi menyokong pembangunan yang berkelanjutan.¹¹⁷ Jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis islam, maka implementasi konsep *green economy* juga selaras dengan islam dan mampu memberikan corak aktivitas bisnis yang dapat menyeimbangkan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.¹¹⁸ Lestari Soehardi juga menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh ekonomi syariah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan.¹¹⁹

Terkait konsep *green economy* yang dirancang untuk pembangunan, secara ekonomi islam Wiharja *et.al* dalam risetnya menyimpulkan bahwa konsep ekonomi islam dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting untuk diterapkan¹²⁰ dalam beberapa masalah seperti mensejahterakan masyarakat miskin.¹²¹ Mengenai hal permasalahan tersebut, hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah kebijakan pendistribusian harus

¹¹⁵ Yunia Fauzia, “Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Syariah.”

¹¹⁶ Iskandar and Aqbar, “Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.”

¹¹⁷ Agung Utama et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy.”

¹¹⁸ Azizah and Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics.”

¹¹⁹ Lestari Soehardi, “Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy.”

¹²⁰ Jana Wiharja, Rizqi Ramdani, and Ridla Mutiah, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Sumberdaya Insani Terhadap Ekonomi Bangsa,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 2, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62> penelitian serupa juga dilakukan oleh: Rizky Estu Handayani and Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional,” *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 2, no. 2 (2021): 58–73; Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.

¹²¹ Marabona Munthe, “Pembangunan Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah,” *Jurnal Madania* 3, no. 1 (2013): 92–111.

terlaksana dan terpenuhi secara optimal.¹²² Maka dari itu membangun ekonomi yang kuat¹²³ dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.¹²⁴

Merujuk pada pemaparan di atas juga menunjukkan keselarasan antara konsep *green economy* dengan ekonomi islam yang dapat menjadi suatu solusi konsep dalam membangun perekonomian yang memperhatikan sosial dan lingkungan. Namun begitu terdapat perbedaan antara konsep *green economy* dan ekonomi islam diantaranya adalah aspek *ilahiyyah* yang dapat menjadi penyeimbang dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan ibadah,¹²⁵ pemeliharaan agama,¹²⁶ dan juga *fiqh al-bi'ah* dalam mengelola sumber daya islam dalam aktivitas ekonomi.¹²⁷

Soemarwoto berpendapat Islam telah lama menanamkan nilai-nilai keberlanjutan sebagai bagian integral dari ajaran dasarnya. Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi, yang diberi mandat untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Nilai tauhid—yang menekankan kesatuan antara manusia dengan Sang Pencipta—serta prinsip maslahah (kebaikan umum), mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus mendukung keharmonisan dengan alam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-A'raf (7:31): "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang*

¹²² Nacerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 491–508.

¹²³ Fei Zou et al., "Natural Resources and Green Economic Recovery in Responsible Investments: Role of ESG in Context of Islamic Sustainable Investments," *Resources Policy* 86, no. June (2023): 104195, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104195>.

¹²⁴ Bambang Suhada and Dharma Setyawan, "Narasi Islam Dan Green Economics Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *Kontekstualita* 31, no. 1 (2016): 21–36.

¹²⁵ Azizah and Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics."

¹²⁶ Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah."

¹²⁷ Agung Utama et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy."

berlebihan.” Ayat ini menjadi landasan penting dalam mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan, demi menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan kehidupan.

Menurut Choudhury dalam buku terbitan Bank Indonesia, konsep *sustainability* dalam metodologi ekonomi pembangunan Islam dipahami sebagai suatu proses integratif yang menyelaraskan dimensi ekonomi, sosial, dan etika manusia secara berkelanjutan.¹²⁸ Dalam konteks ini, kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan sebagai akibat dari krisis moral dan religiusitas manusia, yang dipicu oleh pola konsumsi dan produksi yang eksploitatif pada era industrialisasi modern. Oleh karena itu, implementasi ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan etis agar manusia terhindar dari sifat rakus yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan bersama.

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2011), pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pilar pertama, yaitu pilar sosial, menekankan pentingnya relasi harmonis antara manusia dan alam. Hal ini diwujudkan melalui upaya peningkatan kesejahteraan, akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, perlindungan hak asasi manusia, serta terciptanya rasa aman. Dengan demikian, manusia diposisikan sebagai penjaga dan pelindung lingkungan. Pilar kedua adalah pertumbuhan ekonomi, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkeadilan. Sedangkan pilar ketiga, yaitu lingkungan, menyoroti pentingnya konservasi fisik, biologis, dan ekosistem yang sering kali terabaikan karena aspek lingkungan belum menjadi indikator utama dalam pengambilan keputusan ekonomi.

¹²⁸ Mahri et al., *Pembangunan Ekonomi Islam*, 143.

Ketiga pilar tersebut menegaskan perlunya sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan lingkungan demi tercapainya pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Pembangunan yang ideal seharusnya memanusiakan manusia, menjadikan manusia sebagai *human being* yang berperilaku adil terhadap sesama dan terhadap alam. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini dapat dirumuskan ke dalam empat komponen utama yaitu:¹²⁹

1. Tauhid (Kesadaran Ketuhanan dan Kepemilikan Mutlak Allah)

Tauhid merupakan fondasi dari seluruh ajaran Islam, yang menyatakan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki otoritas tertinggi atas alam semesta. Dalam konteks lingkungan, tauhid menanamkan keyakinan bahwa bumi, langit, air, tumbuhan, hewan, dan segala sumber daya bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah yang hanya dititipkan kepada manusia untuk dikelola sebaik-baiknya (QS. Al-Baqarah: 284). Dari sudut pandang green economy, prinsip ini menghasilkan paradigma baru dalam memandang alam—bukan sebagai objek konsumsi semata, melainkan sebagai entitas yang sakral dan harus dihormati. Ketika manusia menyadari bahwa mereka bukan pemilik tetapi pengelola, maka akan tumbuh rasa tanggung jawab spiritual untuk tidak melakukan kerusakan (*fasad*) atau pemborosan (*israf*), sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-A'raf: 31: "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*"

Dalam konteks energi, prinsip tauhid menjadi dasar untuk menghindari konsumsi sumber daya yang berlebihan, terutama energi fosil yang tidak terbarukan. Tauhid mendorong pola hidup sederhana (*zuhud*) dan meminimalkan *carbon footprint* sebagai bagian dari ibadah.

¹²⁹ Sadali, "Harnessing Islamic Teachings for Climate Justice: Pathways for Faith-Based Environmental Action," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 143–57, <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.597>.

2. Mizan (Keseimbangan Ekologis, Spiritual, dan Sosial)

Mizan dalam Al-Qur'an diartikan sebagai keseimbangan dalam penciptaan (QS. Ar-Rahman: 7–9). Allah menciptakan segala sesuatu secara seimbang: siang dan malam, darat dan laut, kehidupan dan kematian. Prinsip ini menuntut manusia untuk tidak merusak sistem keseimbangan tersebut melalui tindakan yang berlebihan, rakus, atau serampangan. Dalam ekowisata, mizan diimplementasikan melalui pengelolaan ruang yang memperhatikan *carrying capacity*, pembangunan yang selaras dengan kontur dan vegetasi alami, serta pembatasan aktivitas pariwisata agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini juga mencakup aspek spiritual, di mana manusia menjaga ketenteraman batin (sakinah), tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keseimbangan hati, jiwa, dan lingkungan. Prinsip *hablum minallah* (hubungan vertikal dengan Allah), *hablum minannas* (hubungan horizontal dengan manusia), dan *hablum minal alam* (hubungan dengan alam) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya membentuk sistem etika lingkungan Islam yang menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan ekosistemnya.

3. Khalifah (Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Pengelolaan)

Khilafah berarti wakil atau pemimpin. Dalam QS. Al-Baqarah: 30, Allah menyatakan bahwa manusia dijadikan khalifah di bumi. Peran ini bukan semata hak untuk mengatur, melainkan tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan keadilan, tanggung jawab, dan welas asih. Sebagai khalifah, manusia harus bersikap proaktif dalam melindungi sumber daya, memastikan keberlanjutan, dan mewariskan bumi dalam kondisi baik kepada generasi selanjutnya. *Khilafah* juga mengandung prinsip *stewardship* (pengelolaan penuh tanggung jawab), di mana manusia perlu menggunakan pengetahuan, teknologi, dan kebijakannya

untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis bumi. Dalam ekonomi Islam, ini mencerminkan prinsip kepemimpinan yang transformatif, kolektif, dan berorientasi maslahat.

4. Amanah (Tanggung Jawab Etis sosial dan Moral terhadap Alam)

Amanah adalah nilai inti yang mengajarkan bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah harus dipertanggungjawabkan, termasuk nikmat berupa bumi, air, udara, dan keanekaragaman hayati. QS. Al-Ahzab: 72 menyebutkan bahwa manusia memikul amanah yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung karena beratnya tanggung jawab tersebut. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, amanah meliputi dimensi tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Manusia dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan, yang mencakup transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan integritas. Amanah bukan hanya tentang tidak merusak, tetapi juga aktif memperbaiki dan merestorasi.

Kemudian pada dasarnya seluruh agama telah mengajarkan kita untuk saling menjaga hubungan tersebut dengan baik. Karena hubungan antaranya keduanya bersifat komprehensif, dari segi bagaimana manusia berperilaku terhadap alam dan lingkungan, bahkan secara tegas hubungan manusia dan alam harus terjalin secara harmonis demi terjalinnya kehidupan yang berkesinambungan. Dari sudut pandang Islam, alam merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, artinya Allah menciptakan alam dengan sangat kompleks dan luas.¹³⁰

Pada konteks hubungan manusia dan alam saat ini, ekologis tidak lagi harmonis dan sehubungan dengan krisis lingkungan yang terjadi, Allah telah memperingatkan manusia tentang kerusakan dan efek yang akan timbul. Salah satunya adalah pada Surah al-Baqarah ayat 22:

¹³⁰ Muhaimin, *Membangun Kecerdasan Ekologis (Model Pendidikan Untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis)* (Bandung: alfabeta, 2015), 20.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu sebagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 22)

Merujuk pada ayat tersebut, Allah mempersilahkan manusia untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama dan tidak mengakibatkan kerusakan alam yang dapat merugikan segalanya. Melihat dengan sudut pandang luas, kemaslahatan alam meliputi sisi alam, sosial, ekonomi, identitas atau budaya, dan teologi. Maka dari itu urgensi alam tidak hanya dipahami dengan perspektif antroposentris atau hanya kepentingan manusia semata, melainkan relasi alam, manusia, dan tuhan juga harus dijaga dengan baik.¹³¹ Maka dari itu, Islam berpandangan bahwa alam tidak diposisikan sebagai benda mati atau ekonomi (*capital*) yang dapat diperjual belikan, jika alam dirusak secara fisik maupun sosial dan ekologiannya maka kerusakan akan menjadi kehancuran (konflik, kesenjangan, kemiskinan, dan hilangnya ragam hayati).¹³²

Kemudian terkait kerusakan alam (ekologi) pada saat masa saat ini, konsep *green economy* yang dirancang untuk pembangunan. Secara ekonomi islam Wiharja *et.al* berpendapat bahwa konsep ekonomi islam dalam

¹³¹ Brahma Adhi and Hasan Basri Nata Manggala, *Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya* (Bandung: Bandar Maju, 2002), 57.

¹³² Karl Polanyi, *Transformasi Besar Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 222.

pembangunan ekonomi nasional sangat penting untuk diterapkan¹³³ dalam beberapa masalah seperti mensejahterakan masyarakat miskin.¹³⁴ Mengenai hal permasalahan tersebut, hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah kebijakan pendistribusian harus terlaksana dan terpenuhi secara optimal.¹³⁵ Maka dari itu membangun ekonomi yang kuat¹³⁶ dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.¹³⁷

¹³³ Jana Wiharja, Rizqi Ramdani, and Ridla Mutiah, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Sumberdaya Insani Terhadap Ekonomi Bangsa," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 2, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62> penelitian serupa juga dilakukan oleh: Rizky Estu Handayani and Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional," *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 2, no. 2 (2021): 58–73; Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.

¹³⁴ Marabona Munthe, "Pembangunan Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah," *Jurnal Madania* 3, no. 1 (2013): 92–111.

¹³⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 491–508.

¹³⁶ Fei Zou et al., "Natural Resources and Green Economic Recovery in Responsible Investments: Role of ESG in Context of Islamic Sustainable Investments," *Resources Policy* 86, no. June (2023): 104195, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104195>.

¹³⁷ Bambang Suhada and Dharma Setyawan, "Narasi Islam Dan Green Economics Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *Kontekstualita* 31, no. 1 (2016): 21–36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif tidak bertumpu pada prosedur statistik, melainkan menekankan pada analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹³⁸ pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berperan dalam melakukan analisis data dan menguraikannya secara deskriptif sesuai dengan hasil wawancara, pengamatan, dan perilaku objek yang diteliti.¹³⁹

Melalui penerapan metode penelitian kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman serta penafsiran yang komprehensif terhadap makna berbagai fakta yang berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam proses analisis kebijakan yang relevan dengan penerapan konsep *green economy* pada pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari. Data empiris yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan merujuk pada teori-teori *green economy* yang dikemukakan oleh para ahli di bidang ekonomi, sehingga dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian maupun adanya kesenjangan antara konsep teoretis dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Selanjutnya, mengacu pada karakteristik penelitian kualitatif serta pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai studi kasus. Studi kasus dipilih dengan memusatkan perhatian pada satu fenomena tertentu yang ditetapkan sebagai

¹³⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

¹³⁹ Moleong, 44.

fokus utama penelitian untuk dipahami secara mendalam, tanpa memperluas kajian pada fenomena lain di luar objek penelitian.¹⁴⁰ Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan penelaahan secara intensif dan mendalam terhadap gejala-gejala yang diteliti, sehingga bagian-bagian esensial dari permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasi dan dianalisis secara lebih komprehensif.¹⁴¹ Seperti pengamatan praktik pengelolaan sampah, menelaah konsep ekonomi masyarakat yang terlibat dalam praktik Ekowisata Brajaharjosari, pengamatan pola partisipasi masyarakat, dan sebagainya yang berkaitan dengan Pengelolaan Ekowisata Brajaharjosari.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ekowisata Desa Braja Harjosari yang terletak di Kecamatan Braja Slebah, Kabupaten Lampung Timur – waktu penelitian ini dilakukan secara berkala; 1 hari pra survey dan selama 3 hari penggalan data dan sekaligus pengamatan. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus kajian yang diangkat. Selain itu, Ekowisata Braja Harjosari memiliki karakteristik khas yang tidak banyak ditemukan pada desa wisata lainnya, antara lain keberadaan masyarakat yang multikultural serta perannya sebagai wilayah penyangga Taman Nasional Way Kambas, sehingga menjadikannya relevan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Arikunto bahwa sumber data penelitian merupakan dari mana data-

¹⁴⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 99.

¹⁴¹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

data diperoleh untuk mempermudah langkah identifikasi sumber data dalam suatu penelitian yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁴²

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama yaitu lokasi penelitian.¹⁴³ Sedangkan sumber data primer adalah narasumber individu, kelompok fokus, bahkan internet juga dapat menjadi sumber data primer.¹⁴⁴ Oleh sebab itu, informan atau narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap tema/persoalan yang dikaji. Adapun informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak lembaga/pengelola Ekowisata Desa Wisata Braja Harjosari yaitu Waryoko Susandi, dengan tujuan mendapatkan informasi tentang kebijakan, sistem pengelolaan yang diterapkan, dan menggali nilai-nilai *green economy* di Ekowisata Desa Braja Barjosari. Kemudian masyarakat yang terlibat dalam Ekowisata Brajaharjosari yaitu Paryanto, Linda Dian Istiani, dan I wayan toni candra. Penetapan sumber data primer ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya ekowisata, dampak dari penerapan nilai-nilai *green economy* dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak atau sumber tidak langsung, sehingga peneliti tidak menerima data tersebut secara langsung dari sumber utama. Data jenis ini umumnya berasal dari berbagai dokumen, arsip, maupun keterangan yang disampaikan oleh pihak lain.

¹⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 114.

¹⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁴⁴ Uma and Sekaran, *Metode Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 130.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari sejumlah literatur relevan antara lain; arsip dan dokumentasi yang dimiliki oleh pihak pengelola Ekowisata Braja Harjosari.¹⁴⁵ Selanjutnya adalah buku Endah Muniningtyas yang berjudul “Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy”,¹⁴⁶ buku Surna Tjahja Djajadiningrat dan Susanto Hardjolukito dengan judul “Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Menuju Ekonomi Hijau”,¹⁴⁷ buku Iwan Nugroho “Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan”,¹⁴⁸ Buku Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan),¹⁴⁹ Pengantar Green Economy,¹⁵⁰ buku Green Business (Manajemen Bisnis Berkonsep Ramah Lingkungan)¹⁵¹

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan.¹⁵² Tanpa adanya proses pengumpulan data yang tepat, penelitian berpotensi menghasilkan data yang tidak sesuai dengan fokus kajian. Sugiyono menegaskan bahwa ketiadaan teknik pengumpulan data yang jelas dapat menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan data yang dibutuhkan

¹⁴⁵ Tim JAWIS ANGSANA, *Laporan Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari* (Lampung Timur: JAWIS ANGSANA, 2023).

¹⁴⁶ Murniningtyas, *Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Development Strategic Initiatives)*.

¹⁴⁷ Djajadiningrat and Hardjolukito, *Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*.

¹⁴⁸ Nugroho, *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*.

¹⁴⁹ Nugraha et al., *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*.

¹⁵⁰ Zulfikar, Mayvita, and Purboyo, *Pengantar Green Economy*.

¹⁵¹ Agus Sugiarto, Lieli Suharti, and Christantius Dwiatmadja, *Green Business (Manajemen Bisnis Berkonsep Ramah Lingkungan)* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021).

¹⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2013), 244.

dalam penelitian.¹⁵³ Oleh karena itu, guna memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian sesuai dengan fokus yang ditetapkan. Penelitian ini melaksanakan observasi selama tiga hari guna memperoleh data sistematis terkait kondisi lapangan, kebijakan, dan pengelolaan ekowisata Desa Braja Harjosari.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertumpu pada penuturan langsung dari informan, baik berupa pengalaman, pengetahuan, maupun keyakinan pribadi.¹⁵⁴ Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang mengombinasikan kerangka pertanyaan yang telah disusun dengan keluwesan dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan informan berinteraksi secara lebih mendalam untuk menggali pandangan informan mengenai kehidupan dan pengalaman yang mereka miliki, sebagaimana disampaikan melalui ungkapan kata-kata informan itu sendiri.¹⁵⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang telah ditentukan yaitu pihak lembaga/pengelola Ekowisata Desa Wisata Braja Harjosari yaitu Waryoko Susandi, dan masyarakat yang memiliki

¹⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: alfabeta, 2015), 316.

¹⁵⁵ Masrukhin, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), h. 16

destinasi wisata yaitu Paryanto, Linda Dian Istiani, dan I wayan toni candra.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber data yang relevan, seperti foto, catatan tertulis, buku, surat kabar, majalah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan variabel penelitian.¹⁵⁶ Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai literatur, dokumen resmi milik pihak lembaga, serta pendokumentasian visual yang berkaitan dengan profil desa, aktivitas, dan program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Wisata Braja Harjosari melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Metode ini digunakan sebagai bahan pendukung bagi peneliti dalam memperoleh informasi yang diperlukan secara lebih komprehensif.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi merupakan metode pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan berbagai sumber atau pendekatan di luar data utama sebagai alat pengecekan atau pembanding.¹⁵⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kredibilitas informan, waktu penyampaian informasi, serta kondisi sosial dan situasional yang melatarbelakanginya. Djam'an Satori dan Aan Komariah mengemukakan bahwa triangulasi terdiri

¹⁵⁶ Abu Achmadi and Cholid Narbukonda, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 123.

¹⁵⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 329.

atas tiga bentuk:¹⁵⁸ yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.

Lebih lanjut, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama. Penerapan triangulasi sumber di lapangan memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih valid dan komprehensif, khususnya melalui perbandingan data yang diperoleh dari pihak pengelola sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Pada praktiknya, triangulasi sumber membantu peneliti dalam membandingkan hasil wawancara antar informan, mencocokkan data wawancara dengan hasil observasi lapangan, serta memverifikasi informasi melalui dokumen dan arsip pengelolaan ekowisata. Selain itu, peneliti juga melakukan klarifikasi ulang terhadap informasi yang belum konsisten guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data berperan sebagai landasan utama dalam pembentukan teori, sehingga teori tidak ditetapkan sejak awal, melainkan dibangun berdasarkan temuan lapangan. Peneliti mengembangkan kategori dan konsep secara langsung selama proses pengumpulan data. Data empiris tersebut digunakan untuk menelaah dan menguji pemahaman yang muncul di lapangan, yang kemudian terus disempurnakan melalui proses penelitian yang berlangsung secara berulang. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat terbuka dan induktif, karena memungkinkan

¹⁵⁸ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2014), 330.

adanya perubahan, penyesuaian, serta pengembangan seiring dengan ditemukannya data baru.¹⁵⁹

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menelaah dan mengaitkan berbagai data yang diperoleh secara sistematis. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara terpadu untuk menemukan keterkaitan antar informasi, sehingga dapat dirumuskan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian.¹⁶⁰ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada tahapan analisis yang meliputi tiga langkah utama, yaitu:¹⁶¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan data dengan cara menyusun ringkasan, menyeleksi informasi yang esensial, memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama, serta mengidentifikasi tema dan pola yang relevan, sambil mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Melalui proses ini, data yang telah direduksi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, sehingga membantu peneliti dalam melanjutkan tahap pengumpulan data maupun saat melakukan penelusuran kembali terhadap data tersebut. Proses reduksi data juga dapat didukung oleh penggunaan perangkat elektronik, seperti komputer, melalui pemberian kode pada kategori atau aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, maupun pemetaan hubungan antarkategori. Dalam

¹⁵⁹ S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 29.

¹⁶⁰ Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian* (Cirebon: Departemen STAIN, 2006), 12.

¹⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 337.

praktiknya, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks naratif.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal penelitian belum bersifat final karena masih memungkinkan adanya perubahan apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap selanjutnya. Namun demikian, apabila kesimpulan tersebut diperkuat oleh data yang valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan pengumpulan data ulang di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinilai kredibel.

BAB IV

IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA BRAJA HARJOSARI PERSPEKTIF ISLAM

A. Profil dan Dinamika Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari

Desa Braja Harjosari memiliki karakteristik geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang cukup beragam. Berdasarkan komposisi etnis, mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa sebesar 95%, diikuti oleh suku Bali sebanyak 4%, dan sisanya 1% merupakan kelompok etnis lainnya. Secara administratif, Desa Braja Harjosari terdiri atas 8 dusun/Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT).¹⁶² Desa ini juga berperan sebagai salah satu wilayah penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) serta dikenal sebagai desa dengan tingkat kemajuan tertinggi di antara desa-desa lain di Kecamatan Braja Selehah.¹⁶³ Dengan dihasilkannya data tersebut dan diperkuat dengan peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, maka posisi strategis tersebut menjadikan Braja Harjosari tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga potensial dalam pengembangan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat lokal.¹⁶⁴

Ekowisata Desa Wisata Braja Harjosari mulai terbentuk sejak tahun 2013 atas inisiatif kelompok pegiat alam dan pemerhati satwa liar. Inisiasi tersebut berangkat dari upaya penanggulangan konflik antara manusia dan gajah yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Dalam prosesnya, kelompok ini mendapatkan pendampingan dari para akademisi Universitas Lampung (UNILA) yang membantu merumuskan strategi penyelesaian konflik sekaligus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi alam yang dimiliki

¹⁶² Pemerintah Desa Braja Harjosari, *Dokumen Laporan Data Penduduk* (Lampung Timur: Pemerintah Desa, 2024).

¹⁶³ Tim JAWIS ANGSANA, *Laporan Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari*.

¹⁶⁴ Catatan Lapangan Peneliti, *Observasi* (Gazebo Area Ekowisata Braja Harjosari, 2025).

oleh Desa Braja Harjosari. Atas dasar kepedulian terhadap kelestarian alam dan satwa liar, lahirlah konsep pengembangan desa wisata berbasis Wisata Minat Khusus (*Special Interest Tourism*) yang mengedepankan pengalaman dan edukasi lingkungan bagi para pengunjung. Inisiatif ini kemudian diformalkan pada tahun 2015 dengan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Padang Savana Braja Harjosari sebagai wadah pengelolaan dan pengembangan kegiatan wisata berbasis konservasi.¹⁶⁵

Desa Braja Harjosari memiliki potensi alam, keanekaragaman hayati, dan budaya lokal yang kaya. Keunikan lanskap padang savana dan keberadaan satwa liar menjadi daya tarik utama wisata berbasis konservasi di desa ini. Dalam rangka memperluas jaringan kemitraan dan legalitas kelembagaan, POKDARWIS mendirikan sebuah badan hukum berbentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Jasa Wisata Padang Savana (JAWIS ANGSA). Pembentukan koperasi ini tidak hanya memperkuat jejaring antar pelaku wisata, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas ruang lingkup aktivitas wisata, termasuk memperoleh izin resmi untuk mengakses dan membawa pengunjung ke kawasan Taman Nasional Way Kambas sebagai bagian dari paket wisata alam dan edukasi, serta memperkuat dalam jejaring antar lembaga sosial yang peduli dengan kelestarian alam. Koperasi ini hadir sebagai motor penggerak wisata berbasis masyarakat yang berfokus pada profesionalisme, inklusivitas, dan pelestarian alam.¹⁶⁶

Visi JAWIS ANGSA adalah menjadi koperasi wisata unggulan berbasis masyarakat yang berperan aktif dalam konservasi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan slogan “*Wildlife, Nature, and Culture Experience of Way Kambas,*” ekowisata di Braja Harjosari menonjolkan integrasi antara konservasi satwa liar (seperti gajah dan burung endemik), pelestarian

¹⁶⁵ Tim JAWIS ANGSA, *Laporan Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari*.

¹⁶⁶ Tim JAWIS ANGSA.

lingkungan, serta pemanfaatan dan pelestarian budaya lokal. Kegiatan wisata yang dikelola mencakup susur sungai, pengamatan burung dan gajah liar, edukasi lebah trigona, hingga pertunjukan seni tradisional, yang semuanya berakar pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Tabel 2. Daftar Ruang Lingkup/Paket Destinasi Ekowisata Braja Harjosari¹⁶⁷

No	Ruang Lingkup Usaha Wisata
1	Susur sungai way penet
2	Pengamatan gajah liar
3	Bird watching – pengamatan burung endemik dan migran
4	Edukasi lebah madu trigona
5	Night safari – pengamatan satwa nokturnal
6	ATV Adventure village
7	Belajar menyadap karet secara tradisional
8	Kunjungan edukasi sekolah
9	Kegiatan pasar tradisional
10	Menanam padi bersama petani lokal
11	Pertunjukan seni tari dan gamelan bali
12	Pertunjukan seni tari lampung
13	Wild photograpy way kambas
14	Sunset view padang savana
15	Kerajinan souvenir rajut savana
16	Tracking tanggul – mitigasi konflik gajah dan manusia
17	Interaksi dan edukasi gajah
18	Penanaman dan donasi pohon (wisata konservasi)

Kegiatan wisata yang dikembangkan meliputi wisata minat khusus seperti susur sungai, pengamatan gajah liar dan burung migran, edukasi lingkungan, pertunjukan seni budaya (Tari Lampung dan Bali), wisata konservasi seperti penanaman pohon, hingga keterlibatan dalam mitigasi konflik manusia dan gajah. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Keberadaan Koperasi JAWIS ANGSANA tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga

¹⁶⁷ Tim JAWIS ANGSANA.

menjadi instrumen pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya lokal melalui pendekatan edukatif kepada wisatawan. Koperasi JAWIS ANGSA didirikan oleh masyarakat desa Braja Harjosari, berikut dibawah ini struktur anggota koperasi:

Tabel 3. Struktur Anggota Koperasi Jasa Wisata Padang Savana Braja Harjosari¹⁶⁸

1	Penasehat	Kepala Desa
2	Ketua	Suradi
3	Sekretaris	Suhadak
4	Bendahara	Ketut Andyane
5	Seksi Keamanan dan Ketertiban	a. Wayan Trima Yoga b. Tekat Riyanto c. Anabawen Wibowo
7	Seksi kebersihan dan Keindahan	a. Maria Ulfa b. Imam Syafei c. Linda Dian Istiani
8	Seksi Promosi dan Publikasi	a. Siti Eni Riawati b. I Wayan Toni Candra c. Waryoko Susandi
9	Seksi Humas dan Sumber Daya Manusia	a. Pariyanto b. Agus Toni c. Sri Hayati
10	Seksi Pengembangan Usaha	a. Suryanto b. Sulatun c. Dwi Ana Sariyah
11	Seksi Koordinator Lapangan	a. Wayan Bagus Abelian b. Suparti c. Ni Luh Putu Dewi Maharani

Kemudian sebagai salah satu desa wisata berbasis konservasi dan minat khusus, Desa Wisata Braja Harjosari telah mengalami dinamika perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Data kunjungan

¹⁶⁸ Tim JAWIS ANGSA.

wisatawan menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana desa ini mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara, serta bagaimana dampak berbagai situasi eksternal seperti pandemi COVID-19 mempengaruhi tingkat kunjungan. Tabel berikut menyajikan data kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Braja Harjosari selama kurun waktu 2016 hingga pertengahan tahun 2025, yang dapat memberikan gambaran kuantitatif terhadap tren pariwisata di desa tersebut.

Tabel 4. Data Kunjungan Wisatawan¹⁶⁹

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2016	150	110
2017	1100	185
2018	900	240
2019	198	55
2020	13	0
2021	15	0
2022	81	37
2023	212	80
2024	500	120
2025 (Januari-Juni)	60	35

Tabel di atas menyajikan data kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Braja Harjosari dari tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2025. Data ini mencakup dua kategori wisatawan, yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, yang dihimpun oleh Koperasi Jasa Wisata Padang Savana (JAWIS ANGSANA). Informasi ini penting untuk memahami dinamika perkembangan sektor pariwisata di desa tersebut, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan kunjungan wisatawan pasca pandemi.

¹⁶⁹ Tim JAWIS ANGSANA.

B. Implementasi Dimensi Lingkungan dalam Praktik Ekowisata

Penelitian ini menganalisis implementasi konsep *green economy* di Desa Wisata Braja Harjosari yang terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas. Melalui wawancara mendalam dan observasi dengan pengelola desa wisata dan tiga pelaku usaha lokal (peternak lebah, pengrajin rajut, dan seniman budaya Bali), penelitian ini mengungkap dinamika penerapan ekonomi hijau dalam konteks ekowisata berbasis masyarakat dan menunjukkan adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Keberadaannya tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya lokal melalui pendekatan edukatif kepada wisatawan.

Dalam menjaga lingkungan, berdsarkan hasil wawancara para pengelola ekowisata Desa Braja Harjosari menyatakan tidak pernah membangun tempat secara masif, efisiensi sumber daya, dan melakukan perlindungan ekosistem. Hal ini dinyatakan oleh pihak pengelola:

“Jadi kita tidak ada pembangunan yang dilakukan secara masif seperti pada umumnya, misal tempat foto atau pernak-pernik lainnya karena itu basisnya Mass Tourism dan basis yang kita pakai adalah Special Interest Tourism (wisata minat khusus) dan alasan lainnya adalah karena basis kita merupakan basis masyarakat jadi apapun yang dimiliki oleh masyarakat itulah yang kita tawarkan kepada para pengunjung. Contoh seperti kita punya paket wisata yang bernama sunset view atau padang savana kita tidak membangun apapun disitu, jadi kita hanya bawa kursi lipat, kita duduk disitu bercerita tentang

transmigrasi, tentang gajah, ataupun seperti sejarah desa dan sebagainya.”¹⁷⁰

Berdasarkan observasi, di sekitar area wisata tidak ada banyak bangunan yang berpotensi merusak alam. Bangunan yang ada terutama di sekitar lokasi savana hanya ada gazebo yang biasa dijadikan tempat para pengunjung berteduh.¹⁷¹

Lebih lanjut dalam hal menjaga lingkungan, pihak pengelola mengakui bahwa belum ada cara yang tepat untuk hal tersebut. Pihak pengelola menyatakan bahwa

“sampai saat ini itu juga masih menjadi masalah kami dan belum ada pengelolaan sampah terkait organik dan non organik. Cara selama ini yang kita pakai untuk mengurangi adanya sampah adalah kita sangat menghindari sampah plastik dengan cara para pengunjung harus membawa tumbler dan untuk isi ulang kita bawa galong. Jadi walaupun ada sampah di kawasan wisata kami ini disebabkan oleh masyarakat lokal yang berkegiatan seperti mancing atau hanya sekedar nyore di kawasan itu, solusi yang selama ini kami lakukan adalah gotong royong untuk membersihkan sampah tersebut secara rutin, sampah plastik kita buang kelubang dan kita bakar kalau yang organik kita buang ke tanaman supaya jadi pupuk alami.”

Berdasarkan observasi, para pengelola tidak hanya menyiapkan satu lubang pembuangan sampah. Tetapi juga diberlakukan ke semua para masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekowisata.¹⁷²

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Paryanto pemilik wisata madu lebah lanceng juga menyatakan bahwa “kami sebisa mungkin

¹⁷⁰ Waryoko Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara” (Braja Harjosari, 2025).

¹⁷¹ Catatan Lapangan Peneliti, *Observasi* (Area Ekowisata Braja Harjosari, 2025).

¹⁷² Catatan Lapangan Peneliti.

menggunakan bahan-bahan alami dan lokal dalam usaha madu lanceng. Misalnya, tempat sarang lebah kami buat dari bambu dan kayu, bukan dari bahan sintetis. Untuk kemasan madu, kami menggunakan botol kaca yang kemudian kita sterilkan ulang agar bersih dan tidak menambah limbah plastik, dan bahan makanan lebah juga kami menanam bunga yang kemudian menjadi pagar alami sehingga bisa jadi daya tarik. Kemudian untuk sampah kami memilah dari rumah dan kegiatan usaha. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dimasukkan ke komposter untuk pupuk. Sampah botol bekas kami kumpulkan dan kami jual ke bank sampah.”¹⁷³

Sama halnya ketika mewawancarai Linda, ketua kelompok kerajinan souvenir rajut savana dalam menjaga lingkungan. Linda menyatakan bahwa

“kami memang sangat memperhatikan penggunaan bahan lokal dalam usaha rajut kami. Misalnya, kami memilih benang dari serat alami seperti katun dan ecoprint dari daun dan tumbuhan sekitar sebagai tambahan ornamen. Kalau memungkinkan, kami juga pakai pewarna alami dari kulit buah atau daun ketapang untuk aksesoris. Kami percaya bahwa produk yang berasal dari alam dan ramah lingkungan lebih bernilai dan sejalan dengan semangat kami.”

Kemudian dalam mengelola sampah Linda mengatakan bahwa “Untuk sampah dari kegiatan merajut, seperti potongan benang atau kain sisa, kami tidak langsung buang. Biasanya kami kumpulkan dan olah jadi gantungan kunci kecil atau boneka mini sebagai bonus pembelian. Sedangkan untuk sampah rumah tangga, kami ikut program pemilahan

¹⁷³ Paryanto, “Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng” (Braja Harjosari, 2025).

sampah yang difasilitasi kelompok wanita desa—organik dijadikan kompos, non-organik kami setor ke bank sampah desa.”¹⁷⁴

Berdasarkan hasil observasi, meski problematika tentang sampah belum menemukan solusi yang benar-benar tepat. Tetapi mereka memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap sampah, dengan itu mereka melakukan strategi adaptif dengan menghindari sampah plastik melalui pemberlakuan terhadap wisatawan untuk membawa tumbler, tidak membawa makanan yang dapat menimbulkan sampah berlebih, serta pihak pengelola menyiapkan galon untuk para wisatawan.¹⁷⁵

Selanjutnya mengenai keterlibatan para wisatawan dan masyarakat dalam upaya pelestarian alam, Waryoko Susandi mengatakan

“untuk pelestarian hayati yang biasa kita sebut dengan kegiatan konservasi, untuk para wisatawan ketika kita melakukan perjalanan wisata misal seperti paket mitigasi konflik gajah melalui susur sungai sampai di tanggul perbatasan Kita melakukan kampanye dan memberikan pemahaman melalui story telling terkait pentingnya menjaga ragam hayati yang ada di wilayah wisata.”¹⁷⁶

Selaras dengan Paryanto juga mengatakan “Saya cukup aktif dilibatkan. Kami sering diajak ikut bersih-bersih kawasan penyangga Way Kambas, ikut pelatihan tentang UMKM, pertanian organik, dan kadang diundang jadi narasumber di sekolah untuk edukasi pentingnya lebah dalam ekosistem. Saya merasa bangga karena kegiatan kami dianggap bagian dari pelestarian itu.”

Linda pun menyatakan “Kami cukup dilibatkan, terutama dalam kegiatan kampanye “Bersih Wisata – Bersih Warga” dan pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan dari mitra konservasi. Kami juga

¹⁷⁴ Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut” (Braja Harjosari, 2025).

¹⁷⁵ Catatan Lapangan Peneliti, *Observasi*, 2025.

¹⁷⁶ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

ikut tanam pohon saat ada program reboisasi di area buffer zone Taman Nasional Way Kambas. Selain itu, anak-anak kami juga dilibatkan dalam kegiatan edukasi lingkungan di sekolah dan posyandu.”¹⁷⁷

Sama halnya dengan Paryanto dan Linda, I Wayan Toni Candra mengatakan “Cukup dilibatkan. Misalnya saat ada program penanaman pohon atau bersih kampung, kelompok kami sering diminta ikut serta. Kami juga dilibatkan dalam pelatihan pemanfaatan limbah organik untuk membuat bahan kerajinan dari masyarakat desa dan tamu wisata.”¹⁷⁸

Kemudian dalam aspek penggunaan energi terbarukan, hasil dari observasi menemukan bahwa pihak pengelola ekowisata belum menggunakan atau menerapkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik air atau angin, saat ini yang mereka terapkan dalam penggunaan atau menerapkan rendah karbon adalah meminimalisir dampak karbon yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara mengangkut atau membawa wisatawan dengan mobil kapasitas banyak seperti mobil *pickup* dan bahkan untuk melakukan perjalanan susur sungai pihak pengelola menyiapkan kapal yang dapat mengangkut 20 orang, hal tersebut dilakukan demi menjaga dan mengurangi dampak karbon yang berlebih.¹⁷⁹

C. Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat Lokal

Dari segi ekonomi, pengelolaan ekowisata Braja Harjosari berorientasi pada pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat lokal. Semua fasilitas dan layanan, seperti homestay, pemandu wisata, dan penyedia makanan, dikelola langsung oleh warga. Hal tersebut menggambarkan konsep *inclusive green growth* yang berarti pertumbuhan ekonomi harus

¹⁷⁷ Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut.”

¹⁷⁸ I wayan Toni Candra, “Wawancara Seniman Budaya Bali” (Braja Harjosari, 2025).

¹⁷⁹ Catatan Lapangan Peneliti, *Observasi*, 2025.

berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Waryoko Susandi menyatakan;

“Jadi kalau untuk dampak ataupun memberikan nilai guna yaitu rasa tanggung jawab ya terutama. Jadi tingkat kesadaran seperti tentang kebersihan menjadi satu faktor penting untuk kegiatan wisata ini. Selanjutnya kami memberikan fasilitas yang kepada para masyarakat yang memiliki destinasi, seperti handuk atau sprei kasur untuk fasilitas home stay dan memberikan kepercayaan kepada mereka supaya tumbuh rasa memiliki dan dapat menjaga fasilitas yang kami berikan, dan kami berusaha memberikan arahan kepada mereka untuk menjaga lingkungan supaya dapat terjaga dan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat lainnya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian desa atau alam.”¹⁸⁰

Berdasarkan observasi, penjaga *home stay* sangat memperhatikan kerapian tata letak barang, dan sangat menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga pelayanan yang mereka berikan kepada tamu dapat maksimal dan memberikan kenyamanan.¹⁸¹

Kemudian strategi dalam memaksimalkan pemanfaatan fasilitas, Waryoko Susandi mengatakan “kami memiliki strategi khusus untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Prinsip dasarnya adalah pemanfaatan berbasis daya dukung lingkungan dan sosial. Kami sadar bahwa Desa Braja Harjosari berada di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas, jadi setiap aktivitas wisata harus selaras dengan prinsip konservasi dan tidak boleh merusak keseimbangan alam. kami mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada lewat diversifikasi fungsi. Contohnya, aula komunitas yang awalnya hanya

¹⁸⁰ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

¹⁸¹ Catatan Lapangan Peneliti, *Observasi*, 2025.

untuk rapat desa, sekarang juga digunakan untuk pelatihan kerajinan, edukasi lingkungan, hingga pertunjukan budaya lokal. Jadi kami tidak perlu membangun fasilitas baru, cukup maksimalkan yang ada. kami juga menerapkan prinsip ekowisata berbasis edukasi. Jadi pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati, tapi juga belajar dan menghargai nilai lingkungan serta budaya lokal. Ini membuat wisatawan lebih sadar dan cenderung menjaga fasilitas daripada merusaknya.”¹⁸²

Selanjutnya pengelola menentukan skala pengembangan wisata agar sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan potensi ekonomi lokal, dalam hal ini pihak pengelola menyatakan “Menentukan skala pengembangan wisata itu bukan perkara gampang, apalagi karena kami berada di wilayah penyangga kawasan konservasi. Maka dari itu, kami selalu mengedepankan prinsip daya dukung lingkungan dan kapasitas sosial-ekonomi lokal dalam perencanaan.”

Kemudian upaya untuk mengintegrasikan produk lokal ke dalam rantai ekonomi wisata, pengelola melakukan integrasi produk lokal ke dalam rantai ekonomi wisata adalah salah satu prioritas utama kami dalam mengembangkan desa wisata ini. Kami percaya bahwa pariwisata bukan hanya tentang menarik orang dari luar, tapi juga soal memperkuat ekonomi warga dari dalam. kami fasilitasi warga untuk menjual produk pertanian lokal seperti madu hutan, singkong, beras organik, dan sayuran segar langsung ke wisatawan. Biasanya ditawarkan dalam paket homestay atau disediakan di warung milik warga yang menjadi mitra resmi desa wisata.¹⁸³

Kemudian untuk mastikan nilai ekonomi masyarakat kami memiliki sistem paket wisata, jadi setiap paket yang kami tawarkan kepada

¹⁸² Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

¹⁸³ Catatan Lapangan Peneliti, *Observasi*, 2025.

pengunjung itu isinya dominan destinasi yang dimiliki oleh masyarakat seperti edukasi lebah madu, makanan tradisional, kerajinan rajut, pementasan dan edukasi budaya hindu bali. Jadi upaya yang kami lakukan adalah berbasis masyarakat. Dengan adanya sistem paket wisata, maka setiap bagian akan terintegrasikan dengan baik dan kelestarian alamnya tetap terjaga.

Paryanto mengatakan bahwa “Kami tidak pernah memaksa lebah untuk produksi besar-besaran. Produksi mengikuti musim dan ketersediaan bunga. Kalau sedang paceklik, ya hasil sedikit, tapi tetap kami jaga kualitasnya. Kami lebih fokus ke edukasi wisata, jadi orang tidak hanya beli madu, tapi juga belajar prosesnya.”¹⁸⁴ Sama halnya yang dinyatakan oleh Linda bahwa “Produksi kami masih skala rumahan dan berdasarkan pesanan. Kami tidak produksi massal, supaya tidak mubazir dan tetap menjaga kualitas. Kalau musim ramai wisatawan, kami stok lebih banyak, tapi kalau sepi, kami alihkan ke penjualan online dan produk custom. Kami juga tidak memaksakan kerja lembur, agar tetap sehat dan berkelanjutan.”¹⁸⁵ Dengan sistem yang ada, tidak hanya menjaga kelestarian alam para pelaku UMKM juga merasakan hasilnya. Paryanto mengatakan “Alhamdulillah, iya. Dulu hanya jual ke tetangga, sekarang wisatawan dari luar daerah mulai kenal dan beli. Bahkan beberapa ikut pre-order lewat media sosial. Pendapatan bertambah, dan saya bisa rekrut dua pemuda untuk bantu kelola sarang dan edukasi pengunjung.” Selain mendapatkan pelatihan dari pengelola, para pemilik UMKM juga mendapatkan pelatihan “Saya pernah ikut pelatihan dari Dinas Pariwisata dan LSM lingkungan tentang pengemasan produk, manajemen usaha, dan

¹⁸⁴ Paryanto, “Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng.”

¹⁸⁵ Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut.”

sertifikasi produk hijau. Itu sangat membantu, terutama dalam cara menyampaikan nilai edukasi ke pengunjung.”

D. Partisipasi Sosial dan Pelestarian Budaya Lokal

Dalam konteks multikultural desa yang terdiri dari suku Jawa, Bali, dan Lampung, pengelola menerapkan strategi inklusif dengan membentuk tim pengelola yang inklusif—ada perwakilan dari tiap kelompok budaya dan dusun. Hasil wawancara menunjukkan keterlibatan yang relatif merata dari berbagai kelompok demografis seperti program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada masyarakat sekitar dalam pengembangan wisata. Pengelola menyatakan bahwa “kami mengadakan pelatihan secara bekerja sama dengan NGO (Non-Governmental Organization) dibawah naungan aseau Centre For Biodiversity dan mendapatkan hibah berupa aset seperti handuk home stay, spreng kasur, cermin untuk kamar home stay, dan list menu makanan home stay. Selanjutnya pelatihan peningkatan SDM yang diadakan oleh dinas pariwisata.”¹⁸⁶

Dengan adanya geografis yang multikultural, pihak pengelola berusaha merangkul dan adil “Kami sangat menyadari bahwa Desa Braja Harjosari terdiri dari masyarakat multikultural, mayoritas bersuku Jawa, tapi juga ada suku Bali, Lampung, dan lainnya. Karena itu, sejak awal kami berkomitmen bahwa pengembangan desa wisata ini harus mencerminkan keragaman budaya lokal, bukan malah menghapusnya kami membentuk tim pengelola yang inklusif—ada perwakilan dari tiap kelompok budaya dan dusun. Jadi setiap keputusan wisata, mulai dari tema acara sampai menu konsumsi, selalu mempertimbangkan keanekaragaman yang ada. dalam kegiatan wisata, kami sengaja memasukkan unsur budaya dari berbagai kelompok. Misalnya, saat ada pertunjukan kesenian, kami tampilkan tari tradisional Jawa seperti *tayub*,

¹⁸⁶ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

barong, tarian bali, dan *gambuh* dari masyarakat Bali yang bernama kelompoknya Gong dua ribu, serta *musik gamolan* atau *pepaccur* dari warga keturunan Lampung. Ini jadi semacam etalase budaya hidup yang bisa dinikmati wisatawan sekaligus dibanggakan warga. Kami adakan pelatihan kepada pemandu lokal agar mereka bisa menjelaskan sejarah dan nilai-nilai dari tiap tradisi secara berimbang. Tidak ada yang ditonjolkan secara berlebihan. Semua mendapat tempat.”

Maka dengan adanya usaha merangkul semua masyarakat tanpa melihat suku dan budaya, Ekowisata Desa Wisata Braja Harjosari menunjukkan bahwa sistem mereka sangat berdaya pada basis masyarakat. Seperti keterlibatan komunitas dalam menyediakan layanan wisata seperti homestay, pemandu lokal, atau pertunjukan budaya “layanan itu kita masukan ke dalam bentuk paket untuk memastikan semua mendapatkan hasil dari adanya wisata ini. Dan semua pelaku yang ada di dalam layanan yang ada di wisata ini adalah orang asli Desa Braja Harjosari. Dalam praktiknya, strategi pengelolaan desa wisata kami memang dirancang agar manfaatnya tidak hanya di satu sektor, tapi bisa dirasakan secara lintas sektor—baik ekonomi, sosial, maupun budaya—secara bersamaan dan berkelanjutan. Jadi bisa dibilang, strategi kami adalah pendekatan terpadu dan berlapis. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus saling kait—baru bisa jadi desa wisata yang benar-benar berkelanjutan.”¹⁸⁷

Pernyataan pihak pengelola selaras dengan para masyarakat, bahkan disetiap kegiatan yang berkaitan tentang pelatihan atau rapat dan pengembangan eko wisata selalu dilibatkan. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Paryanto bahwa “saya sering ikut rapat desa dan forum warga, apalagi kalau ada agenda yang menyangkut pelestarian atau program baru untuk wisata edukasi. Suara kami sebagai pelaku usaha kecil

¹⁸⁷ Susandi.

didengar, bahkan pernah diminta buat jadi percontohan.”¹⁸⁸ Linda juga menyatakan hal yang sama “Kami sering diajak musyawarah desa, terutama saat menyusun agenda wisata tahunan atau menentukan kebijakan produk lokal. Suara dari kelompok kami cukup dihargai, dan kami merasa bagian dari proses pembangunan desa.”¹⁸⁹ Dengan metode yang terbuka dan selalu melibatkan masyarakat dalam membangun dan menjaga kelestarian alam maka akan selaras dengan menguatnya komitmen masyarakat. I Wayan Toni Candra mengatakan “Setiap kali ada rapat desa atau pertemuan antar komunitas, saya selalu hadir sebagai perwakilan kelompok seni Bali. Suara kami juga didengar, terutama saat membahas agenda wisata budaya”¹⁹⁰

E. Tata Kelola dan Kolaborasi Kelembagaan Ekowisata

Pada dimensi kelembagaan Ekowisata Desa Braja Harjosari memiliki jejaring kemitraan yang kompleks dan multi-level sehingga menggambarkan konsep *good governance*. Pengelola berkoordinasi dengan koperasi wisata alam gajah sejahtera yang dimiliki oleh pihak Taman Nasional Way Kambas, berkolaborasi dengan ecolodges Indonesia untuk membantu mempromosikan wisata Braja Harjosari ke mancanegara, dan bermitra dengan Universitas Lampung dan La Trobe University untuk penelitian dan pengembangan. Demi menjaga keselarasan antar kemitraan yang kompleks dengan aktivitas masyarakat, maka pihak pengelola selalu mengadakan musyawarah “setiap sebulan sekali kita ada musyawarah rutin bersama para anggota koperasi dan para masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata. Musyawarah rutin ini membahas perkembangan, target-target kita kedepannya, dan melakukan evaluasi kegiatan kita.”

¹⁸⁸ Paryanto, “Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng.”

¹⁸⁹ Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut.”

¹⁹⁰ Candra, “Wawancara Seniman Budaya Bali.”

Kemudian kebijakan yang diterapkan bersifat partisipatif dan transparan bagi semua pemangku kepentingan, Waryoko Susandi mengatakan “Kebijakan di Desa Wisata Braja Harjosari diterapkan secara partisipatif dan transparan.

Kemudian semua pemangku kepentingan dilibatkan melalui musyawarah desa dan informasi keuangan itu kita sampaikan serta sepakati bersama seperti kesepakatan harga dan pembagian hasil antara pengelola kopra dengan masyarakat yang memiliki destinasi wisata, dengan besaran 15% masuk kopra sebagai kas dan 85% masuk ke pemilik destinasi wisata. Semua program disampaikan secara terbuka lewat musyawarah bersama, hal ini memastikan setiap keputusan mencerminkan aspirasi masyarakat dan berjalan secara adil serta akuntabel.”¹⁹¹

F. Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari

Menurut UNEP *Green Economy* didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan secara sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.¹⁹² Dalam konteks wisata, *green economy* menjadi bentuk pariwisata dengan tampilan terbaik guna menumbuhkan rasa peduli terhadap kesejahteraan, peduli terhadap lingkungan, sosial, dan budaya yang dapat memberikan pengalaman serta menumbuhkan sumber daya yang berkualitas demi kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Merujuk pada UNEP¹⁹³,

¹⁹¹ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

¹⁹² UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

¹⁹³ Victor and Jackson, “A Commentary on UNEP’s Green Economy Scenarios.”

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),¹⁹⁴ dan beberapa literatur yang mengkaji tentang pariwisata berkelanjutan,¹⁹⁵ konsep *green economy* dalam konteks pariwisata dapat dibagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu: lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.¹⁹⁶

a. Dimensi Lingkungan: Keberlanjutan Ekologis

Pengelolaan ekowisata Braja Harjosari menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip konservasi alam, kesejahteraan masyarakat, dan adil secara sosial yang sejalan dengan prinsip *green economy*.¹⁹⁷ Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Wisata Braja Harjosari menerapkan filosofi "tidak ada pembangunan yang masif" dalam pengembangan fasilitasnya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang *carrying capacity* lingkungan. Pengelola desa wisata menyatakan bahwa mereka "selalu berpedoman kepada kearifan lokal" dan menghindari pembangunan struktur yang dapat menimbulkan dampak negatif di kawasan perbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas.¹⁹⁸

Strategi ini sejalan dengan prinsip *green economy* yang menekankan efisiensi sumber daya, perlindungan ekosistem,¹⁹⁹ dan

¹⁹⁴ Kementerian PPN/Bappenas, "Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia."

¹⁹⁵ Victor and Jackson, "A Commentary on UNEP's Green Economy Scenarios"; Schmalensee, "From 'Green Growth' to Sound Policies: An Overview."

¹⁹⁶ Richins, "Environmental, Cultural, Economic and Socio-Community Sustainability: A Framework for Sustainable Tourism in Resort Destinations."

¹⁹⁷ OECD, "Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators," *Innovation*, 2011, <https://doi.org/10.1787/9789264111318-en>; selanjutnya, lihat di; Djajadiningrat and Hardjolukito, *Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*.

¹⁹⁸ Susandi, "Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara."

¹⁹⁹ Djajadiningrat and Hardjolukito, *Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*, 201–5.

infrastruktur ramah lingkungan.²⁰⁰ Dengan hanya membangun dermaga untuk kegiatan susur sungai yang sekaligus berfungsi sebagai mitigasi konflik manusia-gajah, desa ini menunjukkan inovasi dalam menciptakan infrastruktur multifungsi yang mendukung konservasi.

Berdasarkan pada hasil wawancara, ekowisata Braja Harjosari menunjukkan peran penting sebagai wisata minat khusus, karena pada dasarnya konsep tersebut melibatkan masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus subjek yang berperan dalam pengembangan pariwisata sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan secara bersamaan. Selaras dengan pernyataan Piter *et.al* bahwa fokus wisata minat khusus meliputi kegiatan atau objek spesifik seperti wisata religi, kuliner lokal, petualangan, pengetahuan tentang alam, dan dalam praktiknya wisata minat khusus secara masif tidak membutuhkan infrastruktur yang besar sehingga dapat tertuju pada keaslian serta keterlibatan langsung dengan budaya masyarakat lokal.²⁰¹

Tempat wisata yang menggunakan sistem *special interest tourism* masyarakat lokal merupakan pelaku utama, maka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, aspek lainnya pun harus diutamakan seperti konservasi alam dan juga menjaga keaslian dari budaya masyarakat, bahkan harus memperhitungkan penggunaan bahan dalam membuat produk wisata.²⁰² Hal ini tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dan pelaku usaha pada eko wisata braja

²⁰⁰ Nugraha et al., *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*, 122–24.

²⁰¹ Amelia Piter, A.A Istri Putera Widiastiti, and Ni Putu Isha Aprinica, “Analisis Potensi Daya Tarik Wisata Vihara Dewi Welas Asih Sebagai Wisata Religius,” *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis* 2, no. 12 (2023): 2508–17, <https://doi.org/10.22334/paris.v2i12.628>.

²⁰² Madusari et al., *Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemampuan Kewirausahaan Dengan Konsep Ekowisata Di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan* (Semarang: FLIPMAS, 2012), 39.

harjosari, yang selalu menekankan penggunaan bahan alami atau bahan yang sekiranya tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.²⁰³

Penggunaan bahan alami dalam membuat produk wisata merupakan hal penting dalam menjaga ekosistem alam, hal serupa juga dilakukan oleh Linda yang menerapkan penggunaan benang katun dan wol untuk membuat boneka dan gantungan kunci, serta menggunakan pewarna alami dari dedaunan, dan penggunaan tumbuh-tumbuhan dalam membuat *ecoprint*.²⁰⁴ Selain itu juga Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi seperti penanaman pohon dan bersih-bersih kawasan penyangga menunjukkan internalisasi nilai-nilai lingkungan yang kuat. I Wayan Toni Candra menyatakan bahwa dalam budaya mereka, "hidup itu harus selaras dengan alam,"²⁰⁵ yang memperkuat fondasi filosofis untuk implementasi green economy.

Kemudian dalam ranah pengembangan ekowisata braja harjosari, pengelola tidak pernah melakukan pembangunan dengan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti rumah kaca dan sebagainya yang dapat merusak lingkungan. Berdasarkan hasil observasi pada lapangan, bangunan yang ada di kawasan wisata seperti *home stay* adalah bangunan milik warga atau rumah warga dan seperti tempat pementasan budaya itupun menggunakan balai banjar yang fungsinya adalah tempat pertemuan para masyarakat hindu dan ketika ada pengunjung yang membeli paket pementasan budaya kita gunakan balai banjar tersebut untuk pementasan.

Dengan konsep wisata minat khusus, para pengelola ekowisata braja harjosari juga melibatkan partisipasi aktif para wisatawan dalam kegiatan wisata seperti, tentang pelestarian hayati atau kegiatan

²⁰³ Paryanto, "Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng."

²⁰⁴ Linda, "Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut."

²⁰⁵ Candra, "Wawancara Seniman Budaya Bali."

konservasi dikenalkan melalui perjalanan wisata, misal seperti paket mitigasi konflik gajah melalui susur sungai sampai pada titik tertentu seperti tanggul perbatasan kita melakukan kampanye dan memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui *story telling* terkait pentingnya menjaga ragam hayati yang ada di wilayah wisata, edukasi budaya bali seperti belajar dan mengenal filosofi dalam gerak tari, dan edukasi madu lebah lanceng.²⁰⁶

Meski memiliki komitmen lingkungan yang kuat, hasil wawancara mengungkap bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama. Pengelola mengakui bahwa "sampai saat ini sampah masih menjadi masalah kami dan belum ada pengelolaan sampah terkait organik dan non organik. Saat ini yang kami lakukan terhadap pengelolaan sampah, yang organik kita jadikan pupuk alami dan yang non organik kita bakar di lubang"²⁰⁷ Namun, mereka telah melakukan strategi adaptif dengan menghindari sampah plastik melalui penggunaan tumbler dan galon untuk pengunjung. Praktik pembakaran sampah plastik yang masih dilakukan menunjukkan perlunya intervensi teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah. Di sisi lain, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk alami mencerminkan penerapan ekonomi sirkular dalam skala kecil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka praktik pada dimensi lingkungan yang di terapkan dalam mengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari selaras dengan beberapa aspek penting konsep green economy dalam ekowisata²⁰⁸ yaitu membangun infrastruktur yang

²⁰⁶ Susandi, "Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara" juga; Candra, "Wawancara Seniman Budaya Bali" juga; Paryanto, "Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng."

²⁰⁷ Susandi, "Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara."

²⁰⁸ Nugraha et al., *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*, 122–24 Lebih Lanjut Lihat di; ; Victor and Jackson,

ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dengan cara tidak adanya kerusakan terhadap ekosistem dan mementingkan produk masyarakat lokal, pengetahuan dan kesadaran lingkungan. Meski dalam hal ini belum ada sistem penanggulangan sampah secara baik namun dengan adanya larangan bagi pengunjung membawa bekal atau barang yang akan menimbulkan sampah berlebih dan penanganan secara sirkular, pengelolaan tersebut telah menunjukkan usaha menjaga kelestarian alam. Kemudian dalam aspek penggunaan energi terbarukan dalam hal ini ekowisata belum menggunakan atau menerapkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik air atau angin, saat ini yang mereka terapkan dalam penggunaan atau menerapkan rendah karbon adalah meminimalisir efek karbon yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara mengangkut atau membawa wisatawan dengan mobil kapasitas banyak seperti mobil *pickup*.²⁰⁹

b. Dimensi Ekonomi: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Pada dimensi ekonomi, ekowisata braja harjosari menunjukkan implementasi yang sangat baik sesuai dengan pilar dan prinsip green economy dalam ekowisata, khususnya dalam menciptakan *prosperity* dan *well being*²¹⁰ dengan menerapkan model ekonomi yang dikembangkan secara inklusif dengan basis masyarakat. Sistem yang diterapkan oleh para pengelola dalam membagi kesejahteraan masyarakat adalah dengan membuat sistem paket wisata yang terintegrasi pada seluruh produk dan layanan lokal. Satiap paket mencakup destinasi

“A Commentary on UNEP’s Green Economy Scenarios”; Purwanto, “Internalisasi Aspek Lingkungan Ke Dalam Aspek Sosial: Peningkatan Kesadaran Dan Perubahan Pola Pikir” (Bandung, 2012).

²⁰⁹ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

²¹⁰ United Nations Environmental Programme, “Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste.”

milik masyarakat seperti edukasi lebah madu, makanan tradisional, kerajinan rajut, dan pementasan budaya Hindu Bali, membentuk tim pemandu wisata.²¹¹ Sistem tersebut selaras dengan prinsip *justice* dalam green economy yang berupaya memastikan distribusi ekonomi secara merata.²¹² Lebih lanjut Waryoko Susandi mengatakan:

“kami memiliki strategi khusus untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Prinsip dasarnya adalah pemanfaatan berbasis daya dukung lingkungan dan sosial. Untuk itu strategi yang kami lakukan adalah rotasi aktivitas wisata, mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada, ekowisata berbasis edukasi. Jadi pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati, tapi juga belajar dan menghargai nilai lingkungan serta budaya lokal.”

Hal tersebut selaras dengan pernyataan bappenas bahwa sistem yang terstruktur secara inklusif, maka ekowisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan alternatif dari kegiatan yang berkelanjutan, seperti transformatif yang mengintegrasikan ekonomi lokal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan global.²¹³ Selain itu, ekowisata juga menjadi sarana untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan menyediakan pasar untuk produk-produk lokal seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan jasa wisata berbasis komunitas.²¹⁴

²¹¹ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

²¹² Hannah Stoddart, “Principles for The Green Economy, A Collection of Principles for The Green Economy in The Context of Sustainable Development and Poverty Eradication,” 2012 lebih lengkap liha di ; ; United Nations Environmental Programme, “Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste.”

²¹³ UNEP & UNWTO, *Tourism in the Green Economy-Background Report*, 58.

²¹⁴ Honey, *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?*, 36.

Dengan adanya sistem paket wisata yang di sediakan oleh pengelola bertujuan untuk memastikan integrasi antara pariwisata dengan produk lokal, Waryo Susandi menjelaskan:²¹⁵

“untuk memperkuat ekonomi warga dari dalam, kami fasilitasi warga untuk menjual produk mereka seperti madu hutan, olahan singkong, beras organik, dan sayuran segar langsung ke wisatawan. Biasanya ditawarkan dalam paket wisata, paket homestay, dan atau disediakan di warung milik warga yang menjadi mitra resmi desa wisata. Intinya, semua lini ekonomi lokal—baik produk, jasa, maupun tradisi—kami upayakan untuk terhubung langsung dengan arus wisata yang datang, agar manfaat ekonominya tidak bocor keluar desa, tapi justru memutar di dalam komunitas”

Paryanto selaku pemilik destinasi edukasi madu lebah lanceng juga menyatakan bahwa:²¹⁶

“kami kerja sama pihak pengelola dengan cara masuk dalam paket wisata, bekerja sama dengan homestay, dan warung kopi desa. Biasanya wisatawan yang menginap bisa ikut kunjungan ke sarang lebah dan beli langsung. Kami juga dipromosikan lewat akun medsos desa wisata. Bahkan ada mahasiswa yang bantu bikin katalog online. Alhamdulillah, iya. Dulu hanya jual ke tetangga, sekarang wisatawan dari luar daerah mulai kenal dan beli. Bahkan beberapa ikut pre-order lewat media sosial. Pendapatan bertambah, dan saya bisa rekrut dua pemuda untuk bantu kelola sarang dan edukasi pengunjung.”

Mengenai integrasi, Linda selaku ketua kelompok souvenir kerajinan rajut savana juga menyatakan:²¹⁷

“Alhamdulillah, sejak wisata mulai berkembang, kami lebih mudah menjual produk. Wisatawan sering beli oleh-oleh langsung

²¹⁵ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

²¹⁶ Paryanto, “Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng.”

²¹⁷ Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut.”

dari rumah atau saat pameran di acara desa. Pendapatan kami memang belum besar, tapi stabil, dan jauh lebih baik dibanding sebelum ada wisata.”

Lebih lanjut I Wayan Toni Candra juga menyatakan bahwa:²¹⁸

“Ya, jelas terasa. Teman-teman lebih berdaya. Sebelum ada desa wisata, pertunjukan hanya dilakukan saat ada upacara adat. Sekarang, kami bisa tampil untuk wisatawan, kadang juga diundang di kegiatan luar desa. Bahkan beberapa anak muda di kelompok kami bisa bantu keluarga dari penghasilan itu.”

Pernyataan para informan di atas mencerminkan bahwa dengan adanya ekowisata braja harjosari melakukan upaya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam mengambil keputusan dan manajemen pariwisata²¹⁹ Serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat tanpa adanya eksploitasi yang berlebihan.²²⁰ Upaya dalam menyeimbangkan antara kegiatan wisata dengan sumber daya alam, para pengelola menerapkan:²²¹

“Menentukan skala pengembangan wisata itu bukan perkara gampang, apalagi karena kami berada di wilayah penyangga kawasan konservasi. Maka dari itu, kami selalu mengedepankan prinsip daya dukung lingkungan dan kapasitas sosial-ekonomi lokal dalam perencanaan.”

Kemudian masyarakat yang memiliki destinasi wisata pun melakukan hal serupa seperti tidak melakukan produksi secara besar-besaran, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan

²¹⁸ Candra, “Wawancara Seniman Budaya Bali.”

²¹⁹ Nugraha et al., *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*, 122–24.

²²⁰ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2025*, 19.

²²¹ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

mementingkan menjaga dan melestarikan alam. Pola ini di ungkapkan oleh Paryanto dan Linda:

“Kami tidak pernah memaksa lebah untuk produksi besar-besaran. Produksi mengikuti musim dan ketersediaan bunga. Kalau sedang paceklik, ya hasil sedikit, tapi tetap kami jaga kualitasnya. Kami lebih fokus ke edukasi wisata, jadi orang tidak hanya beli madu, tapi juga belajar prosesnya.”²²²

“Produksi kami masih skala rumahan dan berdasarkan pesanan. Kami tidak produksi massal, supaya tidak mubazir dan tetap menjaga kualitas. Kalau musim ramai wisatawan, kami stok lebih banyak, tapi kalau sepi, kami alihkan ke penjualan online dan produk custom. Kami juga tidak memaksakan kerja lembur, walaupun ada sisa atau limbah dari produksi kami daur ulang menjadi produk custom agar tetap sehat dan berkelanjutan.”²²³

Semua informan melaporkan penguatan nilai gotong royong. Seniman Bali menyatakan bahwa "dalam budaya Bali pun, gotong royong itu sudah menjadi bagian hidup. Kami bantu kelompok lain saat ada persiapan festival atau bersih desa, dan sebaliknya mereka juga bantu kami." Peternak lebah menambahkan bahwa "ada rasa kekeluargaan yang makin kuat sejak wisata desa berkembang," sementara pengrajin rajut menekankan budaya "saling bantu saat ada pesanan besar atau pameran." Pengelola menerapkan prinsip daya dukung lingkungan, prinsip pertumbuhan, pengelolaan sumber daya alam, serta prinsip sertifikasi dan standar berkelanjutan dalam menentukan skala pengembangan.²²⁴ Mereka melakukan rotasi aktivitas wisata, di mana jalur *tracking* dan susur sungai tidak dibuka setiap hari untuk memberikan waktu pemulihan alam. Pendekatan ini

²²² Paryanto, “Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng.”

²²³ Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut.”

²²⁴ Nugraha et al., *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*, 122–24.

mencerminkan implementasi prinsip *Efficiency dan Planetary Boundaries* dalam *green economy for tourism*.²²⁵

Sistem pengelolaan ekowisata dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara di atas selaras dengan Martha Honey yang menyatakan bahwa Indikator penting dari keberhasilan dimensi ekonomi dalam praktik pariwisata adalah terciptanya lapangan kerja yang ramah lingkungan (*green jobs*) seperti berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, diantaranya pemandu wisata alam, pengrajin berbasis bahan lokal, atau pengelola homestay ramah lingkungan. Selain itu, ekowisata juga menjadi sarana untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan menyediakan pasar untuk produk-produk lokal seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan jasa wisata berbasis komunitas.²²⁶

c. Dimensi Sosial: inklusi dan pemberdayaan komunitas lokal

Dimensi sosial menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam mengimplementasikan prinsip keadilan dan inklusi sosial *green economy*.²²⁷ Ekowisata Braja Harjosari berhasil menciptakan ruang partisipasi yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan keterlibatan yang merata dari berbagai kelompok demografis. Pengelola menyatakan bahwa "perempuan aktif di pengolahan produk dan pelatihan, pemuda banyak yang jadi pemandu atau bantu promosi online. Lansia juga diajak dalam kegiatan

²²⁵ Cavagnaro, "Tourism and Water" lihat juga;; Steffen et al., "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet" lihat juga;; Dangi and Jamal, "An Integrated Approach to 'Sustainable Community-Based Tourism.'"

²²⁶ Honey, *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?*, 36.

²²⁷ Hans Hurni, Susanne Wymann Von Dach, and Anne Zimmerman, "Focus Issue: Green Economy and Livelihoods in Mountains," *Mountain Research and Development* 32, no. 2 (2012): 107–8, <https://doi.org/10.1659/mrd.3202>.

budaya dan pelestarian tradisi." Pengrajin rajut mengonfirmasi bahwa "perempuan banyak terlibat di bidang kerajinan dan kuliner, pemuda aktif di bidang pemanduan wisata dan promosi digital, dan lansia juga dilibatkan dalam pelestarian tradisi seperti cerita rakyat atau permainan anak." Pelatihan atau program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada masyarakat lokal dalam pengembangan wisata, kami bekerjasama dengan beberapa lembaga:²²⁸

“Salah satunya kami mengadakan pelatihan dan bekerja sama dengan *Non-Government Organization* dibawah naungan *Asean Centre For Biodiversity, Ecolodges Indonesia*, Latrobe University, dan Dinas Pariwisata sehingga kami mendapatkan hibah barang berupa aset seperti handuk home stay, spreng kasur, cermin untuk kamar home stay, dan list menu makanan home stay. Selanjutnya ada juga pelatihan peningkatan SDM yang diadakan oleh dinas pariwisata.”

Keunggulan model Braja Harjosari terletak pada kemampuan mengakomodasi keragaman budaya dalam satu kesatuan pengelolaan. I Wayan Toni Candra (ketua Gong Dua Ribu) menjelaskan:²²⁹ "Di desa kami, relatif terbuka. Perempuan aktif di pengolahan produk dan pelatihan, pemuda banyak yang jadi pemandu atau bantu promosi online." Dalam konteks multikultural desa yang terdiri dari suku Jawa, Bali, dan Lampung, pengelola menerapkan strategi inklusif dengan membentuk tim pengelola yang inklusif – ada perwakilan dari tiap kelompok budaya dan dusun. Setiap kegiatan wisata mempertimbangkan "keanekaragaman yang ada" dengan menampilkan berbagai tradisi seperti tari Jawa (tayub), barong dan tarian Bali, serta musik gamelan dari warga keturunan Lampung.

²²⁸ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

²²⁹ Candra, “Wawancara Seniman Budaya Bali.”

Dalam ekowisata, masyarakat lokal bukan hanya objek pembangunan, melainkan aktor utama yang harus dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa kegiatan wisata sejalan dengan nilai-nilai lokal, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian destinasi.²³⁰ Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata merupakan bentuk transparansi serta memastikan bahwa kegiatan wisata dapat selaras dengan nilai dan kebutuhan komunitas. Keterlibatan masyarakat dapat berupa keikutsertaan dalam perencanaan seperti rapat desa, pembentukan dan ikut serta dalam komite pengelolaan wisata, dan atau ikut serta dalam forum diskusi. Dalam hal ini pengelola menjelaskan bahwa kami berusaha untuk memastikan setiap kelompok masyarakat mendapatkan dampak baik dari adanya kegiatan wisata, pengelola menyatakan bahwa:²³¹

“Kami sangat menyadari bahwa Desa Braja Harjosari terdiri dari masyarakat multikultural, mayoritas bersuku Jawa, tapi juga ada suku Bali, Lampung, dan lainnya. Karena itu, sejak awal kami berkomitmen bahwa pengembangan desa wisata ini harus mencerminkan keragaman budaya lokal, bukan malah menghapusnya. Pertama, kami membentuk tim pengelola yang inklusif—ada perwakilan dari tiap kelompok budaya dan dusun. Kedua, dalam kegiatan wisata, kami sengaja memasukkan unsur budaya dari berbagai kelompok. Ketiga, kami adakan pelatihan kepada pemandu lokal agar mereka bisa menjelaskan sejarah dan nilai-nilai dari tiap tradisi secara berimbang. Tidak ada yang ditonjolkan secara berlebihan. Semua mendapat tempat.”

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa pengelola wisata selalu melibatkan masyarakat lokal dari mengambil keputusan sampai

²³⁰ Wearing and Neil, *Ecotourism: Impacts, Potentials, and Possibilities?*, 36.

²³¹ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

mengadakan pelatihan yang mencakup aspek teknis (pengemasan produk, manajemen usaha), sosial (*hospitality, cultural exchange*), dan lingkungan (konservasi, *sustainable practices*). Maka dalam hal ini Ekowisata memperkuat nilai-nilai tradisional gotong royong. Linda menyatakan:²³² "Kami biasa berbagi bahan atau alat jika ada anggota yang kekurangan. Juga saling bantu saat ada pesanan besar atau pameran. Bahkan dalam kegiatan non-usaha seperti bersih lingkungan atau hajatan, semangat gotong royong tetap kuat."

Kemudian dalam memastikan segala manfaat dapat seimbang dengan lintas sektor (ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan) secara bersamaan, pengelola menerapkan strategi:

"Strategi yang kami terapkan dalam memastikan agar semua lintas sektor seimbang adalah menggunakan pendekatan terpadu dan berlapis. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus saling kait—baru bisa jadi desa wisata yang benar-benar berkelanjutan. Dalam praktiknya, strategi pengelolaan desa wisata kami memang dirancang agar manfaatnya tidak hanya di satu sektor, tapi bisa dirasakan secara lintas sektor—baik ekonomi, sosial, maupun budaya—secara bersamaan dan berkelanjutan. Misal seperti sektor ekonomi dari semua kegiatan wisata diarahkan untuk memberi pemasukan langsung kepada warga. Secara sosial, kami menjadikan desa wisata sebagai ruang bersama yang memperkuat gotong royong. Sementara dalam aspek budaya, kami sadar bahwa wisata bisa jadi sarana pelestarian. Banyak kesenian dan tradisi yang awalnya mulai dilupakan, kini mulai dihidupkan kembali karena jadi bagian dari atraksi wisata.

Inklusivitas menjadi indikator kunci dalam dimensi sosial, di mana kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat perlu dilibatkan dan diberikan akses yang adil terhadap manfaat ekowisata. Praktik *green economy* menolak eksploitasi dan

²³² Linda, "Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut."

ketimpangan, dan sebaliknya, mendorong redistribusi manfaat yang adil dan penguatan kapasitas sosial. Oleh karena itu, dimensi ini memiliki peran sentral dalam menciptakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya wisata.²³³

d. Dimensi kelembagaan: Transparansi, Kolaboratif, dan Adaptif

Dimensi kelembagaan mencerminkan implementasi prinsip *Good Governance* yang juga menjadi salah bagian penting dari prinsip *green economy*.²³⁴ Dengan menerapkan struktur kelembagaan yang dikembangkan bersifat partisipatif, transparan, dan adaptif. Pengelola desa wisata menerapkan musyawarah rutin setiap sebulan sekali yang melibatkan para anggota koperasi dan para masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata. Mekanisme ini membahas perkembangan, target-target ke depannya, dan melakukan evaluasi kegiatan.²³⁵ Semua pelaku usaha lokal mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Peternak lebah menyatakan bahwa "suara kami sebagai pelaku usaha kecil didengar, bahkan pernah diminta buat jadi percontohan."²³⁶ Kemudian dalam memastikan transparansi dan sejauh mana kebijakan yang diterapkan bersifat partisipatif kepada masyarakat, pengelola mengatakan:²³⁷

“Kebijakan di Desa Wisata Braja Harjosari diterapkan secara partisipatif dan transparan. Semua pemangku kepentingan dilibatkan melalui musyawarah desa dan informasi keuangan itu

²³³ Scheyvens and Scheyvens, “Ecotourism and the Empowerment of Local Communities Ecotourism and the Empowerment of Local Communities,” 247.

²³⁴ Murniningtyas, *Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Development Strategic Initiatives)*, 21.

²³⁵ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

²³⁶ Paryanto, “Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng”; Linda, “Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut”; Candra, “Wawancara Seniman Budaya Bali.”

²³⁷ Susandi, “Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara.”

kita sampaikan serta sepakati bersama seperti kesepakatan harga dan pembagian hasil antara pengelola koperasi dengan masyarakat yang memiliki destinasi wisata, dengan besaran 15% masuk koperasi sebagai kas dan 85% masuk ke pemilik destinasi wisata. Semua program disampaikan secara terbuka lewat musyawarah beresama, hal ini memastikan setiap keputusan mencerminkan aspirasi masyarakat dan berjalan secara adil serta akuntabel.”

Selanjutnya dalam memperluas jejaring, pengelola wisata menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya hasil penelitian mengungkap jejaring kemitraan yang kompleks dan multi-level. Pengelola berkoordinasi dengan "koperasi wisata alam gajah sejahtera yang dimiliki oleh pihak Taman Nasional Way Kambas," berkolaborasi dengan ecolodges Indonesia untuk membantu mempromosikan wisata Braja Harjosari ke mancanegara, dan bermitra dengan La Trobe University untuk penelitian dan pengembangan serta memberikan pendampingan dalam penyusunan SOP wisata berbasis konservasi, pelatihan pemandu lokal, hingga evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan wisata.²³⁸ Pengelola menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap fasilitas yang ada dan aktif meminta umpan balik langsung dari wisatawan lewat buku tamu atau survei singkat. Transparansi juga tercermin dalam keterbukaan mengakui tantangan, seperti masalah pengelolaan sampah.

Model kemitraan ini sejalan dengan penelitian tentang Community-Based Tourism di Penglipuran Village yang menunjukkan bahwa dukungan eksternal dalam bentuk regulasi, pemasaran, pelatihan, riset, dan sumber daya berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan

²³⁸ Susandi.

Community-Based Tourism.²³⁹ Bahkan jika dilihat menggunakan sudut pandang komparatif menggunakan sistem *Best Practices Internasional* dengan kasus *Community-Based Tourism* lainnya menunjukkan bahwa Ekowisata Braja Harjosari memiliki karakteristik unggul dalam hal integrasi budaya multietnis dan kedekatan dengan kawasan konservasi nasional. Penelitian di Pentingsari Village²⁴⁰ menunjukkan bahwa *self-organization* dan *self-sustainability* menjadi kunci keberhasilan ekowisata berbasis komunitas. Braja Harjosari menunjukkan kedua karakteristik ini melalui kemampuan masyarakat mengorganisir diri dalam sistem paket wisata terintegrasi dan menjaga sustainability melalui rotasi aktivitas wisata.

Analisis di atas menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara ketiga pilar green economy dengan pilar kelembagaan, seperti peternak lebah menggambarkan konvergensi ini dengan pernyataan: Kalau lingkungan terjaga, lebah sehat dan hasil madu baik. Kalau produk baik, penghasilan kami naik. Kalau ekonomi warga membaik, otomatis kehidupan sosial juga harmonis. Seniman budaya Bali menambahkan perspektif yang sama: Kalau lingkungan bersih dan asri, wisatawan datang dengan nyaman. Kalau ada tamu, kami bisa berkarya dan menambah penghasilan dan kalau semua warga ikut merasakan manfaat, otomatis hubungan sosial jadi lebih harmonis. Ekowisata di Braja Harjosari berfungsi sebagai katalisasi yang mengintegrasikan konservasi, pemberdayaan ekonomi, kohesi sosial, dan transparansi lembaga.

²³⁹ Adrian Agoes, Sely Gustini, and Haikal Alma Nadhira, "Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Penglipuran," *Manajemen Dan Pariwisata* 2, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.32659/jmp.v2i1.250>.

²⁴⁰ Gina - Lestari, "Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 2 (2016): 137, <https://doi.org/10.22146/jkn.17302>.

Model ini menciptakan insentif ekonomi untuk pelestarian lingkungan sambil memperkuat ikatan sosial melalui kolaborasi dalam kegiatan wisata sehingga masyarakat Braja Harjosari dapat mengembangkan inovasi lokal yang sesuai dengan konteks geografis dan sosial budaya mereka. Penggunaan dermaga untuk mitigasi konflik gajah sambil mendukung wisata susur sungai adalah contoh inovasi yang menggabungkan fungsi konservasi dan ekonomi. Selanjutnya kunci keberhasilan utama terletak pada kemampuan mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi modern, menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, dan membangun tata kelola yang partisipatif. Model Braja Harjosari dapat menjadi rujukan replikasi untuk pengembangan ekowisata berbasis green economy di kawasan penyangga taman nasional lainnya di Indonesia, dengan adaptasi sesuai spesifik kondisi lokal. Sehingga temuan dalam penelitian ini adalah:

1. Harmoni Ekologi–Ekonomi: Masyarakat berhasil menciptakan model bisnis yang tidak eksploitatif terhadap sumber daya alam, seperti yang ditunjukkan oleh peternak lebah yang mengikuti siklus alami produksi dan pengrajin yang menggunakan bahan lokal ramah lingkungan.
2. Inklusivitas Sosial: Partisipasi lintas demografis (perempuan, pemuda, lansia) dan lintas budaya (Jawa, Bali, Lampung) menciptakan model pembangunan yang tidak meninggalkan kelompok masyarakat manapun.
3. Inovasi Berkelanjutan: Solusi lokal seperti rotasi aktivitas wisata dan diversifikasi fungsi fasilitas menunjukkan kemampuan adaptasi komunitas terhadap prinsip-prinsip green economy.

4. Tata Kelola Partisipatif: Mekanisme musyawarah rutin dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan mencerminkan demokrasi lingkungan yang sehat.

Implementasi green economy di Desa Wisata Braja Harjosari menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dapat menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan kohesi sosial. Keberhasilan ini didukung oleh tata kelola partisipatif, jejaring kemitraan yang kuat, dan inovasi lokal yang kontekstual. Model ini membuktikan bahwa green economy bukan hanya konsep teoretis, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis dalam konteks masyarakat lokal dengan hasil yang terukur dalam peningkatan kesejahteraan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan harmoni sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan analisis mendalam tentang implementasi green economy di Desa Wisata Braja Harjosari melalui empat dimensi utama yang menunjukkan bahwa Desa Wisata Braja Harjosari telah berhasil mengimplementasikan konsep green economy melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

G. Konsep Green Economy dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari Perspektif Islam

Green economy merupakan konsep yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Selaras dengan laporan *United Nations Environment Programme* yang mendefinisikan sebagai suatu model yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan

sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.²⁴¹ Melihat konsep tersebut, green economy sangat selaras dengan adanya tantangan global seperti perubahan iklim yang sangat signifikan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan kerusakan polusi.

Apabila dilihat dengan sudut pandang agama, pada dasarnya seluruh agama telah mengajarkan kita untuk saling menjaga hubungan tersebut dengan baik. Karena hubungan antaranya keduanya bersifat komprehensif, dari segi bagaimana manusia berperilaku terhadap alam dan lingkungan, bahkan secara tegas hubungan manusia dan alam harus terjalin secara harmonis demi terjalannya kehidupan yang berkesinambungan. Dari sudut pandang Islam, alam merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, artinya Allah menciptakan alam dengan sangat kompleks dan luas.²⁴²

Pada konteks hubungan manusia dan alam saat ini, ekologis tidak lagi harmonis dan sehubungan dengan krisis lingkungan yang terjadi, Allah telah memperingatkan manusia tentang kerusakan dan efek yang akan timbul. Salah satunya adalah pada Surah al-Baqarah ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu sebagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu

²⁴¹ UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Proverty Education*.

²⁴² Muhaimin, *Membangun Kecerdasan Ekologis (Model Pendidikan Untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis)*, 20.

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 22)

Merujuk pada ayat tersebut, Allah mempersilahkan manusia untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama dan tidak mengakibatkan kerusakan alam yang dapat merugikan segalanya. Melihat dengan sudut pandang luas, kemaslahatan alam meliputi sisi alam, sosial, ekonomi, identitas atau budaya, dan teologi. Maka dari itu urgensi alam tidak hanya dipahami dengan perspektif antroposentris atau hanya kepentingan manusia semata, melainkan relasi alam, manusia, dan tuhan juga harus dijaga dengan baik.²⁴³ Maka dari itu, Islam berpandangan bahwa alam tidak diposisikan sebagai benda mati atau ekonomi (*capital*) yang dapat diperjual belikan, jika alam dirusak secara fisik maupun sosial dan ekologiannya maka kerusakan akan menjadi kehancuran (konflik, kesenjangan, kemiskinan, dan hilangnya ragam hayati).²⁴⁴

Kemudian terkait kerusakan alam pada masa saat ini, konsep *green economy* yang dirancang untuk pembangunan. Secara ekonomi islam Wiharja *et.al* berpendapat bahwa konsep ekonomi islam dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting untuk diterapkan²⁴⁵

²⁴³ Brahma Adhi and Hasan Basri Nata Manggala, *Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya* (Bandung: Bandar Maju, 2002), 57.

²⁴⁴ Karl Polanyi, *Transformasi Besar Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 222.

²⁴⁵ Jana Wiharja, Rizqi Ramdani, and Ridla Mutiah, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Sumberdaya Insani Terhadap Ekonomi Bangsa,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 2, no. 1 (2023): 10–23, <https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62> penelitian serupa juga dilakukan oleh; Rizky Estu Handayani and Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional,” *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)* 2, no. 2 (2021): 58–73; Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 29–40, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>.

dalam beberapa masalah seperti mensejahterakan masyarakat miskin.²⁴⁶ Mengenai hal permasalahan tersebut, hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah kebijakan pendistribusian harus terlaksana dan terpenuhi secara optimal.²⁴⁷ Maka dari itu membangun ekonomi yang kuat²⁴⁸ dan menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.²⁴⁹

Merujuk pada pemaparan di atas yang menunjukkan keselarasan konsep *green economy* dengan ekonomi islam yang dapat menjadi suatu solusi konsep dalam membangun perekonomian yang memperhatikan sosial dan lingkungan. Kemudian apabila pilar *green economy* ditinjau melalui perspektif islam, seperti berikut dibawah ini deskriptif mengenai ketiga tinjauan tersebut:

a. Prinsip Tauhid: Kesadaran Bahwa Alam adalah Milik Allah

Dari sudut pandang *green economy*, prinsip ini menghasilkan paradigma baru dalam memandang alam—bukan sebagai objek konsumsi semata, melainkan sebagai entitas yang sakral dan harus dihormati. Ketika manusia menyadari bahwa mereka bukan pemilik tetapi pengelola, maka akan tumbuh rasa tanggung jawab spiritual untuk tidak melakukan kerusakan (*fasad*) atau pemborosan (*israf*), sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-A'raf: 31: "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*"

²⁴⁶ Marabona Munthe, "Pembangunan Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah," *Jurnal Madania* 3, no. 1 (2013): 92–111.

²⁴⁷ Nael Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal* 8, no. 2 (2016): 491–508.

²⁴⁸ Fei Zou et al., "Natural Resources and Green Economic Recovery in Responsible Investments: Role of ESG in Context of Islamic Sustainable Investments," *Resources Policy* 86, no. June (2023): 104195, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104195>.

²⁴⁹ Bambang Suhada and Dharma Setyawan, "Narasi Islam Dan Green Economics Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *Kontekstualita* 31, no. 1 (2016): 21–36.

Tauhid dalam konteks ini selaras dengan pilar ekonomi yang harus tetap menjaga keseimbangan alam, beberapa bidang kajian yang menyebutkan hal terpenting dalam perekonomian adalah bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan yang lain dapat dianggap sebagai normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosio ekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, lalu pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup.²⁵⁰ Praktik ini menunjukkan kesadaran akan tauhid ekologis—bahwa alam bukan untuk dieksploitasi melainkan dikagumi dan dimaknai, pernyataan tersebut juga tercerminkan dalam kegiatan wisata yang dilakukan oleh para pemilik destinasi wisata seperti pengelola edukasi madu lebah lanceng yang memiliki Kesadaran tersebut juga tampak dari usaha peternakan lebah lanceng yang hanya memproduksi madu sesuai musim tanpa paksaan terhadap alam, mencerminkan prinsip *al-tawhid* yang menuntut ketundukan terhadap sunnatullah (hukum alam Allah).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat.²⁵¹ motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat alturistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas

²⁵⁰ Umer Chapra, *Islamic and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 13–14.

²⁵¹ Yusuf Al-Qardawi, *Ri'āyat Al-Bī'ah Fī Sharī'at Al-Islām* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), 51.

sebagaimana tujuan ajaran Islam yaitu *falah* didunia dan akhirat.²⁵² Kemudian prinsip-prinsip produksi merupakan pedoman yang harus diperhatikan dalam suatu kegiatan produksi, berikut dibawah ini prinsip-prinsip produksi dalam islam, seperti memperhatikan etika-etika yang dapat memberikan dampak baik secara menyeluruh dari segi sistem produksinya dan efek yang dihasilkan dari produksi tersebut. dalam hal ini syariat melarang memproduksi yang dapat merusak akidah, etika, dan moral manusia.²⁵³

Prinsip Tauhid menekankan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Allah dan manusia hanyalah pemelihara (QS. Al-Baqarah: 30). Pada praktiknya ekowisata Desa Braja Harjosari, kesadaran ini tercermin dari kebijakan tidak membangun secara masif di kawasan savana atau titik-titik alam terbuka. Pengelola memandang kawasan tersebut bukan sebagai properti yang bisa dieksploitasi, melainkan sebagai titipan yang harus dijaga dan dihormati. Tidak adanya pembangunan permanen pada spot wisata seperti "sunset view" mencerminkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab kepada Tuhan, bahwa keindahan alam adalah anugerah yang harus dinikmati tanpa merusak. Selain itu, upaya konservasi yang dilakukan melalui edukasi kepada wisatawan (storytelling tentang gajah, flora, dan sejarah desa) menunjukkan bahwa ekowisata dipandang sebagai media dakwah ekologis—penyampaian nilai bahwa menjaga alam adalah bagian dari keimanan.²⁵⁴

²⁵² Mabarroh Azizah and Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 237, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>.

²⁵³ Yusuf Qarhawi et al., *Norma Dan Etika Ekonomi Islam / Dr. Yusuf Qardhawi ; Penerjemah, Zainal Arifin Lc., Dra. Dahlia Husein*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

²⁵⁴ Fazlun M Khalid, "Islam and the Environment," *Social And Economic Dimensions Of Global Environmental Change* Vol 5 (2002): 332–39.

b. Prinsip Mizan: Keseimbangan Ekologis dan Sosial

Kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu membutuhkan kemitraan dengan berbagai stakeholder guna menjamin terjadinya pembangunan yang sinergis baik antara kekuatan politik, kekuatan ekonomi (sektor swasta) serta kekuatan moral dari masyarakat.²⁵⁵ Membangun komunikasi pada stakeholder merupakan langkah awal yang penting, sebelum melaksanakan tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya, seperti: tahap pengapaspitasan, pengorganisasian sumber daya maupun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan komunikasi stakeholders akan menjamin adanya pemahaman tujuan bersama antarpara stakeholder dan menghindarkan konflik-konflik antar pemangku kepentingan semenjak awal sebelum usaha pengapaspitasan masyarakat dilaksanakan.

Konsep *mizan* dalam Islam berarti keseimbangan, baik dalam pemanfaatan sumber daya maupun dalam relasi antarmanusia.²⁵⁶ Hal ini tampak dalam strategi rotasi aktivitas wisata yang diterapkan untuk menghindari tekanan berlebihan pada alam. Misalnya, jalur susur sungai dan trekking satwa tidak dibuka setiap hari, sehingga alam mendapat waktu pulih dan pengunjung tetap mendapatkan edukasi. hal Ini mencerminkan implementasi prinsip *carrying capacity* yang selaras dengan mizan. Prinsip ini juga terlihat dalam usaha kerajinan yang menggunakan benang alami, serta pola konsumsi energi yang hemat (ventilasi alami, rumah panggung, cahaya matahari). Masyarakat di sana telah menerapkan apa yang dalam Islam dikenal sebagai qana'ah

²⁵⁵ I Wayan Mudana, *Sosiologi Antropologi Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 41.

²⁵⁶ Zubair Hasan, "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications and Policy Concerns," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 19, no. 1 (2006): 3–18, <https://doi.org/10.4197/islec.19-1.1>.

ekologis—kepuasan atas kebutuhan yang cukup, bukan berlebih. Selain itu, melarang pengunjung membawa makanan yang dapat menyebabkan sampah yang berlebih dengan cara pengelola menyediakan wadah air minum, makanan, serta membawa galon untuk cadangan air muni, kemudian usaha pengomposan sampah organik dan penghindaran plastik menunjukkan penerapan keseimbangan ekologis dalam produksi dan konsumsi.

Dari sisi sosial, mizan tampak dalam pelibatan lintas budaya (Jawa, Bali, Lampung) dalam semua agenda wisata. Tidak ada satu budaya yang mendominasi. Pertunjukan budaya seperti tari tayub (Jawa), gamolan (Lampung), dan Gong Dua Ribu (Bali) dibingkai secara adil dan setara, menciptakan ruang harmoni antarkelompok. Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain. Kebanyakan objek pariwisata Indonesia masih mengandalkan atraksi, sementara dari segi akses dan amenitis tidak memadai. Dalam muamalah disebut dengan asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan sebagai muamalah. Asas muamalah terdiri dari:²⁵⁷ asas *'adalah* (keadilan), asas *Mu'awanah* (tolong menolong), asas *musyarakah* (kerjasama), asas *manfaah* (*tabdulul munafi'*), asas *antaradhin* (suka sama suka), asas *adamul gharar*, kebebasan membuat akad, asas *al-musawah* (kesetaraan), asas *shiddiq* (kejujuran).

Dalam ekowisata, mizan diimplementasikan melalui pengelolaan ruang yang memperhatikan *carrying capacity*, pembangunan yang selaras dengan kontur dan vegetasi alami, serta pembatasan aktivitas

²⁵⁷ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Penelitian Dan Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2018).

pariwisata agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini juga mencakup aspek spiritual, di mana manusia menjaga ketenteraman batin (sakinah), tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keseimbangan hati, jiwa, dan lingkungan. Prinsip *hablum minallah* (hubungan vertikal dengan Allah), *hablum minannas* (hubungan horizontal dengan manusia), dan *hablum minal alam* (hubungan dengan alam) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya membentuk sistem etika lingkungan Islam yang menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan ekosistemnya.

c. Prinsip Khalifah: Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Pengelolaan

Sebagai khalifah fil ardh, manusia bertugas mengelola bumi secara bijak. Pengelolaan wisata di Braja Harjosari mengedepankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan destinasi. Semua layanan wisata (homestay, kuliner, pemandu, pertunjukan) dijalankan oleh warga desa, bukan pihak luar. Contohnya, dalam pengelolaan usaha madu lebah lanceng, pemilik tidak memaksa produksi berlebih, melainkan mengikuti musim dan daya dukung lingkungan. Di sini prinsip khalifah diwujudkan dalam produksi lestari, menjaga kelestarian ekosistem demi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan jangka panjang.

Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini

diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak.²⁵⁸ Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

Pendekatan tersebut juga tampak dalam penyesuaian bahan bangunan dan gaya arsitektur rumah—banyak rumah yang masih berbentuk rumah panggung dengan ventilasi alami, sebagai wujud pengelolaan energi secara bijak. Khilafah menunjukkan peran manusia sebagai khalifah (wakil Allah) di bumi yang bertugas menjaga, merawat, dan melestarikan alam demi kemaslahatan bersama.²⁵⁹ Sebagai khalifah, manusia harus bersikap proaktif dalam melindungi sumber daya, memastikan keberlanjutan, dan mewariskan bumi dalam kondisi baik kepada generasi selanjutnya.

Kemudian dalam hal menjaga terdapat prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam, dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain.²⁶⁰ Sehingga manusia perlu menggunakan pengetahuan, teknologi, dan kebijakannya untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis bumi. Dalam ekonomi Islam, ini mencerminkan prinsip kepemimpinan yang transformatif, kolektif, dan berorientasi maslahat. Kepemimpinan

²⁵⁸ rabiah z. Harahap, “Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2015): 1–13.

²⁵⁹ Arthur Saniotis, “Muslims and Ecology: Fostering Islamic Environmental Ethics,” *Contemporary Islam* 6, no. 2 (2012): 155–71, <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>.

²⁶⁰ Ahmad Suhendra, “Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur’an,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2013): 61–82, <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750> lebih lanjut baca juga; Harahap, “Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup.”

ekologis tampak dalam keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan, evaluasi, hingga pelatihan lintas sektor. Semua warga—baik pemuda, perempuan, maupun lansia—diberdayakan melalui kegiatan wisata dan pelestarian budaya secara adil. Praktik ini sejalan dengan nilai tanggung jawab sosial²⁶¹ dan ukhuwah²⁶² (persaudaraan) dalam Islam. Setiap warga diberikan hak dan peran sesuai kapasitasnya, sejalan dengan prinsip *musawah* (kesetaraan) dan *amanah* (tanggung jawab moral).

d. Prinsip Amanah: Tanggung Jawab Etis sosial dan Moral terhadap Alam

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, amanah meliputi dimensi tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Manusia dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan, yang mencakup transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan integritas. Amanah bukan hanya tentang tidak merusak, tetapi juga aktif memperbaiki dan merestorasi.

Prinsip amanah tampak dalam cara pengelola desa wisata memanfaatkan sumber daya dengan tanggung jawab. Tidak hanya kepada alam, tetapi juga kepada sesama. Dalam sistem distribusi ekonomi, ada kejelasan dan transparansi, misalnya pembagian hasil 85% untuk pemilik destinasi dan 15% untuk koperasi. Ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan akuntabilitas. Hal ini

²⁶¹ Rafik I. Beekun and Jamal A. Badawi, “Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective,” *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–45, <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>.

²⁶² Ismail A. G and Zain M. Y., “Islamic Economics and Social Justice,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol 9, no. 3 (2016): 406–419.

mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam Islam (*mas'uliyah*).²⁶³ Kegiatan pelatihan kepada masyarakat juga merupakan bentuk amanah terhadap pembangunan kapasitas manusia (*insani capital*). Para pelaku ekonomi lokal (seperti pengrajin, peternak, dan pelaku seni) mendapatkan pelatihan manajemen, pemasaran, dan konservasi, yang memperkuat daya tahan ekonomi dan spiritual mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memikul amanah pelestarian bumi.

Amanah adalah kepercayaan dari Allah untuk menjaga bumi dengan integritas. Amanah menuntut kejujuran, akuntabilitas sosial, dan keberpihakan kepada keadilan.²⁶⁴ Pengelolaan wisata di Braja Harjosari dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Dana konservasi, pembagian hasil wisata, hingga keputusan strategis dilakukan melalui musyawarah rutin. Semua program disampaikan secara terbuka lewat musyawarah bersama, hal ini memastikan setiap keputusan mencerminkan aspirasi masyarakat. Selain itu, sistem paket wisata yang melibatkan semua unsur warga mencerminkan distribusi manfaat yang adil, memperkuat prinsip *amanah* dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi.

Kelembagaan ekowisata desa Braja Harjosari juga menerapkan prinsip *transparansi* dan *partisipasi aktif*.²⁶⁵ Ada musyawarah bulanan yang melibatkan semua stakeholder, termasuk pengurus koperasi, masyarakat pemilik destinasi, dan lembaga konservasi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu membutuhkan kemitraan dengan

²⁶³ Fahmi Ali Hudaefi and K Noordin, "Integrating Waqf into the Islamic Financial Sector: The Role of Governance and Shariah Compliance," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 1, no. 3 (2019).

²⁶⁴ Nur Zainal Abidin, "Environmental Management from Islamic Perspective," *International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering* Vol 7, no. 6 (2013).

²⁶⁵ Muhammad Arif, "Etika Kepemimpinan Islam Dan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Kepemimpinan Islam* Vol 4, no. 2 (2019): 155–169.

berbagai stakeholder guna menjamin terjadinya pembangunan yang sinergis baik antara kekuatan politik, kekuatan ekonomi (sektor swasta) serta kekuatan moral dari masyarakat.²⁶⁶ Hal ini tercermin pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola ekowisata Braja Harjosari selalu melakukan musyawaran dalam setiap pengambilan keputusan operasional maupun keuangan yang kemudian dapat disepakati bersama. Hubungan koordinatif dengan lembaga luar seperti Taman Nasional dan *Non-Government Organization* dibawah naungan *Asean Centre for Biodiversity, Ecolodges Indonesia*, Latrobe University, dan Dinas Pariwisata yang juga memperlihatkan prinsip kolaboratif yang kuat. Dalam Islam, musyawarah (syura) adalah bagian dari tata kelola yang baik dan adil (QS. Asy-Syura: 38). Transparansi dalam pelaporan dan partisipasi semua kelompok adalah cerminan dari prinsip *amanah* dan *hisbah* (pengawasan sosial).

Kemudian pada dasarnya seluruh agama telah mengajarkan kita untuk saling menjaga hubungan tersebut dengan baik. Karena hubungan antaranya keduanya bersifat komprehensif, dari segi bagaimana manusia berperilaku terhadap alam dan lingkungan, bahkan secara tegas hubungan manusia dan alam harus terjalin secara harmonis demi terjalinnya kehidupan yang berkesinambungan. Apabila dilihat dari sudut pandang Islam, alam merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan segala isinya, artinya Allah menciptakan alam dengan sangat kompleks dan luas.²⁶⁷

Penerapan prinsip-prinsip green economy dalam perspektif Islam di Braja Harjosari tidak hanya terwujud dalam praktik ekologis, tetapi juga mengalir dalam cara berpikir kolektif masyarakat tentang

²⁶⁶ Mudana, *Sosiologi Antropologi Pembangunan*, 41.

²⁶⁷ Muhaimin, *Membangun Kecerdasan Ekologis (Model Pendidikan Untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis)*, 20.

keseimbangan (mizan), tanggung jawab spiritual (tauhid), kepemimpinan ekologis (khilafah), dan tanggung jawab sosial (amanah). Keseluruhan model ini mengarah pada konsep ekowisata berbasis nilai-nilai Islam, yang tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga merawat hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Braja Harjosari telah mengimplementasikan prinsip *green economy* secara holistik melalui pendekatan ekowisata berbasis masyarakat dalam menciptakan sinergis dalam sistem pariwisata yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga inklusif secara ekonomi dan partisipatif secara sosial.

Kemudian dalam perspektif Islam, penerapan tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip Tauhid, Mizan, Khilafah, dan Amanah. Pada dimensi ekonomi, penerapan sistem paket wisata terintegrasi yang melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal menunjukkan upaya memberdayakan masyarakat secara adil dan merata. Strategi ini mencerminkan prinsip *Khilafah* dalam bentuk tanggung jawab pengelolaan yang etis serta prinsip keadilan distribusi sumber daya. Penguatan ekonomi lokal dilakukan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kualitas produk.

Dengan demikian, penerapan *green economy* di Desa Wisata Braja Harjosari bukan hanya berhasil dalam aspek praktis pengelolaan pariwisata, tetapi juga memperlihatkan konvergensi nilai-nilai keberlanjutan modern dengan ajaran Islam. Model ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ekowisata berbasis

komunitas dan nilai spiritual di kawasan penyangga taman nasional lainnya di Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Pengelolaan Limbah Berkelanjutan

Pengelola wisata perlu mengembangkan sistem pengelolaan sampah organik dan non-organik yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas daur ulang dan pelatihan masyarakat tentang pemilahan sampah. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam manajemen limbah menjadi kebutuhan mendesak.

2. Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Hijau

Perlu adanya upaya formal dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) berbasis prinsip *green economy* dan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan, menjaga kualitas layanan, serta menjadi daya saing desa wisata secara nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G, Ismail, and Zain M. Y. "Islamic Economics and Social Justice." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol 9, no. 3 (2016): 406–419.
- Abidin, Nur Zainal. "Environmental Management from Islamic Perspective." *International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering* Vol 7, no. 6 (2013).
- Adhi, Brahma, and Hasan Basri Nata Manggala. *Reformasi Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama, Dan Budaya*. Bandung: Bandar Maju, 2002.
- Agoes, Adrian, Sely Gustini, and Haikal Alma Nadhira. "Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Penglipuran." *Manajemen Dan Pariwisata* 2, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.32659/jmp.v2i1.250>.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Ri'Āyat Al-Bī'Ah Fī Sharī'at Al-Islām*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2000.
- Antasari, Dewi Wungkus. "Implementing Green Economy to Green GrImplementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediriowth in Kediri City." *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 5, no. 2 (2020): 80–88.
- Arif, Muhammad. "Etika Kepemimpinan Islam Dan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Kepemimpinan Islam* Vol 4, no. 2 (2019): 155–169.
- Azizah, Mabarroh, and Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>.
- Bappenas. *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)*. Jakarta: Direktorat Lingkungan Hidup, 2013.

<https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20180613170950.pdf>.

———. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2025*. Jakarta: Bappenas, 2021.

Beekun, Rafik I., and Jamal A. Badawi. “Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective.” *Journal of Business Ethics* 60, no. 2 (2005): 131–45. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>.

Borel-Saladin, Jacqueline Madeleine, and Ivan Nicholas Turok. “The Green Economy: Incremental Change or Transformation?” *Environmental Policy and Governance* 23, no. 4 (2013): 209–20. <https://doi.org/10.1002/eet.1614>.

Bramwell, Bill. “Governance, the State and Sustainable Tourism: A Political Economy Approach.” *Journal of Sustainable Tourism* 19, no. 4–5 (2011): 459–77. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>.

Buckley, Rafl. *Ecotourism: Principles and Practices*. Boston: Cabi Tourism Texts, 2009.

Candra, I wayan Toni. “Wawancara Seniman Budaya Bali.” Braja Harjosari, 2025.

Catatan Lapangan Peneliti. *Observasi*. Gazebo Area Ekowisata Braja Harjosari, 2025.

———. *Observasi*. Area Ekowisata Braja Harjosari, 2025.

Cavagnaro, Dr Elena. “Tourism and Water.” *Journal of Tourism Futures* 3, no. 1 (2017): 81–82. <https://doi.org/10.1108/JTF-11-2016-0046>.

Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Colin Michael, Hall. *Tourism Planning: Policies, Processes, and Relationships*. Britania: Pearson, 2007.

Danamik, Janianton, and HF Weber. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM,

2006.

- Dangi, Tek B., and Tazim Jamal. "An Integrated Approach to 'Sustainable Community-Based Tourism.'" *Sustainability (Switzerland)* 8, no. 5 (2016). <https://doi.org/10.3390/su8050475>.
- Djajadiningrat, Surna Tjahja, and Sutanto Hardjolukito. *Demi Bumi, Demi Kita: Dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau*. Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2013.
- Eagles, Paul F J, and Stephen F Mccool. *Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management*. Glan: IUCN Publications, 2002.
- Harahap, rabiah z. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2015): 1–13.
- Hasan, Zubair. "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications and Policy Concerns." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 19, no. 1 (2006): 3–18. <https://doi.org/10.4197/islec.19-1.1>.
- Hernowo. *Green Economics, Tren Emisi Gas Rumah Kaca, Dan Perubahan Iklim Di Indonesia*. Bandung: Materi Diklat Non Gelar, 2011.
- Honey, Martha. *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Washington DC: Island Press, 2008.
- Hudaefi, Fahmi Ali, and K Noordin. "Integrating Waqf into the Islamic Financial Sector: The Role of Governance and Shariah Compliance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol 1, no. 3 (2019).
- Humas Polda Lampung. "Insiden 301 Ha Hutan Konservasi Way Kambas Terbakar Kuat Diduga Ulah Manusia." *Tribatanews.Lampung.Polri.Go.Id*, March 21, 2024. <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/insiden-301-ha-hutan-konservasi-way-kambas-terbakar-kuat-diduga-ulah-manusia#carouselExampleIndicators>.

- Hurni, Hans, Susanne Wymann Von Dach, and Anne Zimmermann. "Focus Issue: Green Economy and Livelihoods in Mountains." *Mountain Research and Development* 32, no. 2 (2012): 107–8. <https://doi.org/10.1659/mrd.3202>.
- ITIES. "What Is Ecotourism?" *The International Ecotourism Society*, 2015. <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Surat Penawaran Diklat Green Economy Nomor 0317/P.01/01/2013." Jakarta, 2013.
- Kementerian PPN/Bappenas. "Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia." *Bappenas*, 2020.
- Khalid, Fazlun M. "Islam and the Environment." *Social And Economic Dimensions Of Global Environmental Change Vol 5* (2002): 332–39.
- Lestari, Gina -. "Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 22, no. 2 (2016): 137. <https://doi.org/10.22146/jkn.17302>.
- Linda. "Wawancara Ketua Kelompok Kerajinan Rajut." Braja Harjosari, 2025.
- Madusari, Beny Diah, Fauzan, Anwar, Hijriwati, and Siti As'adah. *Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemampuan Kewirausahaan Dengan Konsep Ekowisata Di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan*. Semarang: FLIPMAS, 2012.
- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Al Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, and Aas Nurasyiah. *Pembangunan Ekonomi Islam*. Ed 1. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2023.

- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mudana, I Wayan. *Sosiologi Antropologi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Muhaimin. *Membangun Kecerdasan Ekologis (Model Pendidikan Untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis)*. Bandung: alfabeta, 2015.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Penelitian Dan Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2018).
- Murniningtyas, Endah. *Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Development Strategic Inities)*. Jakarta: Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2014.
- Nicholas, Ryan Aditya, and Krisiandi. "Klaim Pemerintah Soal Izin Tambang Dan Sawit Di Kalsel Yang Dibantah Walhi Dan Jatam." *Kompas.Com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/09112571/klaim-pemerintah-soal-izin-tambang-dan-sawit-di-kalsel-yang-dibantah-walhi?page=all>.
- Nugraha, Ryan, Cut Risa Varlitya, Loso Judijanto, Saputra Adiwijaya, Irma Suryahani, Ina Agustini Murwani, Yunita Sopiana, et al. *Green Economy; Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*. Perama. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nugroho, Iwan. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nurlinda, Ida. "Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019).
- OECD. "Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators." *Innovation*, 2011. <https://doi.org/10.1787/9789264111318-en>.

- Paryanto. "Wawancara Pemilik Destinasi Edukasi Madu Lebah Lanceng." Braja Harjosari, 2025.
- Pemerintah Desa Braja Harjosari. *Dokumen Laporan Data Penduduk*. Lampung Timur: Pemerintah Desa, 2024.
- Piter, Amelia, A.A Istri Putera Widiastiti, and Ni Putu Isha Aprinica. "Analisis Potensi Daya Tarik Wisata Vihara Dewi Welas Asih Sebagai Wisata Religius." *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis* 2, no. 12 (2023): 2508–17. <https://doi.org/10.22334/paris.v2i12.628>.
- Polanyi, Karl. *Transformasi Besar Asal-Usul Politik Dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pujiati, Dwik. "Penerapan Pilar Green Economy Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Ngiringrejo Bojonegoro." Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Purwanto. "Internalisasi Aspek Lingkungan Ke Dalam Aspek Sosial: Peningkatan Kesadaran Dan Perubahan Pola Pikir." Bandung, 2012.
- Qarhawi, Yusuf, Zainal Arifin, Dahlia Husin, and M. Solihat. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam / Dr. Yusuf Qardhawi ; Penerjemah, Zainal Arifin Lc., Dra. Dahlia Husein*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Richins, Harold. "Environmental, Cultural, Economic and Socio-Community Sustainability: A Framework for Sustainable Tourism in Resort Destinations." *Environment, Development and Sustainability* 11, no. 4 (2009): 785–800. <https://doi.org/10.1007/s10668-008-9143-6>.
- Romeril, Michael. "Tourism and the Environment towards a Symbiotic Relationship: Introductory Paper." *International Journal of Environmental Studies* 25, no. 4 (1985): 215–18. <https://doi.org/10.1080/00207238508710228>.
- Rusiana, Dita Angga. "Jokowi Sebut Indonesia Miliki Peluang Besar Di Industri Produk Hijau." *Sindonews.Com*, 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/308878/33/jokowi-sebut-indonesia-miliki-peluang-besar-di-industri-produk-hijau->

1611205296.

- Sadali. "Harnessing Islamic Teachings for Climate Justice: Pathways for Faith-Based Environmental Action." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 143–57. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.597>.
- Saniotis, Arthur. "Muslims and Ecology: Fostering Islamic Environmental Ethics." *Contemporary Islam* 6, no. 2 (2012): 155–71. <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>.
- Santoso, Pudjio. "Respon Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Menangkap Peluang Pengembangan Pariwisata Di Bawean." *Biokultur* 5, no. 2 (2016): 262–71.
- Sari, Ayu Multika, Andy Fefta Wijaya, and Abdul Wachid. "Penerapan Konsep Green Economy Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Dusun Kungkuk , Desa Punten Kota Batu." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2012): 765–70.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta, 2014.
- Scheyvens, Regina, and Regina Scheyvens. "Ecotourism and the Empowerment of Local Communities Ecotourism and the Empowerment of Local Communities." *Tourism Management* 20, no. APRIL 1999 (2015): 245–49.
- Schmalensee, Richard. "From 'Green Growth' to Sound Policies: An Overview." *Energy Economics* 34, no. SUPPL.1 (2012): S2–6. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.041>.
- Steffen, Will, Katherine Richardson, Johan Rockström, Sarah E. Cornell, Ingo Fetzer, Elena M. Bennett, Reinette Biggs, et al. "Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet." *Science* 347, no. 6223 (2015). <https://doi.org/10.1126/science.1259855>.
- Stoddart, Hannah. "Prinsiples for The Green Economy, A Collection of Prinsiples for The Green Economy in The Context of Sustainable Development and Poverty Eradication," 2012.

- Stone, Moren Tibabo, and Gyan P. Nyaupane. "Protected Areas, Wildlife-Based Community Tourism and Community Livelihoods Dynamics: Spiraling up and down of Community Capitals." *Journal of Sustainable Tourism* 26, no. 2 (2018): 307–24. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1349774>.
- Sugiarto, Agus, Lieli Suharti, and Christantius Dwiatmadja. *Green Business (Manajemen Bisnis Berkonsep Ramah Lingkungan)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021.
- Suhendra, Ahmad. "Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur'an." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2013): 61–82. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Susandi, Waryoko. "Pengelola Ekowisata Desa Braja Harjosari, Wawancara." Braja Harjosari, 2025.
- Tim detikcom. "Fakta-Fakta Terkini Kebakaran Di TN Way Kambas Ulah Pemburu Liar." *Detiknews.Com*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6966579/fakta-fakta-terkini-kebakaran-di-tn-way-kambas-ulah-pemburu-liar>.
- Tim JAWIS ANGSANA. *Laporan Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari*. Lampung Timur: JAWIS ANGSANA, 2023.
- Uma, and Sekaran. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Education*. Kenya: United Nations Environment Programme, 2011.
- UNEP & UNWTO. *Tourism in the Green Economy-Background Report*. MAD: United Nations Environment Programme, 2012.
- United Nations Environmental Programme. "Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, PART II: Investing in Energy and Resource Efficiency, Waste." Washington DC, 2011.

- Victor, Peter A., and Tim Jackson. "A Commentary on UNEP's Green Economy Scenarios." *Ecological Economics* 77, no. 2 (2012): 11–15. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.02.028>.
- Waryoko. *Selaku Anggota Pengelola Desa Wisata Braja Harjosari*. Braja Harjosari: Wawancara, 2023.
- Wearing, Stephen, and Jhon Neil. *Ecotourism: Impacts, Potentials, and Possibilities?* Second Edi. Amsterdam ; Boston ; London : Butterworth-Heinemann: Oxford University Press, 2009.
- Zulfikar, Rizka, Prihatini Ade Mayvita, and Purboyo. *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

LAMPIRAN

A. Lampiran dokumentasi penelitian







B. Dokumentasi Pendukung



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0192/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2025
Lamp. : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.
Kepala Desa Braja Harjosari
Kecamatan Braja Sebeh
Lampung Timur

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0191/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2025, tanggal 27 Mei 2025
atas nama saudara:

Nama : Raditio Wahid
NIM : 2271040130
Semester : VI (Enam)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan
research / penelitian untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

"Konsep Green Economy untuk Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2025
Rektor

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 147210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-0191/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Raditio Wahid
NIM : 2271040130
Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan *Research / Penelitian* di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Konsep Green Economy untuk Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari.**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SHOPARI, S. Pd.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Direktur

Prof. Dr. Suhaini, S.Ag., MH.
NIP. 19721001 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BRAJA SELEBAH
DESA BRAJA HARJOSARI

Jl. Raya Desa Braja Harjosari Email: brajaharjosarilamtim@gmail.com Kode Pos: 34196

Nomor : 140/167/22/2001/2025

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Riset/Penelitian

Mahasiswa Institute Agama Islam (IAIN) Metro Pascasarjana
Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah

Yth. Dekan Fakultas Mahasiswa Institute Agama Islam (IAIN) Metro pascasarjana

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Riset/Penelitian

No. B-0192/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2025 yang kami terima pada Rabu, 11 Juni 2025 Maka kami memberikan izin Kepada Mahasiswa Institute Agama Islam (IAIN) Metro pascasarjana untuk melakukan kegiatan tersebut, adapun mahasiswa tersebut yaitu :

Nama : RADITIO WAHID

NPM : 2271040130

Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah

Judul Tesis : Konsep Green Economy Untuk Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari.

Demikian surat balasan ini kami buat dan semoga kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Braja Harjosari.

Braja Harjosari, 11 Juni 2025

Kepala Desa Braja Harjosari



SHOPARI, S.Pd.

**KONSEP *GREEN ECONOMY* UNTUK PENGELOLAAN EKOWISATA
BRAJA HARJOSARI**

Alat Pengumpul Data (APD)

1. Pertanyaan wawancara dengan pengelola Ekowisata Braja Harjosari

Tujuan: menggali bagaimana kebijakan, pengelolaan, dan penerapan prinsip *green economy* di destinasi ekowisata Braja Harjosari.

A. Dimensi Lingkungan

1. Bagaimana pengelola Braja Harjosari menyesuaikan pembangunan fasilitas wisata dengan pola aliran air, vegetasi alami, dan kontur lahan?
2. Apa langkah yang dilakukan untuk mengelola sampah organik dan non organik yang dihasilkan dari aktivitas wisata?
3. Apakah limbah makanan atau hasil samping lainnya dimanfaatkan kembali untuk keperluan lain, misalnya kompos atau pakan ternak?
4. Bagaimana pengelola melibatkan wisatawan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar kawasan Braja Harjosari?
5. Apakah terdapat kebijakan dalam penggunaan bahan bangunan lokal atau ramah lingkungan dalam pengembangan fasilitas wisata?
6. Sejauh mana desain tata ruang wisata mempertimbangkan efisiensi energi dan selaras dengan alam sekitar?

B. Dimensi Ekonomi

1. Bagaimana pengelola memastikan bahwa setiap fasilitas atau layanan wisata benar-benar memberikan nilai guna yang optimal bagi pengunjung dan warga lokal?

2. Apakah pengelola memiliki strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada tanpa melakukan eksploitasi berlebihan?
3. Bagaimana cara pengelola menentukan skala pengembangan wisata agar sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan dan potensi ekonomi lokal?
4. Apakah ada upaya untuk mengintegrasikan produk lokal (misalnya: hasil tani, kerajinan, kuliner, atau budaya) ke dalam rantai ekonomi wisata?

C. Dimensi Sosial

1. Apa bentuk pelatihan atau program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada masyarakat sekitar dalam pengembangan wisata?
2. Bagaimana pengelola memastikan bahwa kegiatan wisata juga mengakomodasi keragaman budaya dan tradisi lokal?
3. Apakah ada keterlibatan komunitas dalam menyediakan layanan wisata seperti homestay, pemandu lokal, atau pertunjukan budaya?
4. Sejauh mana strategi pengelolaan wisata mempertimbangkan manfaat lintas sektor (ekonomi, sosial, budaya) secara bersamaan?

D. Dimensi Kelembagaan

1. Apakah ada forum atau musyawarah rutin antara pengelola dan masyarakat untuk mengevaluasi atau merencanakan kegiatan wisata?
2. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan ekowisata Braja Harjosari dibentuk, dan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan?
3. Sejauh mana kebijakan yang diterapkan bersifat partisipatif dan transparan bagi semua pemangku kepentingan?
4. Bagaimana pengelola berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Taman Nasional Way Kambas, pemerintah desa, dan mitra konservasi?

2. Pertanyaan wawancara dengan masyarakat lokal dan pelaku UMKM

Tujuan: menilai dampak green economy dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan

A. Dimensi Lingkungan

1. Apakah Anda memperhatikan penggunaan bahan alami atau lokal dalam kegiatan usaha atau aktivitas sehari-hari? Bisa berikan contohnya?
2. Bagaimana cara Anda mengelola sampah rumah tangga atau usaha? Apakah ada kegiatan daur ulang atau pemanfaatan ulang?
3. Apakah tempat tinggal atau usaha Anda menyesuaikan dengan kondisi lingkungan?
4. Sejauh mana Anda merasa dilibatkan dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan di Braja Harjosari?

B. Dimensi Ekonomi

1. Apa produk atau jasa utama yang Anda hasilkan? Apakah produk tersebut memiliki nilai tambah ramah lingkungan atau khas lokal?
2. Bagaimana Anda menyesuaikan skala produksi usaha agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan pasar lokal?
3. Apakah Anda mengalami peningkatan pendapatan atau pengembangan usaha sejak adanya kegiatan ekowisata di Braja Harjosari?
4. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha terkait pengelolaan sumber daya lokal atau kewirausahaan hijau?
5. Apakah Anda bekerja sama dengan pelaku usaha lain, wisatawan, atau lembaga dalam memasarkan produk?

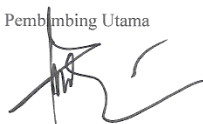
C. Dimensi Sosial

1. Apakah Anda dilibatkan dalam musyawarah atau pertemuan yang membahas pengelolaan lingkungan atau pengembangan wisata?
2. Sejauh mana Anda merasakan manfaat sosial dari kegiatan wisata dan pelestarian lingkungan yang ada?
3. Apakah Anda merasa bahwa semua kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, lansia) memiliki kesempatan yang setara dalam kegiatan ekonomi hijau?
4. Apakah kegiatan Anda dalam usaha atau komunitas mendukung nilai-nilai gotong royong dan saling bantu di lingkungan sekitar?
5. Bagaimana Anda melihat keterhubungan antara pelestarian alam, peningkatan pendapatan, dan keharmonisan sosial di desa ini?

Metro, 21 Mei 2025

Mengetahui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP: 19721001 1999031 003

Pembimbing Pendamping



Putri Swastika, Ph.D.
NIP: 19861030 2018012 001

**KONSEP *GREEN ECONOMY* UNTUK PENGELOLAAN EKOWISATA
BRAJA HARJOSARI**

Outline Tesis

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Konsep Green Economy
 - 1. Pengertian Green Economy
 - 2. Pilar-pilar Green Economy
- B. Green Economy Sebagai Kerangka Teoritis dalam Ekowisata
- C. Konsep Ekologi dalam Perspektif Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum tentang Lokus Penelitian
- B. Penerapan Konsep Green Economy dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari
- C. Konsep Green Economy dalam Pengelolaan Ekowisata Braja Harjosari Perspektif Islam

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

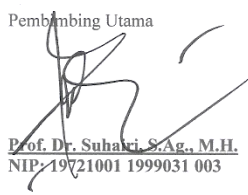
LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 21 Mei 2025

Mengetahui

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Subakti, S.Ag., M.H.
NIP: 19721001 1999031 003

Pembimbing Pendamping


Putri Swastika, Ph.D.
NIP: 19861030 2018012 001



Nama : Raditio Wahid Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040130 Semester / TA : VI/ 2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
1.	10 Mei 2025	Putri Swastika, Ph.D.	ACC Pendalaman	

Mahasiswa Ybs,


- **Putri Swastika, Ph.D.**
NIP: 198610302018012001

Radifio Wahid
NPM: 2271040130

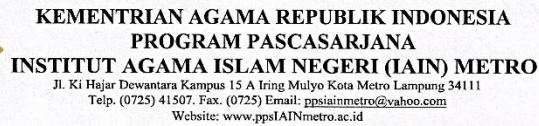


Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
1.	01 Mei 2025	Putri Swastika, Ph.D.	Perkuat teori dan indikator	

Putri Swastika, Ph.D.
NIP: 198610302018012001

147



Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

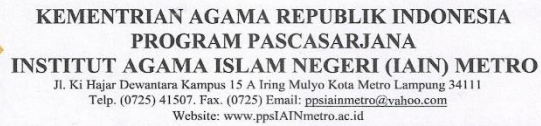
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VI/ 2025

Pembimbing II

Putri Swastika, Ph.D.
NIP: 198610302018012001

Mahasiswa Ybs,

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VI/ 2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
1.	21 Mei 2025	Putri Swastika, Ph.D.	ACC APD dan Outline	

Mahasiswa Ybs,

Putri Swastika, Ph.D.
NIP: 198610302018012001

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VI/2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
I.	Kamis, 22/05-25	Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.	- Ane APD - Outline & pembahasan seminar literatur	
	Senin, 26/05-28		- Ane Outline - tugas & pengerjaan dan laporan	

Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP: 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VI/2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Sulhairi, S.Ag., M.H.
NIP: 1972100 1199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppslainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VII/2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
1.	Jumat, 08/11-25	Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.	Apa untuk di- update	

Pembimbing I

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP: 1972100 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VII/2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
I.	Rabu 19/11-25	Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.	- Setiap ada lapangan atau forum, baik yang dipublikasikan dengan wawancara / dokumentasi. - Menopen, mengungkap 'obsesi', namun belum ada data yang dipublikasikan melalui wawancara	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP: 1972100 1199903 1 003

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VII/ 2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
1.	24 okt 2025	Putri Swastika, Ph.D.	ACC ke pembimbing 1	

Pembimbing II

Putri Swastika, Ph.D.
NIP: 198610302018012001

Mahasiswa Ybs,

Raditio Wahid
NPM: 2271040130



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiainmetro@yahoo.com
Website: www.ppsiainmetro.ac.id

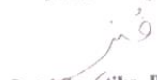
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

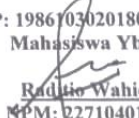
Nama : Raditio Wahid
NPM : 2271040130

Prodi : Ekonomi Syariah
Semester / TA : VII/ 2025

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
1.		Putri Swastika, Ph.D.	- Typo, titik koma, spasi, penggunaan huruf besar/kecil, awal kalimat, dicek kembali. Masih ada kesalahan. WAJIB sesuai gramatika Bahasa Indonesia. - Bab 2: apakah semua teori yg dituliskan digunakan dalam pembahasan? Bab 2 = pisau analisa, jadi tulis apa yg akan digunakan untuk membahas findings (hasil) penelitian. - Bab 3: key informan yang ditulis pada sumber data berbeda dengan key informan yang ditulis pada wawancara, teknik triangulasi tidak dijelaskan, dst (lihat catatan pada naskah). - Bab 4: Sistematika Bab 4: Gambaran Umum, Hasil Penelitian, Pembahasan. Pembahasan dibagi sesuai dengan pertanyaan penelitian, isinya membahas hasil penelitian menggunakan teori yang ditulis pada Bab 2 (Bab 2 = pisau analisa). Secara umum sistematika Bab 4 masih mencampur antara hasil penelitian dan pembahasan. Juga belum optimal penggunaan Bab 2 sebagai pisau untuk menganalisa hasil penelitian.	

Pembimbing II


Putri Swastika, Ph.D.

NIP: 198610302018012001
Mahasiswa Ybs,

Raditio Wahid
NPM: 2271040130

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Raditio Wahid, Lahir pada tanggal 21 September 1999 di desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. peneliti telah menempuh pendidikan formal di TK pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda

Lehan dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Lehan hingga lulus pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Lehan dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Perbankan Syariah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun ajaran 2017/2018.